

IAIN SYKEH NURJATI CIREBON DALAM ALUR DINAMIKA SEJARAH (1965-2021)



**Dr. Anwar Sanusi, M. AG
Dr. Tendi, M. Ag**

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2022**

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peneliti : Dr. Anwar Sanusi, M. Ag

Tendi, M. Ag

Judul Penelitian : "IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri, benar keasliannya, bukan skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di kemudian hari karya ini terbukti merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawab sekaligus menerima sanksi sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku termasuk mengembalikan seluruh dana yang telah saya terima kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Cirebon, 15 Desember 2021
Peneliti,



Dr. Anwar Sanusi, M. Ag
NIP. 197105012000031004

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH AKADEMIK HASIL PENELITIAN DOSEN

1. Judul Penelitian : "IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"
2. Kategori : Sejarah
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama lengkap : Dr. Anwar Sanusi, M. Ag
 - b. NIDN : 2001057102
 - c. Disiplin Ilmu : Sejarah Peradaban Islam
 - d. Pangkat/Gol : Pembina / Iva
 - e. Fakultas/Prodi : FUAD / SPI
 - f. Alamat rumah : Jl. Kendal 28 RT. 003 RW 15 Taman Nuansa Manasemkel. Karyamulya kec. Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat
 - g. Email : anwarsanusiasnaf@gmail.com
 - h. Hp : 085224028881
4. Jumlah anggota Peneliti : 1 orang
5. Nama Anggota : Tendi, M. Ag
6. Lokasi Penelitian : Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon
7. Sumber dana Penelitian : DIPA IAIN Syekh Nurjati tahun 2021
8. Jumlah Biaya penelitian :

Cirebon, 01 Oktober 2021
Ketua LP2M

Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag.
NIP. 19750119 200501 1 002

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

ABSTRAK

Kelahiran perguruan tinggi Islam di Nusantara, telah diupayakan sejak masa kolonial Hindia Belanda. Meskipun telah berdiri sejumlah lembaga pendidikan Islam pada masa itu, perkembangan yang berarti baru terjadi setelah Indonesia merdeka. Kemunculan lembaga pendidikan tinggi Islam di tingkat nasional, menginspirasi kemunculan semangat yang sama untuk mendirikan lembaga dengan status yang sama di tingkat daerah. Salah satu daerah itu adalah Cirebon, yang kemudian melalui proses panjang dengan pelbagai dinamikanya melahirkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perkembangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon beserta tokoh-tokoh pentingnya, dan menjelaskan fase-fase perkembangannya. Metode sejarah merupakan metode yang paling cocok untuk digunakan dalam kajian mengenai perjalanan suatu lembaga seperti ini. Dengan penelitian ini, dapat diketahui bahwa transformasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon sejak awal perintisannya hingga saat ini dapat dijabarkan ke dalam sejumlah fase perkembangan berikut: 1) Periode Perintisan dan Peletakan Landasan, 1962-1965; 2) Periode Penyesuaian Akademik dan Manajemen, 1965-1997; 3) Periode Pemantapan Kelembagaan, 1997-2009; dan 4) Periode Transformasi, 2009-2021.

Adapun rangkaian tahapan dalam metode sejarah, terbagi ke dalam empat tahapan, yang di antaranya adalah: heuristik atau pengumpulan data, kritik sumber atau verifikasi baik itu secara internal ataupun eksternal data, interpretasi atau penafsiran/analisis sejarah, dan historiografi atau penulisan sejarah.

Kata kunci: PTI Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, dan transformasi kelembagaan.

ABSTRACT

The birth of Islamic universities in the archipelago, has been pursued since the colonial period of the Dutch East Indies. Although there have been a number of Islamic educational institutions at that time, meaningful development only occurred after Indonesia's independence. The emergence of Islamic higher education institutions at the national level, inspired the emergence of the same spirit to establish institutions with the same status at the regional level. One of those areas is Cirebon. Which then went through a long process with various dynamics gave birth to IAIN Sheikh Nurjati Cirebon. This research aims to outline the development of IAIN Sheikh Nurjati Cirebon and its important figures, and explain the phases of its development. The historical method is the most suitable method to be used in the study of the journey of an institution like this. With this research, It can be known that the transformation of IAIN Sheikh Nurjati Cirebon from the beginning of its pioneering to date can be spelled out into a number of the following developmental phases: 1) Pioneering and Laying Period, 1962-1965; 2) Period of Academic and Management Adjustment, 1965-1997; 3) Period of Institutional Stabilization, 1997-2009; and 4) Transformation Period, 2009-2021.

The series of stages in the historical method, divided into four stages, which include: heuristic or data collection, criticism of sources or verification whether internally or externally data, interpretation or interpretation / analysis of history, and historiography or history writing.

Keywords : PTI Cirebon, IAIN Sheikh Nurjati, and institutional transformation.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala pujian dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT telah memberikan taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga terlaksana kegiatan penelitian yang dirangkai dengan laporan penelitian yang ada ditangan pembaca. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabat, dan umat beliau hingga akhir masa.

Laporan ini mengangkat tema : "IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)". Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif yang diarahkan untuk menghasilkan produk berupa arketipe (*Prototype*) atau bentuk awal dari media pembelajaran bahasa arab berbantuan internet (e-learning) untuk dipergunakan dalam penelitian tahap pengembangan selanjutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta,M.Ag. Selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. Hajam, M.Ag Selaku Dekan fakultas Ushuludin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Ibu Aah Syafa'ah, M.Ag selaku ketua prodi Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
4. Bapak Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nirjati Cirebon
5. Bapak Dr. H. Budi Manfaat, M.Si Selaku Kepala Penelitian dan Penerbitan
6. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini

Peneliti sangat menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan dan tentunya banyak kekurangan. Unutk itu mohon kritik dan sarannya agar laporan ini dapat menjadi lebih baik lagi. *Jazakumullah khairal jaza'*

Cirebon,21 Desember 2021
Peneliti

"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

DAFTAR ISI

PENGANTAR ILMU SEJARAH

KATA PENGANTAR REDAKSI	I
ABSTRAK	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
<i>A. LATAR BELAKANG</i>	1
<i>B. RUMUSAN MASALAH</i>	8
<i>C. PENDEKATAN NARATIVISME</i>	8
<i>D. PENELITIAN DAN KARYA-KARYA TERDAHULU</i>	13
<i>E. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN</i>	19
<i>F. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN</i>	20
<i>G. SISTEMATIKA PENULISAN</i>	24
BAB II LATAR BELAKANG SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA	28
<i>A. KEHADIRAN DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA</i>	28
<i>B. SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA</i>	31
<i>C. DINAMIKA PERJALANAN SEJARAH PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA</i>	42
BAB III PERIODE PERINTISAN DAN PELETAKAN LANDASAN, 1962-1965	60
<i>A. CIREBON PADA MASA ORDE LAMA</i>	60
<i>B. KONDISI KALANGAN TERPELAJAR MUSLIM DI CIREBON</i>	61
<i>MANIFESTASI GERAKAN KALANGAN PELAJAR MUSLIM</i>	63
BAB IV PERIODE PENYESUAIAN AKADEMIK DAN MANAJEMEN, 1965-1997	68
<i>A. FAKULTAS TARBIYAH DAN FAKULTAS USHULUDDIN CABANG CIREBON</i>	68
<i>B. FAKULTAS TABIYAH LAIN SUNAN GUNUNG DJATI CABANG CIREBON</i>	78
BAB V PERIODE PEMANTAPAN KELEMBAGAAN, 1997-2009	92
<i>A. PERINTISAN AWAL OTONOMI KELEMBAGAAN</i>	92
<i>B. STAIN CIREBON DAN PENGEMBANGAN AWAL LEMBAGA</i>	95
<i>C. PEMANTAPAN KELEMBAGAAN STAIN CIREBON</i>	100

BAB VI	PERIODE TRANSFORMASI, 2009-2021		112
A	<i>DINAMIKA DI MASA TRANSISI</i>		112
B	<i>PEMBAHARUAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN</i>		114
C	<i>TRANSFORMASI KELEMBAGAAN LAIN CIREBON: DARI INSTITUT MENJADI UNIVERSITAS</i>		119
BAB VII	PENUTUP		128
A	<i>KESIMPULAN</i>		128
B	<i>SARAN</i>		130
DAFTAR FUSTAKA			131
BUKU			131
INTERNET			134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi adalah salah satu jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, yang berada dalam tingkat tertinggi apabila dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Secara spesifik, Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003, pasal 19 ayat 1, menguraikan konsep mengenai pendidikan tinggi. Dalam uraian tersebut, pendidikan tinggi dituliskan sebagai jenjang pendidikan (yang diselenggarakan) setelah pendidikan menengah, yang (mana pendidikan tinggi tersebut) mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor. Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan demi mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dengan konkret diungkapkan bahwa, “tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Konsep dan tujuan pendidikan nasional, dirumuskan dari Amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi landasan penting bagi sistem dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagaimana bunyi konstitusi negara kita tersebut, tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkannya, dikembangkanlah pelbagai macam peraturan perundangan dan kebijakan dari pemerintah, tidak hanya Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang telah disebutkan sebelumnya saja, namun juga termasuk di dalamnya adalah UU No. 12 Tahun 2012 tentang *"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"*

Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintahan (PP) No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Secara historis, pendidikan tinggi di Indonesia baru dirintis pada dua dekade awal Abad 20 M, dengan didirikannya *Technische Hooge School* di Bandung pada tahun 1920.¹ Terputusnya hubungan antara Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan negeri induknya di Eropa akibat berkecamuknya Perang Dunia I, membuat koloni itu kekurangan tenaga ahli yang berpendidikan tinggi, sehingga pada akhirnya pemerintah Hindia membangun perguruan tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja berpendidikan di setiap instansi pemerintahan. Meski awalnya direncanakan untuk dibangun di Batavia, namun pada akhirnya Bandung dipilih sebagai tempat untuk pembangunan pendidikan tinggi tersebut.

Pendidikan tinggi merupakan sistem yang didesain untuk mencetak generasi terdidik berkarakter, dalam rangka mendukung langkah progresif pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan pelbagai macam kegiatan penting yang termanifestasikan ke dalam wujud "Tri Dharma" pendidikan tinggi. Ketiga poin yang menjadi misi wajib di setiap lembaga atau perguruan tinggi ini, di antaranya adalah: 1) pendidikan yang umumnya dibarengi dengan pengajaran; 2) penelitian dan juga ditambahkan dengan pengembangan; serta 3) pengabdian kepada masyarakat yang dapat dikerjakan dalam pelbagai macam kegiatan. Pelaksanaan Tri Dharma di lingkungan perguruan tinggi, merupakan suatu upaya guna membawa kehidupan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik,

¹ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 142.

agar dapat mengejar ketertinggalan yang sebelumnya telah terjadi dari negara-negara maju di dunia. Terkait hal ini, eksistensi pendidikan tinggi telah membuat Indonesia berada dalam kondisi yang lebih optimis karena pendidikan Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, diperkirakan akan mengalami kemajuan atau perkembangan yang lebih optimal ke depannya selama strategi pendidikan yang dirumuskan, dapat dilakukan sebaik-baiknya.²

Dalam konteks pendidikan tinggi ini, pendidikan tinggi Islam turut berkembang sehingga menghadirkan satu sisi unik lain dalam bidang atau dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan Islam yang telah berkembang sejak awal kehadirannya di Nusantara, telah memberi warna khasnya tersendiri sehingga selama beberapa abad tetap dapat bertahan dan eksis, bahkan turut berkembang mengikuti perubahan zaman. Pada periode paling awal, pendidikan Islam muncul secara informal karena kehadirannya masih merupakan bagian dari internalisasi, sosialisasi dan penguatan ajaran Islam semata. Namun meskipun begitu, pola pendidikan informal tersebut berjalan secara efektif karena nilai-nilai yang ditransformasikan di dalam pengajaran dapat terserap oleh masyarakat dengan baik. Dalam perkembangan selanjutnya, keberhasilan pendidikan Islam tidak hanya ditandai dengan penyebarannya yang massif ke tengah masyarakat namun juga ditampakkan dengan hadirnya banyak kekuasaan berorientasi Islam dalam sejarah Indonesia.

Saat peradaban masyarakat Nusantara mengalami kemunduran akibat adanya kolonialisme asing yang berjalan selama ratusan tahun, gema gerakan Islam tetap berjalan meskipun berada dalam tekanan yang berbeda dari periode sebelumnya. Pada dekade ketiga Abad 20 M, sudah muncul ide brilian tentang masa depan pendidikan tinggi Islam Indonesia. Pada tahun 1930-an, wacana itu semakin ramai

² Elfian, Prasetio Ariwibowo, dan Ria Susanti Johan, "Peran Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Produktivitas Pendidikan", *Sosio-E-Kons*, Vol. 9, No. 3 (Desember 2017), hal. 200-215.

berkat ide Dr. Satiman Wirjosandjoyo tentang diperlukannya sebuah lembaga pendidikan tinggi untuk mempelajari Islam.³ Gerak keumatan ini kemudian menjadi suatu hal yang konkrit di akhir-akhir periode kolonial Indonesia dalam bentuk STI (Sekolah Tinggi Islam) pada 8 Juli 1945, yang digagas oleh pelbagai organisasi dan perkumpulan keagamaan berorientasi Islam di Indonesia. Peresmian lembaga tinggi Islam merupakan suatu kemajuan pada masa Jepang tersebut, sebab tidak semua perguruan tinggi bisa tetap buka dan melakukan kegiatan belajar mengajar. Pada masa Jepang, hanya ada beberapa lembaga pendidikan tinggi yang diizinkan tetap dibuka, seperti Sekolah Kedokteran Tinggi (*Ika Dai Gakko*); Sekolah Kedokteran Gigi (*Shika Gakko*); Sekolah Ahli Obat (*Yaku Gakko*); Sekolah Teknik Tinggi (*Kagyo Dai Dakko*); Akademi Pemerintahan (*Kenkoku Gakko In*); dan Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan (*Bogor Semon Zui Gakko*).⁴

Pasca Indonesia merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan pihak asing, STI lalu bertransformasi menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Perubahan itu bermula dengan pembentukan Panitia Perbaikan STI pada November 1947, yang kemudian dalam rangkaian rapat selanjutnya menghasilkan kesepakatan untuk meresmikan STI dengan nama baru Universitas Islam Indonesia (UII). Melalui rapat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1948, ditetapkan bahwa UII akan membuka empat fakultas, yang antara lain: Fakultas Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Hukum. Walaupun sebenarnya STI atau UII adalah lembaga yang dirintis oleh pihak swasta, dalam perkembangannya fakultas keagamaan dari perguruan tinggi ini bermetamorfosa menjadi perguruan tinggi milik negara dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Dengan kata lain, STI

³ Jajat Burhanuddin, "The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, 2014, hal. 26.

⁴ Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. I., (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hal. 123.

atau UII merupakan cikal bakal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN yang pengelolaannya pada era kontemporer berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Saat ini, pendidikan tinggi dan universitas Islam yang berafiliasi atau berada di bawah koordinasi pemerintah, memainkan peranan yang vital dalam diskursus mengenai masa depan Islam yang ada di wilayah Indonesia.⁵

Lahirnya perguruan tinggi Islam di tingkat nasional, selanjutnya menginspirasi kemunculan semangat yang sama untuk mendirikan lembaga yang status jenjangnya lebih tinggi dari pendidikan dasar dan menengah atau setara dengan pendidikan tinggi Islam tersebut, di tingkat daerah. Salah satu daerah yang mendapat pengaruh dan motivasi gerakan ke-Islaman dimaksud adalah Cirebon. Melalui forum *Islamic Study Club* (ISC) Cirebon, kalangan terpelajar yang berasal dari pelbagai macam kelompok di daerah itu mencoba menginisiasi terbentuknya suatu lembaga pendidikan tinggi yang dapat memberi kesempatan kepada setiap anak yang belajar di dalamnya untuk dapat maju dan berkembang guna memperbaiki sisi-sisi kehidupan masyarakat yang saat itu masih dalam tahap pembangunan pasca perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Terlebih wilayah Cirebon, yang memiliki jejak dan rekam sejarah yang panjang dalam pendidikan Islam sejak era pra-kolonial, yang di awal masa kemerdekaan masih banyak tersisa dengan wujud kelestarian sejumlah pondok pesantren besar yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Nilai-nilai Islam tampak jelas dalam sejumlah perang Cirebon melawan kolonialisme, seperti halnya Perang Bagus Rangen yang di dalam pergerakannya terdapat sejumlah nuansa Islam yang nyata.⁶

⁵ Ronald A. Lukens-Bull, *Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict*, (New York: Palgrave Macmillan, 2013), hal. 2.

⁶ Sejumlah unsur Islam yang dimaksud dalam perang tersebut, di antaranya adalah: 1) Pemahaman tentang konsep juru selamat pada akhir zaman; 2) Aktivitas ritual kepada Allah SWT sebagai penguat motivasi dalam perang; dan 3) Penggunaan atribut berwarna putih yang identik dengan gerakan Islam. Lihat lebih lanjut, Tendi, "Islam dalam Perjuangan Bagus Rangen Melawan *"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"*

Perguruan tinggi Islam di Cirebon, berkembang bersama dengan cabang-cabang lain Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, sesuai dengan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, yang dalam konteks ini adalah Departemen Agama dan kemudian kini telah berubah namanya menjadi Kementerian Agama. Pada mulanya, kemunculan lembaga pendidikan tinggi diinisiasi oleh sejumlah pesantren dan kalangan terpelajar Cirebon yang sistem pendidikannya mengikuti sistem perguruan tinggi Islam pusat di Yogyakarta dan Jakarta, lalu bertransformasi setelah adanya perubahan status negeri oleh pemerintah dengan lahirnya Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah cabang Cirebon (*Fakultas Tarbijah Al-Djami'ah Sjarief Hidajatullah tjabang Tjirebon*) dan Sekolah Persiapan IAIN yang merupakan kampus cabang Jakarta yang ada di Cirebon. Peresmian status negeri ini terjadi pada tanggal 12 Agustus 1965 M yang bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1385 H, oleh Prof. K.H. Saefuddin Zuhri selaku Menteri Agama Republik Indonesia pada masa itu.⁷

Saat terjadi perubahan struktur pengelolaan yang mesti disesuaikan dengan hierarki kedaerahan, lembaga pendidikan tinggi Islam Cirebon ini mesti beralih di bawah cabang Bandung. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1976, yang diresmikan oleh Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 12 yang dibuat pada tahun 1976, tentang Pemindahan Pengindukan Perguruan Tinggi Islam.⁸ Dengan menimbang bahwa cabang-cabang fakultas di luar IAIN induk, perlu ditingkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikannya, maka pada tanggal 21 Maret 1997 Pemerintah menetapkan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, yang salah satunya adalah STAIN Cirebon. Keputusan ini adalah upaya

Pemerintah Kolonial Belanda-Prancis dan Inggris, 1810-1812" *Tamaddun* Vol. 6 , No. 2, (Juli - Desember 2018), hal. 149-176.

⁷ Tim Penulis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, *Kenangan Wisuda Sarjana: 28 Agustus 1999*, (Cirebon: STAIN Cirebon, 1999), hal. 8.

⁸ Panitia Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, *Kenang-Kenangan 20 Tahun (1968-1988)*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1988), hal. 26.

pemerintah untuk meningkatkan peran perguruan tinggi Islam karena telah melihat bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada tahun 2009, dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan ilmu pengetahuan Agama Islam, pemerintah kembali mengembangkan lebih lanjut lembaga itu sehingga berubah namanya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pada tahun 2021, Menteri Agama memprioritaskan salah satu program kerjanya pada pengembangan pendidikan agama berbasis digital dan mendukung transformasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI) Cirebon.

Dengan total 18 persen dari total semua mahasiswa universitas negeri di seluruh Indonesia, IAIN Cirebon dan lembaga atau universitas Islam negeri lainnya turut memainkan peran penting dalam perdebatan wacana ke-Islaman saat ini.⁹ Peranan strategis itu akan membawa lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut ke arah yang lebih maju. Namun demikian, perkembangan itu mesti memiliki tonggak kesejarahan yang pasti agar bangunan yang dibuat di atasnya lebih kokoh dan kuat. Adapun perkembangan lembaga pendidikan tinggi Islam di Cirebon, sejak awal perkembangannya dari pendidikan Islam dalam sejarah masyarakat muslim Nusantara hingga seperti saat ini, dapat dilihat secara holistik dan komprehensif melalui studi sejarah. Kesenambungan itu bersifat mengikat, dan terhubung satu sama lain melalui mata rantai sejarah antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Bagaimanapun, perubahan dan kemajuan yang akan terjadi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mesti ditopang dengan narasi historis yang jelas, agar tampak identitas khas, orientasi, tujuan, dan cita-cita mulia yang hendak digaungkan oleh

⁹ Richard G. Kraince, "Islamic higher education and social cohesion in Indonesia." *Prospects* 37 (3), 2008: 348-349.

perguruan tinggi Islam tersebut untuk kemajuan umat Islam dan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam studi ini adalah transformasi kelembagaan, sehingga penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertransformasi, sejak awal berdirinya pada masa Orde Lama hingga saat ini yang telah berkembang menjadi UISSI (Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia) Cirebon. Untuk mempermudah proses penelitian, dirumuskan masalah penelitian ke dalam sejumlah pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia?
2. Bagaimana perintisan perguruan tinggi Islam negeri di Cirebon?
3. Bagaimana penyesuaian akademik dan manajemen perguruan tinggi Islam negeri Cirebon?
4. Bagaimana proses pemantapan kelembagaan STAIN Cirebon?
5. Bagaimana perkembangan dan transformasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

C. Pendekatan Narativisme

Pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagai salah satu organ pemerintah yang berada di bawah Kementerian Agama, dibarengi dengan acuan sistem penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan oleh dua kementerian, yaitu: Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Maksud pendirian lembaga ini adalah untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan tentang Agama Islam.¹⁰ Perkembangan

¹⁰ Peraturan Pemerintah 1950 No. 34 tentang Pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam.

wacana ke-Islaman yang semakin kompleks yang dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi atas sumber daya manusia yang ahli dalam bidang agama, mendorong pemerintah untuk mengembangkan PTAIN. Oleh karena itu, 10 (sepuluh) tahun setelah pembentukan PTAIN yang pertama, maka dibentuk pula perluasan PTAIN di Jakarta yang dikembangkan dari Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta. Kedua lembaga itu digabungkan menjadi "*Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah*" dengan pusat berkedudukan di Yogyakarta dan ADIA Jakarta dijadikan Fakultas dari Institut tersebut.¹¹

Setelah berjalan selama beberapa bulan, kehadiran PTAIN di dua kota itu mendorong sejumlah daerah lain untuk turut pula membangun perguruan tinggi Islam. Arus revolusi masyarakat yang berjalan begitu cepat, membuat kondisi yang ada tampak tidak lagi relevan dengan kondisi zaman. Sejumlah wakil rakyat dari daerah menyuarakan keinginan perluasan lembaga tinggi Islam, dan mencoba membicarakannya dengan pemerintah. Upaya itu diperkuat dengan keputusan rapat-rapat bersama yang akhirnya dikukuhkan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tanggal 3 Desember 1960 No. II/MPRS/1960 tentang garis-garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 – 1969, Lampiran A Bidang Mental/ Agama/ Kerokhanian/ Penelitian ad 2 sub a terutama ad 7, disusul dengan Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. 1/Res/MPRS/1963, Lampiran A ad 5, yang dengan tegas meminta perluasan Institut Agama Islam Negeri. Pada perkembangannya, pemerintah menetapkan bahwa di luar Yogyakarta dan Jakarta dapat diadakan fakultas atau cabang fakultas perguruan tinggi Islam yang memiliki hak penyelenggaraan pelajaran dan ujian.¹² Di Cirebon, perguruan tinggi

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri.

¹² Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Presiden No.11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri.

Islam yang dikelola oleh swasta baru dapat dinegerikan pada tahun 1965.

Untuk mengurai jawaban atas permasalahan dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan naratif (*narativisme*). Penjelasan naratif atau *narativisme*, merupakan model penjelasan yang menyatakan bahwa fragmen-fragmen masa lalu dapat dirangkai ke dalam suatu bentuk narasi holistik. Pendekatan ini dikembangkan dari pemikiran Johann Gustav Droysen (1808-1886) oleh Ankersmit, yang berupaya mengembangkan model penafsiran atas usaha penerangan masa silam. Kemunculan *narativisme*, merupakan buah ketidakpuasan peneliti sejarah dalam penerapan model sejarah lama yang dianggap kurang memadai. Untuk itu, dilakukan upaya untuk mencari metodologi yang dapat digunakan secara tepat.¹³ Sebagai salah satu pendekatan filsafat sejarah, *narativisme* dapat dipakai untuk memberikan penjelasan interpretatif terhadap data-data yang berasal dari masa lalu. Penjelasan korelatif di antara pelbagai elemen yang didapatkan dari studi sejarah menjadi suatu kesatuan utuh dalam sebuah pandangan filsafat sejarah merupakan tugas utama *narativisme*.

Korelasi atau “keberkaitan”, dikembangkan oleh W.H. Walsh yang mencirikan pendekatan naratif sebagai penghubungan pelbagai bagian dari masa lalu, walaupun segi-segi itu sebetulnya bisa dilihat sebagai perwujudan hal yang mengikat dalam fakta sejarah. Oleh sebab itu, hal yang mengikat tersebut tidak dapat terwujud hanya dalam sebuah karakter yang unik, yang secara tepat merupakan bagian lain dari aspek-aspek yang ada pada masa tersebut.¹⁴ Karena akarnya adalah filsafat realisme, *narativisme* juga disebut sebagai

¹³ Darmiyati. Zuchdi, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca Peningkatan Komprehensi*. (Yogyakarta : UNY Press Zuhdi, 2008), hal. 9.

¹⁴ F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (diterjemahkan oleh Dick Hartoko), Jakarta: PT. Gramedia, 1987, hal. 226.

histoire evenementielle (sejarah peristiwa).¹⁵ Untuk mendeskripsikan pelbagai macam gejala dalam pendekatan naratif, terdapat tiga opsi untuk memberi tempat yang semestinya terhadap konsep “keberkaitan” dalam pendekatan naratif, yaitu: (1) Cara ini dapat melihat bahwa pelbagai gejala termasuk dalam kategori yang tidak berbeda; (2) Pengaturan teoritis dalam mengaitkan gejala-gejala yang merupakan kategori yang berbeda; dan (3) pengaturan konfigurasi yang tidak sama dengan kedua cara sebelumnya. Cara ini dipakai guna mengelola pelbagai gejala dalam uraian sejarah dengan melihat kilasannya dari perspektif yang sama terhadap hal-hal yang secara teoritis berbeda.¹⁶

Pengaturan konfigurasi yang dapat memunculkan konsep ‘keberkaitan’ dengan memperlihatkan fakta-fakta secara detail dalam rangkaian relasional suatu narasi atau gambaran sejarah yang utuh, merupakan cara yang cocok untuk mengkaji sejarah IAIN dan menelaah perkembangannya dari waktu ke waktu. Operasionalisasi pengaturan itu dilakukan dengan cara menampilkan pelbagai fakta yang memiliki keterkaitan dengan narasi historis. Dengan kata lain, narativisme mengembangkan ‘keberkaitan’ fakta sebagai suatu deskripsi sejarah. Terkait hal ini, Lemon menyatakan bahwa pendekatan naratif, sebagai upaya untuk mengembangkan fakta sejarah, merupakan laporan faktual dari peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, pendekatan naratif teratur atau terkelola dalam bentuk struktur rangkaian kejadian yang berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain.¹⁷

Terkait pengaturan konfigurasi tersebut, terdapat beberapa karakter khas pendekatan naratif, yang di antaranya adalah: a)

¹⁵ Peter Burke "History of Events and the Revival of Narrative", Peter Burke (ed.), *The New Perspectives on Historical Writing*, 1991, hal. 233.

¹⁶ F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (diterjemahkan oleh Dick Hartoko), Jakarta: PT. Gramedia, 1987, hal. 227.

¹⁷ M.C. Lemon, *Philosophy of History: A Guide for Students*, London and New York: Routledge Taylor Francis Group, 2003.), hal. 299.

Narativisme bertumpu pada apa yang terjadi dengan fokus deskripsi pada lebih dari satu obyek, situasi maupun analisis; b) Narativisme tidak berhubungan dengan peristiwa tunggal, melainkan dengan rangkaian dua atau lebih dari peristiwa-peristiwa; dan c) Narativisme berbeda dengan penataan kejadian kronologis yang hanya merupakan penyusunan kelompok kejadian atau fenomena dari yang lebih awal ke yang lebih akhir. Dalam pendekatan ini, bahasa menjadi instrumen penting karena nilai kebenaran memiliki ketergantungan terhadap bahasa. Nilai kebenaran harus dipenuhi mengingat narasi sejarah membutuhkan obyektivitas pengetahuan.¹⁸ Bagaimanapun, guna memenuhi koherensi deskriptif dibutuhkan syarat tertentu termasuk tutur bahasa tadi. Hal itu perlu dilakukan agar dapat tercipta narasi historis yang memiliki landasan kuat berupa rangkaian fakta-fakta dari masa lalu yang konkret. Dengan memerhatikan hal ini, Ankersmit menyatakan bahwa pengungkapan konsep keberkaitan dalam pendekatan naratif dilakukan dengan memakai bahasa menjadi permasalahan yang unik dalam suatu narasi sejarah.¹⁹

Pelibatan hal-hal sederhana yang bersifat implisit dan pertimbangan terhadap peristiwa secara adil untuk menyaring mana yang “benar” dan “nyata” dalam penulisan alur cerita sejarah merupakan bagian narativisme yang sangat penting. Hal itu perlu dilakukan karena untuk menghindarkan penulis sejarah dari sergapan imajinasi yang acapkali menggoda dalam proses historiografi, di samping membatasi fakta-fakta yang dihimpun dari data dengan menyeleksinya secara ketat dan hati-hati. Namun meskipun begitu, penjelasan sejarah yang menggunakan narativisme tidak menjadikan seluruh peristiwa kecil sebagai bagian yang mesti dijelaskan karena terdapat pertimbangan penting atau tidaknya

¹⁸ Irmayanti M. Budianto, *Realitas dan Obyektivitas: Refleksi Kritis Atas Cara Kerja Ilmiah*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2005, hal. 99.

¹⁹ F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (diterjemahkan oleh Dick Hartoko), Jakarta: PT. Gramedia, 1987, hal. 227.

peristiwa itu untuk dituliskan.²⁰ Oleh sebab itu, penyaringan fakta-fakta yang dianggap penting dan terkait dengan tema penelitian guna menyokong kronologi kejadian merupakan syarat paling mendasar bagi penulis untuk menggunakan narativisme dalam penelitian ini. Dalam menelaah alur panjang sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penulis menyeleksi pelbagai peristiwa yang dianggap signifikan untuk menyusun kronologi sejarah secara komprehensif. Dengan demikian, narativisme sebagai sebuah metodologi, yang penulis gunakan untuk mempermudah proses eksplanasi terhadap pelbagai macam pertanyaan penelitian yang merupakan hasil penjabaran dari rumusan permasalahan, merupakan suatu metode dalam merekonstruksi masa lalu yang memiliki perspektif dan teknis operasinalisasi yang khas.

D. Penelitian dan Karya-Karya Terdahulu

Berdasarkan himpunan data dan literatur yang berhasil ditelusuri, penulis tidak banyak menemukan karya tulis ilmiah atau buku terkait sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Satu-satunya karya tulis perihal tema ini hanyalah penelitian Zaendal Masduqi, dkk., yang sayangnya belum ditemukan kembali bukti fisiknya. Meskipun demikian, dalam pengetahuan penulis, terdapat beberapa literatur atau dokumen, yang turut mengulas sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, walaupun dalam porsi yang kecil atau hanya menjadi bagian tambahan untuk melengkapi tema studi sejarah lainnya saja. Sejumlah dokumen tertulis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dari Jalan Samadikun ke Jalan Perjuangan: Upaya Meretas Perguruan Tinggi Islam Berkualitas: (1960-2014)*. Karya tulis ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Masduqi, dkk., saat melakukan penelitian dengan sumber dana penelitian dari kampus pada tahun 2014.

²⁰ M.C. Lemon, *Philosophy of History: A Guide for Students*, London and New York: Routledge Taylor Francis Group, 2003.), hal. 347-349.

Dalam buku ini, diuraikan sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sejak kampus ini bernama menjadi bagian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sampai pada tahun 2014 ketika perguruan tinggi tersebut telah berstatus sebagai Institut Agama Islam Negeri. Perkembangan yang disorot dalam karya tulis ini adalah peralihannya dari Jalan Samadikun ke Jalan Perjuangan, yang menyiratkan pembangunan IAIN yang semakin maju.

2. *Kenangan Wisuda Sarjana: 16 September 1993*. Buku ini disusun oleh Tim Penulis IAIN Sunan Gunung Djati Fakultas Tarbiyah Cirebon, sebagai bagian dari kenang-kenangan yang akan dibagi-bagikan kepada seluruh wisudawan yang telah rampung melaksanakan studi di Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon. Buku ini memberikan gambaran sejarah yang cukup lengkap karena menjelaskan latar belakang sejarah lembaga, dari tahun 1960-an hingga awal tahun 1990-an. Pertumbuhan dan perkembangan institusi juga diuraikan untuk memberikan bacaan yang lebih jelas kepada pembaca agar dapat memahami alur sejarah kelembagaan secara utuh. Data statistik tenaga pengajar dan alumni yang berhasil diluluskan, turut pula disampaikan sebagai informasi ke tengah para pembaca bahwa lembaga pendidikan ini memiliki sumber daya manusia yang mumpuni.
3. *Kenangan Wisuda Sarjana: 28 Agustus 1999*. Buku ini disusun oleh Tim Penulis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, dalam rangka keperluan wisuda mahasiswa yang akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 1999. Di dalamnya, tim penulis menjelaskan gambaran umum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon dengan sangat baik. Tidak hanya memulai narasinya dengan menjelaskan sejarah kelahiran lembaga, namun juga menguraikan perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang menarik di dalamnya adalah penyebutan sejumlah nama tokoh yang ternyata memiliki peran yang sangat vital bagi perkembangan *"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"*

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, namun tidak begitu dikenal. Daftar nama tokoh itu juga menyajikan perspektif baru bahwa dalam catatan sejarahnya lembaga pendidikan tinggi ini dirintis oleh kaum muslim secara bersama-sama, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tim penulis juga menyajikan tokoh-tokoh pimpinan IAIN Syekh Nurjati secara lengkap. Buku ini juga memberikan gambaran yang utuh tentang perkembangan jumlah alumni dari waktu ke waktu.

4. *Mengabdi dengan Memberi Kado Testimoni untuk Prof. Dr. H.M. Imron Abdullah.* Motor dari penyusunan buku ini adalah Prof. Dr. H. Adang Djumhur yang tidak hanya menginisiasinya, namun juga berperan sebagai dieditor dalam buku tersebut. Di dalamnya terdapat sejumlah tulisan yang memuat pelbagai macam testimoni dan kesaksian kawan-kawan dekat almarhum Prof. Dr. H.M. Imron Abdullah dalam rangka mengenang perjalanan hidup dan jasa beliau dalam ranah kemanusiaan dan pendidikan. Karena pengabdianannya yang sangat lama di IAIN, buku ini juga mencatat sejumlah informasi tentang proses dan dinamika yang terjadi saat STAIN Cirebon bertransformasi menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2009.
5. *Mengarungi Jejak Visionary Leadership: Sang Professor Santri.* Karya yang dieditori oleh Ilman Nafi'a & Septi Gumindari ini merupakan buku yang bercerita tentang kesan dan pesan sejumlah rekan terhadap sosok Prof. Dr. H. Maksud Muchtar, M.A. Terdapat banyak tulisan yang berhasil dihimpun di dalam buku yang diterbitkan oleh CV. Confident Cirebon pada tahun 2020 tersebut. Beberapa di antaranya menceritakan proses perjalanan karir beliau selama mengabdikan diri di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sejak tahun 1980-an hingga beliau wafat di akhir tahun 2019. Di dalamnya, terdapat pula kisah tentang pelbagai dinamika yang terjadi di internal kampus yang tentu saja menjadi menarik karena merupakan data penting yang berasal dari kesaksian-
"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

kesaksian langsung. Umumnya, sumber data seperti ini dapat dianggap sebagai sumber primer.

6. *"Pedoman Akademik IAIN Syekh Nurjati"*. Buku yang berisi panduan untuk mahasiswa baru untuk kegiatan akademisnya di kampus ini, diterbitkan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan merupakan karya yang ditulis secara komunal oleh para dosen lintas fakultas dan jurusan. Keragaman itu menjadi ciri khas buku tersebut karena ditujukan untuk keseluruhan mahasiswa yang terdiri dari jurusan dan fakultas yang berbeda-beda. Buku ini memuat sebagian ketentuan dan informasi mengenai aktivitas mahasiswa di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik, seperti proses belajar-mengajar, dan penyelesaian studi dengan tepat waktu. Pada bagian tertentu dalam buku itu, terdapat uraian singkat tentang sejarah pendirian IAIN Cirebon yang cukup baik untuk ditelaah dan ditelusuri.
7. *"Kenang-Kenangan 20 Tahun (1968-1988) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung"*. Kisah mengenai perjalanan sejarah dan eksistensi IAIN Sunan Gunung Jati dalam dunia pendidikan selama 20 tahun merupakan isi utama dari buku ini. Terceritakan cukup panjang tentang bagaimana universitas Islam di ibukota Jawa Barat itu berkembang bersama masyarakat Jawa Barat untuk dapat menempatkan dirinya sebagai perguruan tinggi yang maju dan dapat bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya. Dalam beberapa halaman pembukanya, buku ini turut menuturkan sejarah pendirian IAIN dalam ruang lingkup yang lebih besar atau secara nasional, yang mana di dalamnya disebutkan pula perkembangan IAIN yang ada di wilayah Cirebon.
8. *"Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Refleksi Perubahan IAIN/ STAIN Menjadi UIN"*. Karya dari Rektor UIN Malang yang telah demisioner, Imam Suprayoga, dan Rasmianto ini merupakan buku yang memiliki substansi transformasi pendidikan tinggi Islam untuk *"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"*

menjawab tantangan kemajuan zaman. Di dalamnya dijelaskan mengenai perlunya perubahan konsep dan gerakan, jika Perguruan Tinggi Islam menginginkan perubahan yang progresif. Buku ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual sang mantan rector dalam memimpin UIN Malang. Selain itu, terdapat juga potret sejarah pendirian IAIN dari awal hingga perubahan menuju IAIN Syekh Nurjati.

Kerangka teori penelitian ini berkisar tentang sejarah kelembagaan dan organisasi yang masih belum banyak diperbincangkan oleh para ahli. Meski demikian, sejumlah pemikiran konseptual terkait tema kajian turut mempermudah studi ini untuk dilaksanakan. Bagaimanapun, seiring berkembangnya sejarah dan pemikiran tentang struktur atau organisasi dan kekuasaan telah berkembang dengan pesat. Ragam struktur dan fungsi organisasi serta bagian-bagian institusinya telah berkembang dalam banyak varian dan bentuk. Gejala serta perkembangan itu adalah hal faktual yang tidak dapat dielakkan. Sebab, tuntutan kondisi dan kebutuhan yang nyata perihal tersebut, dengan segala faktornya mulai dari faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi, di tengah pasang surut gelombang pengaruh hal-hal asing melalui proses globalisasi versus hal-hal tradisional yang berupa nilai-nilai lokal, yang kondisinya semakin rumit atau kompleks dewasa ini, merupakan hal yang mesti dihadapi.

Sebenarnya, seluruh ragam keunikan, bentuk, dan struktur organisasi, merupakan cerminan dari respons lembaga dan para pejabat di dalamnya yang berperan sebagai pengambil keputusan (*decision makers*) atas pengaturan pelbagai kepentingan yang muncul dalam penyelenggaraan lembaga yang tersebut. Dengan segala kepentingan yang berkembang dengan begitu dinamis tersebut, maka rupa organisasi kelebagaannya juga turut mengalami perkembangan dengan dinamika khasnya tersendiri. Perubahan yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sejak kemunculan awalnya dari pesantren dan

"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

kemajuannya hingga saat ini menjadi sebuah perguruan tinggi yang akan menyandang nomenklatur “universitas”, mengalami proses yang sama. Sebab, lembaga pendidikan ini berkembang sesuai tuntutan zaman. Baik lembaga ataupun tokoh pejabat di belakangnya, menjalankan roda organisasi universitas atau kampus secara terukur dengan landasan rencana dan tujuan yang sebelumnya telah dirumuskan.

Dalam konteks ini, perubahan yang terjadi dalam setiap periode kelembagaan menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Sebab, peralihan pada fase-fase yang ada senantiasa meninggalkan pelbagai bukti sejarah kelembagaan yang dapat memperkuat hipotesa tentang bagaimana berlangsungnya perjalanan lembaga tersebut. Dengan pertimbangan ini, penulisan sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai suatu lembaga, mesti dibarengi dengan bukti-bukti tertulis yang konkret dan tidak hanya berlandaskan pada sejarah lisan atau kesaksian beberapa tokoh semata. Sebab, sumber tulisan bersifat baku dan sulit untuk berubah, kecuali pembuatnya memiliki kepentingan terhadap persoalan tersebut. Sementara sumber lisan, cenderung lebih dinamis sehingga terkadang tidak *ajeg* (kokoh) dan bahkan mengalami perubahan yang sangat jauh dari cerita sebenarnya apabila terdapat hambatan-hambatan tertentu kepada pelaku sejarah yang menjadi sumbernya. Dengan demikian, koraborasi seluruh data yang berhasil dihimpun merupakan teknik yang mesti dilakukan dalam studi ini.

Apabila ciri penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Zaenal Masduqi, dkk. adalah khazanah wawasan yang disarikan dari kegiatan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, maka kajian ini tidak hanya akan mengandalkan data lisan yang didapatkan dari pelaku sejarah semata, namun juga akan mengelaborasi sumber-sumber lain seperti sumber tertulis yang berupa dokumen-dokumen penting kelembagaan, dan arkeologis yang dicirikan dengan artefak atau material yang berkaitan dengan perjalanan sejarah IAIN Syekh *"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"*

Nurjati Cirebon. Data-data yang didapatkan dalam proses heuristik dengan ragam sifatnya itu, kemudian akan dikategorikan sesuai dengan jenisnya dan lalu dikomparasikan agar melihat mana yang saling terkonfirmasi atau tidak. Jadi dengan seluruh proses tersebut, dapat diungkapkan bahwa pendekatan multidimensional merupakan ciri yang diandalkan oleh penelitian ini. Melalui metode yang lebih holistik, diharapkan sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat dituliskan lebih komprehensif tanpa adanya tendensi atau suatu kepentingan subjektif apapun.

E. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun tema dalam penelitian ini adalah permasalahan transformasi kelembagaan, yang merekam perjalanan sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari awal perkembangannya hingga saat ini. Sekalipun fokus utama yang ada dalam studi ini adalah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, namun dalam pelaksanaan dan penulisannya peneliti juga akan mengulas sejumlah perguruan tinggi Islam lainnya di Indonesia yang memiliki keterkaitan historis dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, seperti Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dua nama perguruan tinggi Islam yang terakhir merupakan dua lembaga tinggi Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon karena sebelum berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga yang otonom, perguruan tinggi Islam di Cirebon itu pernah menjadi cabang dari kedua perguruan tinggi Islam negeri tersebut dengan ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, IAIN Syekh Nurjati Cirebon terikat relasi historis karena pada mulanya kalangan muslim terpelajar banyak berasal dari lembaga pendidikan tinggi Islam pertama Indonesia tersebut.

Secara spasial, penelitian ini dibatasi pada lingkungan wilayah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang secara kelembagaan merupakan

"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia. Pada awal mulanya, tanah yang dimiliki lembaga pendidikan tinggi ini hanya beberapa ribu meter persegi saja. Baru dalam beberapa tahun kemudian, beberapa bidang tanah berhasil didapatkan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Secara kewilayahan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki luas 139.139 M2 yang tersebar di tiga kota/kabupaten, antara lain: a) Kota Cirebon seluas 49.133 M2; b) Kabupaten Cirebon seluas 40.190 M2; dan c) Kabupaten Indramayu seluas 49.816 M2. Perkembangan wilayah IAIN Syekh Nurjati Cirebon hingga seluas itu, tidak didapatkan dalam waktu yang sebentar atau secara langsung, namun didapatkan melalui proses yang panjang karena dibeli secara bertahap.

Secara temporal, periode yang dikaji dalam penelitian ini adalah tahun 1965 hingga tahun 2021. Adapun tahun 1965, adalah waktu dimana IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk pertama kalinya dinegerikan oleh pemerintah. Momentum bersejarah itu tepatnya terjadi pada 12 Agustus 1965, dimana Fakultas Agama Unvierstias Islam Syarif Hidayatullah (UNISHA) yang berstatus swasta akhirnya beralih statusnya menjadi Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah cabang Cirebon (*Fakultas Tarbijah Al-Djami'ah Sjarief Hidajatullah tjabang Tjirebon*) yang berstatus sebagai perguruan tinggi Islam milik pemerintah/negeri. Adapun batas waktu yang ditelaah dalam studi ini adalah tahun 2021, yang mana pada saat itu IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan bertransformasi menjadi universitas. Secara kelembagaan, berubahnya lembaga pendidikan dengan status “institut” menjadi “universitas” merupakan perubahan perguruan tinggi Islam menjadi lembaga yang memiliki ruang lingkup lebih luas, tidak hanya pada cakupan bidang keilmuan namun juga hingga ke ranah unit kelembagaan yang umumnya menjadi lebih kompleks.

F. Metode dan Teknik Penelitian

Mempertimbangkan fokus studi, rumusan masalah serta tujuan yang sebelumnya telah disampaikan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dengan sejarah sebagai pendekatannya. Metode yang cocok karakternya dengan kajian ini adalah metode sejarah. Berkaitan dengan hal itu, terdapat sejumlah langkah atau tahapan yang mesti dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah, yang disebut sebagai metode sejarah. Adapun rangkaian tahapan dalam metode sejarah, terbagi ke dalam empat tahapan, yang di antaranya adalah: heuristik atau pengumpulan data, kritik sumber atau verifikasi baik itu secara internal ataupun eksternal data, interpretasi atau penafsiran/analisis sejarah, dan historiografi atau penulisan sejarah.

1. Heuristik

Heuristik adalah langkah pertama dalam penelitian yang inti kegiatannya adalah kegiatan penghimpunan data.²¹ Dalam proses ini, dilakukan kegiatan pencarian dan penemuan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Keberhasilan dalam langkah atau tahapan ini, akan sangat ditentukan oleh pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pelbagai macam sumber yang dibutuhkan. Selain itu, keterampilan teknis yang dikuasai oleh peneliti dalam kegiatan penelusuran sumber turut pula menjadi hal yang menentukan dalam kegiatan ini. Sumber-sumber sejarah yang akan digunakan adalah dokumen-dokumen terutama dokumen formal yang berkaitan dengan momen-momen penting dalam sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di samping itu, sumber-sumber lisan seperti kesaksian dan juga keterangan dari pelaku sejarah akan diusahakan dalam kegiatan ini. Tidak lupa, data atas pelbagai benda peninggalan termasuk bangunan,

²¹ Anwar Sanusi, AS (2013) *Pengantar Ilmu Ilmu Sejarah*. Syekh Nurjati Press, Cirebon. ISBN 978-602-98231-3-4, hlm. 137... baca juga Basri MS. *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori dan Praktik)*. (Jakarta : Restu Agung. Committee on Historiography : 2006), hlm. 154.

prasasti dan sarana serta prasarana lembaga, juga akan ditelusuri.

2. Kritik Sumber

Secara umum, terdapat dua macam sumber dalam penelitian sejarah, yang dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.²² Dalam hal ini, sumber primer merupakan sumber yang berasal dari sumber pertama atau langsung berasal dari pelaku, saksi mata atau orang yang hidup semasa terjadinya peristiwa bersejarah tersebut. Sedangkan untuk sumber sekunder adalah sumber sejarah kedua yang asalnya bukan dari pelaku pertama peristiwa atau pelaku langsung, dan bisa jadi dibuat didasarkan pada sumber primer. Sumber ini biasanya dibuat oleh orang yang hidup jauh dari peristiwanya atau dari waktu terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Dari sisi karakter isinya, sumber sekunder terkadang mencakup generalisasi, analisa, sintesa, penafsiran atau evaluasi atas informasi yang asli.²³

Selanjutnya, dalam tahapan kritik sumber yang merupakan langkah kedua dalam metode sejarah, kegiatan utamanya adalah penyeleksian data. Dengan kata lain, terkait hasil pengumpulan data atau sumber-sumber tadi, peneliti tidak akan menelannya bulat-bulat, melainkan akan terlebih dahulu menilai atau mengkritiknya dengan dua metode yang saling berkaitan, yaitu kritik intern dan ekstern. Hal ini dilakukan untuk menilai secara adil tentang otentisitas dan kredibilitas data atau sumber-sumber tersebut karena sebenarnya tujuan yang paling utama dari kritik sumber adalah untuk pemilahan atau seleksi data, sehingga dari proses ini diperoleh fakta sejarah yang valid. Pada tahap ini,

²² Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta : Kencana.Burhan Bungin : 2008), hlm 106. Baca juga Dudung Abdurrahman. *Metode Penilitaian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu : 1999)., hlm. 241. Serta Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto. (Jakarta : Universitas Indonesia Press. : 1986)., hlm. 115.

²³ Anwar Sanusi, AS Loc. Cit. *Pengantar Ilmu Ilmu Sejarah*. Syekh Nurjati Press, hlm. 137

peneliti berusaha untuk mencari nilai-nilai yang lebih bjektif dari keseluruhan data yang berhasil didapatkan. Melalui sistem kartu, setiap data yang ada kemudian dicatat dalam lembaran lepas, hal itu dilakukan agar peneliti dapat lebih mudah melakukan klasifikasi dengan dasar atau landasan kerangka tulisan.²⁴

3. Interpretasi

Langkah selanjutnya dari metode sejarah adalah interpretasi (proses penafsiran atau penerangan).²⁵ Tahapan ketiga ini, kegiatan utamanya adalah melakukan penafsiran terhadap fakta sejarah hasil dari dua tahap sebelumnya. Fakta-fakta yang diperoleh dari kritik terhadap data atau sumber sejarah yang dikumpulkan, baik hasil penelusuran dokumen, sumber lisan dan atau wawancara, tetap mesti ditafsirkan atau dimaknai secara objektif oleh peneliti, agar himpunan fakta itu memiliki kesesuaian dengan konteks fokus studi yang dilakukan. Dalam tahap interpretasi, dilakukan upaya untuk saling menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya. Hal itu dilakukan agar terlihat atau tampak bagaimana gambaran utuh dari peristiwa yang hendak direkonstruksi oleh peneliti.

Objektivitas dan kejujuran merupakan landasan penting dalam proses penafsiran fakta. Karena dengan karakter ini, rekonstruksi atas suatu peristiwa sejarah akan menghasilkan narasi sejarah yang benar atau setidaknya mendekati kebenaran tanpa adanya kepentingan tertentu. Pada tahapan ini, dilakukan pula penyelidikan atau analisis dengan menggunakan acuan atau kerangka teori tertentu yang disesuaikan dengan tujuan yang dirumuskan dalam penyusunan proposal penelitian. Langkah ini dimaksudkan untuk melakukan pemberian arti terhadap hal atau aspek yang diteliti, mengaitkan antara satu fakta dengan fakta

²⁴ Ibid., hlm. 137

²⁵ Ibid., hlm. 137. Baca juga Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 595.

lainnya, sehingga dapat ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang lebih utuh dengan landasan metodologi ilmiah dan akademis.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dari pelbagai tahapan yang dilakukan dalam penelitian sejarah. Inti pada langkah terakhir ini adalah kegiatan penulisan narasi atau kisah dengan merangkaikan pelbagai macam fakta dengan maknanya yang disusun secara kronologis/diakronis dengan struktur yang sistematis.²⁶ Tujuan dari penulisan yang teratur itu adalah melahirkan suatu karya sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dalam kegiatan ini nantinya akan berbentuk sebagai sebuah laporan hasil penelitian. Penulisan laporan hasil penelitian pada tahap ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sebelumnya telah diungkapkan dalam rumusan masalah.²⁷

Di samping tahap-tahap sebelumnya yang dilakukan secara berkesinambungan, tahap historiografi (atau penyusunan laporan hasil penelitian) ini diharapkan akan mampu merekonstruksi jalannya peristiwa secara menyeluruh tanpa menghadirkan tendensi pada satu titik pembahasan subjektif tertentu. Adapun bentuk pelaporan ini akan diuraikan dalam bentuk deskriptif naratif dan deskriptif analisis. Yang pertama akan difokuskan pada penguraian peristiwa sejarah dengan memperhatikan urutan kronologis peristiwa, sehingga nampak sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan yang kedua momfokuskan pada penjabaran sebab akibat terjadinya suatu peristiwa dengan bertumpu pada pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”.²⁸

²⁶ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak ; 2007), hlm. 156.

²⁷ Dudung Abdurahaman *Metodologi penelitian sejarah*. (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 2007), hlm. 76.

²⁸ Ismaun, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan* (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI ; 2005), hlm. 28-29.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini, hal yang pertama kali diuraikan adalah latar belakang penelitian yang menjelaskan mengenai kesenjangan antara hal yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dilanjutkan dengan memformulasikan rumusan masalah guna membatasi permasalahan agar tidak melebar kemana-mana. Pendekatan Naratif selanjutnya diuraikan sebagai pendekatan yang digunakan penulis dalam kajian ini. Setelah itu, penulis menguraikan mengenai penelitian dan karya-karya terdahulu sebagai acuan untuk menentukan langkah kajian yang akan dilakukan. Ruang lingkup dan tujuan turut pula dinarasikan sebagai pembatas agar studi yang dilakukan tidak meluas dan menjadi tidak fokus. Adapun metode dan teknik penelitian yang dalam hal ini adalah metode sejarah, dijabarkan sebagai bagian dari cara yang digunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan yang diangkat. Bab pertama ini diakhiri dengan menguraikan sistematika penulisan.

Bab II: Latar Belakang Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Bab kedua ini dimulai dengan menguraikan perihal kehadiran dan perkembangan Islam di Indonesia, guna menjelaskan bagaimana proses Islamisasi terjadi di Kepulauan Nusantara, khususnya Jawa dan Cirebon. Selain itu, diuraikan pula sejarah pendidikan Islam Indonesia sebagai landasan paling awal pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pada bagian akhir bab ini, dijabarkan pula pelbagai dinamika yang memengaruhi perjalanan sejarah lembaga pendidikan tinggi Islam yang ada di Indonesia

Bab III: Periode Perintisan dan Peletakan Landasan, 1962-1965. Pada bab ini, dijelaskan mengenai kondisi Cirebon pasca Proklamasi di zaman kepemimpinan Presiden Soekarno. Perkembangan situasi pemikiran sosial kemasyarakatan pada masa itu turut pula dijelaskan. Setelah itu, dinarasikan kondisi kaum terpelajar muslim yang ada di Cirebon dengan menjabarkan anatomi sejarah perkembangan para

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

pelajar dari kalangan Islam tersebut, dan mengurai pelbagai kelompok muslim yang berpengaruh di Cirebon pada masa itu. Lalu penulis mendeskripsikan pendirian sejumlah lembaga yang diinisiasi kaum cendekiawan muslim Cirebon, yang di antaranya adalah grup kajian *Islamic Study Club* (ISC) dan Universitas Syarif Hidayatullah (UNISHA) yang berada di bawah naungan Yayasan Syarif Hidayatullah. Pada masa itu, lembaga-lembaga ini masih bersifat swasta karena belum dinegerikan.

Bab IV: Periode Penyesuaian Akademik dan Manajemen, 1965-1997. Bab keempat ini bermaksud menguraikan bagaimana perguruan tinggi Islam negeri di Cirebon harus menyesuaikan diri, baik secara akademik ataupun manajemen, dengan keinginan pemerintah. Hal itu membuat IAIN Syekh Nurjati Cirebon sempat beberapa kali memiliki induk, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oleh sebab itu, hal pertama yang dijelaskan pada bab ini adalah perkembangan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon. Periode ini terjadi selama 11 tahun, sejak 1965-1976, dan pernah dipimpin oleh 3 dekan yang berbeda. Setelah itu, diuraikan pula perkembangan perguruan tinggi ini saat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati Cabang Cirebon di tahun 1976 hingga 1997. Pada kurun waktu tersebut, terdapat 5 dekan yang pernah memimpin lembaga.

Bab V: Periode Pemantapan Kelembagaan, 1997-2009. Metamorfosa lembaga yang semula sebagai Fakultas Tarbiyah Cabang menjadi STAIN Cirebon yang otonom akan diuraikan pada bab ini. Pembahasan sejarah dimulai dengan tonggak historis berupa peralihan status dari kampus cabang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon yang pengelolaannya bersifat otonom. Hingga beralih status pada tahun 2009, lembaga ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan terus berbenah secara

kelembagaan. Pada era baru ini, STAIN Cirebon pernah dipimpin oleh dua pimpinan yang berbeda.

Bab VI: Periode Transformasi, 2009-2021. Pada bab keenam ini, dijelaskan bagaimana IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus berkembang dan bersiap untuk bertransformasi menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang lebih maju dan siap bersaing secara global. Perubahan yang didorong tidak hanya dari segi kuantitas mahasiswa ataupun dosen, namun juga dari segi kualitasnya. Hal itu membuat kurun waktu ini menjadi era transformatif, dimana IAIN Syekh Nurjati terus bekerja untuk menyongsong perubahan. Transformasi yang terjadi pada periode ini, digerakkan oleh dua pimpinan bergelar rektor yang berbeda.

Bab VII: Penutup. Bab ini adalah bab terakhir yang merangkum keseluruhan bagian sebelumnya. Tidak hanya itu, dijelaskan pula saran dan masukan yang dapat mengembangkan studi ini lebih lanjut, agar dapat menghasilkan karya yang lebih sempurna dan studi yang lebih komprehensif tentang sejarah dan perkembangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB II

LATAR BELAKANG SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Kehadiran dan Perkembangan Islam di Indonesia

Islamisasi yang terjadi di Kepulauan Nusantara, tidak terjadi dalam waktu yang sama. Setiap daerah mendapat sentuhan Islam dan para pemeluknya dalam kurun waktu yang berlainan satu sama lain. Kenyataan itu membuat para peneliti sulit untuk menetapkan secara pasti kapan untuk pertama kalinya Islam masuk ke wilayah Nusantara dan berkembang disana. Tidak hanya soal waktu, kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat serta daerah-daerah yang didatangi oleh orang-orang Islam, juga memiliki perbedaan. Berkaitan dengan hal itu, terdapat sejumlah pendapat yang bersilang satu sama lain mengenai sumber, proses atau bagaimana masuknya Islam ke wilayah Nusantara. Hal itu dapat terjadi karena masing-masing peneliti atau tokoh tersebut memiliki data historis, pertimbangan analisis, dan landasan berpikir yang berbeda satu sama lain.

Terkait persoalan waktu, hingga saat ini belum ditemukan adanya bukti tertulis yang menyebutkan secara pasti perihal tersebut. Namun meskipun demikian, telah banyak teori yang membincangkannya sehingga kita dapat menerka-nerka sebetulnya kapan Islam itu masuk ke wilayah negeri kita. Secara umum, pelbagai teori yang bermunculan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan jalur niaga di masa lalu yang menghubungkan antara wilayah Kepulauan Nusantara dengan negeri-negeri asing yang lebih dahulu mendapat sentuhan Islam. Sehubungan dengan hal ini, terdapat dua pendapat yang berkembang. *Pertama*, Islam dinyatakan masuk ke Nusantara pada abad ke-13 M. Teori ini disampaikan oleh tokoh-tokoh akademis lama berkebangsaan Belanda seperti N.J. Krom dan van Den Berg. *Kedua*, Islam diyakini telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 atau ke-8 M. Teori ini pernah diungkapkan oleh para sarjana bumiputera seperti H. Agus Salim, M. Zainal Arifin Abbas, Buya Hamka, dan

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

Djunaid Parinduri.²⁹ Kedua pendapat yang saling berseberangan tersebut, memberikan gambaran bahwa persoalan waktu terkait masuknya Islam ke Kepulauan Nusantara merupakan suatu hal yang belum tuntas dan karenanya masih perlu untuk dipelajari atau dikaji lebih lanjut dengan pelbagai bidang ilmu dan teknologi yang kini telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pesat.

Terkait sumber atau tempat dari mana Islam datang ke Nusantara, terdapat beberapa pendapat. *Pertama*, Arab. Teori ini melandaskan pemikirannya kepada bukti-bukti yang para pendukung teori ini miliki. Salah satunya adalah catatan Marco Polo, yang merupakan catatan paling awal tentang penjelajahan orang Eropa ke Nusantara. Marco Polo menyatakan dalam laporannya bahwa di Kerajaan Perlak pada Abad ke-13, Islam telah berkembang di tengah masyarakat dan dibawa oleh para pedagang “*Saracene*”³⁰ ke daerah itu sehingga dapat menjadi agama kerajaan.³¹ Bahkan lebih jauh dari itu, sejumlah sumber lain turut pula menguatkan pendapat ini dengan memaparkan bahwa sejak zaman Sriwijaya (sekitar Abad ke-7 M) telah ada hubungan niaga antara pedagang Nusantara dan pedagang Arab. Kerajaan di Sumatera itu bahkan dikenal dalam tradisi tertulis Arab dengan nama *Zabaq*, *Zabag*, atau *Sribuza*.³² *Kedua*, India. Teori ini memiliki dasar bahwa penyebar Islam ke Nusantara adalah para saudagar yang berasal dari daerah Gujarat India. Di samping keperluan niaga, mereka juga turut aktif menyebarkan Islam ke tengah penduduk Nusantara. *Ketiga*, Persia. Teori yang dikemukakan oleh P.A. Hoesein Djajadiningrat melandaskan pendapatnya pada

²⁹ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. (Jakarta : Rajawali ; 1986), hal. 253.

³⁰ Sejak Abad ke-12, istilah “*Saracen*” (*Saracene*) dalam tradisi sastra Latin telah menjadi sinonim untuk kata “Arab Muslim” atau kalangan pemeluk agama Islam dari Suku Arab.

³¹ Djajadiningrat, P.A. Hoesein. *Islam in Indonesia*”, dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam — The Straight Path: Islam Interpreted by Muslims*, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987), hal. 375.

³² *Zabaq* pernah dicatat oleh Ibn Hordadzhbeh pada tahun 846. Sementara *Zabag* disebutkan oleh Masudi pada tahun 943. Dan untuk penyebutan Sriwijaya dengan nama *Sribuza* pernah tertulis dalam karangan Abu Zayd Hasan pada tahun 916. Lihat lebih lanjut, Tideman, 1936: 36-38.

kenyataan bahwa sejumlah tradisi yang ada di Nusantara dan Persia memiliki kesamaan yang secara tidak langsung mengisyaratkan adanya hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Fachry Ali dan Bachtiar Effendy menguraikan setidaknya-tidaknya terdapat tiga faktor utama yang ikut mempercepat proses penyebaran Islam di Indonesia, yaitu:

1. Karena ajaran Islam melaksanakan prinsip ketauhidan dalam sistem ketuhanannya, suatu prinsip yang secara tegas menekankan ajaran untuk mempercayai Tuhan Yang Maha Tunggal. Sebagai konsekuensinya, Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan persamaan dalam tata hubungan kemasyarakatan.
2. Karena daya lentur (fleksibilitas) ajaran Islam, dalam pengertian bahwa ia merupakan kodifikasi nilai-nilai yang universal.
3. Pada gilirannya nantinya, Islam oleh masyarakat dianggap sebagai suatu institusi yang amat dominan untuk menghadapi dan melawan ekspansi pengaruh Barat yang melalui kekuasaan-kekuasaan bangsa Portugis kemudian Belanda, mengobarkan penjajah dan menyebarkan agama Kristen.³³

Mahmud Yunus lebih merinci tentang faktor-faktor mengapa agama Islam dapat tersebar dengan cepat di seluruh Indonesia pada msa permulaan, yaitu:

1. Agama islam tidak sempit dan tidak berat melakukan aturan-aturannya, bahkan mudah diturut oleh segala golongan umat manusia, bahkan untuk masuk Islam cukup dengan mengucapkan *dua kalimah syahadat* saja.
2. Sedikit tugas dan kewajiban Islam.
3. Penyiaran Islam itu dilakukan dengan cara berangsurangsur sedikit demi sedikit.

³³ Hasbullah Mursyid, dkk., *Amal Bakti Departemen Agama RI: 3 Januari 1946 – 3 Januari 1996 (50 Tahun Departemen Agama) Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Edisi ke-II, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996), hal. 18-19.

4. Penyiaran Islam dilakukan dengan cara kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya.
5. Penyiaran Islam itu dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami umum, dapat dimengerti oleh golongan bawah sampai ke golongan atas, yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang maksudnya : Berbicaralah kamu dengan manusia menurut kadar akal mereka.³⁴

Pendapat di atas, menggambarkan bahwa Islam masuk ke Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, terutama dari segi ajaran Islam itu sendiri, di samping cara menyampaikan Islam itu sendiri kepada masyarakat. Hal ini kemudian menyebabkan Islam tersebar ke seluruh penjuru Nusantara dan menjadi agama yang banyak dianut oleh masyarakat di Nusantara.

B. Sejarah Pendidikan Islam Indonesia

Sejarah perkembangan Islam di Indonesia memberi gambaran kepada kita bahwa pertama antara pengembangan agama Islam dan berbagai jenis kebudayaan dan masyarakat di Indonesia, menunjukkan adanya semacam akomodasi kultural. Di samping melalui perbenturan dalam dunia dasang, sejarah jga menunjukkan bahwa penyebaran Islam kadang-kadang terjadi pula dalam suatu relasi intelektual, ketika ilmu-ilmu dipertentangkan atau dipertemukan, ataupun ketika kepercayaan pada dunia lama mulai menurun. Oleh karena itu, kedatangan kaum kolonial Belanda berhasil menancapkan kekunya di bumi Nusantara dengan misi gandanya, (*imperialisme* dan Kristenisasi) sangat merusak dan menjungkirbalikan tatanan yang sudah ada.³⁵

Memang diakui bahwa Belanda cukup banyak mewarnai perjalanan sejarah (Islam) di Indonesia. Cukup banyak peristiwa dan pengalaman yang dicatat Belanda sejak awal kedatangannya di

³⁴ Ibid., 19-20.

³⁵ Enung K. Rukiati, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Kota Surakarta (Solo) ; [Pustaka Setia](#) ; 2006), hal. 55.

Indonesia, baik sebagai pedagang perseorangan, ataupun ketika diorganisasikan dalam bentuk kongsi dagang yang bernama VOC, atau juga sebagai aparat pemerintah yang berkuasa dan menjajah. Oleh sebab itu, wajar bila kehadiran mereka selalu mendapat tantangan dan perlawanan dari penduduk pribumi, raja-raja dan tokoh-tokoh agama setempat. Mereka menyadari bahwa untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, mereka harus berusaha memahami dan mengerti seluk beluk penduduk pribumi yang dikuasainya. Mereka pun tahu bahwa penduduk yang dijajahnya mayoritas beragama Islam.³⁶

Pada mulanya kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Sambil berdagang, Belanda berupaya menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Lambat laun Belanda berhasil memperkuat penetrasinya di Nusantara. Belanda tidak hanya memonopoli perdagangan dengan bangsa Indonesia, namun satu demi satu Belanda berhasil menundukkan penguasa-penguasa lokal, kemudian merampas daerah-daerah tersebut ke dalam kekuasaannya, selanjutnya berlangsunglah sistem penjajahan.³⁷

Kedatangan bangsa Barat di satu pihak membawa dampak pada kemajuan teknologi, kendati kemajuan tersebut tidak dinikmati penduduk pribumi. Tujuannya hanyalah meningkatkan hasil penjajahannya. Begitu pula halnya dengan pendidikan, mereka telah memperkenalkan sistem dan metodologi baru, dan tentu saja lebih efektif, namun semua itu dilakukan sekadar untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat membantu segala kepentingan penjajah dengan imbalan yang murah sekali dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Kenyataannya, Belanda

³⁶ Ibid., hal. 56.

³⁷ Hanum Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu. Asrohah, 19990, hal. 150.

sebagai negara penjajah benar-benar mengeksploitasi dan mengeruk keuntungan dari bumi Nusantara ini.³⁸

Selanjutnya perlu dicatat peranan penjajah Belanda yang memanfaatkan pertentangan antara kelompok sinkretis dan Wahabi, permusuhan-permusuhan antara kerajaab Hindu-Budha dengan kesultanan Islam atau umat Islam, bahaya Portugal dan Inggris yang berusaha untuk berkuasa di kepulauan nusantara, serta setelah dikembangkannya usaha pendidikan Belanda untuk Bumiputera terutama setelah kebijaksanaan yang disebut *Etische Politiek*. Dalam hal ini, Belanda tidak hanya berhasil memecahkan umat Islam, tetapi juga menyingkirkan lembaga pendidikan pesantren yang tidak mau menerima subsidi dari pemerintah Belanda ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan kemajuan pendidikan modern.³⁹

Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, yaitu ketika Jan Pieter Zoan Coen menduduki Jakarta.⁴⁰ Kehadiran Belanda di Jawa tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat Indonesia. Penetrasi Belanda menghancurkan elemen-elemen kehidupan perdagangan orang Jawa, kegiatan umat Islam dalam politik. Berikutnya, segala aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengamalan agama Islam. Upacara-upacara keagamaan yang dilakukan secara terbuka dilarang. Ibadah haji dibatasi dan setiap jama'ah haji yang pulang ke Indonesia diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi pengaruh orang Islam yang sudah haji, karena akan dapat

³⁸ Enung K. Rukiati, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, op. cit., hal. 56.

³⁹ Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi pendidikan Islam*. (Jakarta ; Gema Insani; 1995), hal. 197.

⁴⁰ Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 147.

membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintah Belanda.⁴¹

Politik yang dijalankan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya rasa ketakutan, rasa penggalian agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Dengan begitu, mereka menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan, di antaranya;

1. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Priesterraden*. Dari nasehat badan inilah, pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya menyatakan bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda.
2. Pada tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam, yaitu bahwa tidak semua orang (kia) boleh memberikan pelajaran mengaji, terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda.
3. Tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda yang disebut Ordonansi Sekolah Liar.⁴²

Menurut Zamakhsari Dhofier, seperti yang dikutip Hanum Asrohah, bahwa khawatir akan bahaya setiap kebencian dan permusuhan umat Islam, Belanda mulai memberikan sedikit kelonggaran terhadap umat Islam dengan mencabut resolusi-resolusi dan ordonansi yang membatasi pengalaman agama Islam. Diantaranya; mencabut ordonansi yang membatasi jumlah jama'ah haji, sehingga setelah dicabut jumlah jama'ah haji Indonesia semakin melonjak. Jama'ah haji Indonesia disamping menunaikan dan

⁴¹ Hanum Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Op. cit., hal. 151.

⁴² Enung K. Rukiati, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, op. cit., hal. 58.

menjalankan ibadah haji juga memperdalam pengetahuan agama, bahkan ada yang bertahun-tahun belajar agama di Mekkah. Setelah pulang haji, pengetahuan agama yang dipelajari di Tanah Suci sangat bermanfaat bagi pengajaran agama Islam, sehingga jumlah guru yang mengajarkan agama Islam semakin bertambah. Akhirnya, terjadilah pelonjakkan lembaga pendidikan Islam.

Berdasarkan laporan statistik resmi pemerintah tahun 1885 jumlah lembaga pendidikan Islam tradisional tercatat sebanyak 14.929 di seluruh Jawa dan Madura (kecuali Kesultanan Yogyakarta).⁴³ Masuknya kaum penjajah Barat (Belanda) ke Indonesia, memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Pendidikan Barat berada pada alur dan jalur binaan pemerintah dengan fasilitas yang memadai, sedangkan pendidikan Islam terlepas dari tanggung jawab pemerintah kolonial. Kenyataannya membuat ada dua generasi yang berbeda orientasinya. Pertama, pendidikan Islam yang ketika itu dilaksanakan di pesantren orientasinya keakhiratan dan kedua, pendidikan Barat yang berorientasi keduniaan.⁴⁴

Pemisahan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat dalam sejarah di Indonesia adalah suatu taktik Belanda untuk mengandu domba orang Indonesia. Jadi pemisahan pendidikan agama dan pendidikan umum diawali oleh kolonial Belanda, sehingga kemudian dalam sejarah pendidikan di Indonesia muncul pendidikan yang berpola ukhrawi saja dan berpola duniawi. Sebetulnya perbedaan yang mencolok bukan hanya terletak pada perbedaan orientasi, akan tetapi lebih dari itu pemerintah kolonial Belanda tidak menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari perhatian mereka. Tidak memasukkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan kolonial Belanda, bukan hanya itu, bahkan pendidikan agama pun tidak diberikan di sekolah-sekolah (Haidar Putra Daulay, 2007: 160). Pada

⁴³ Hanum Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Op. cit., hal. 152.

⁴⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 160.

zaman kolonial, pendidikan Islam –pesantren, sekolah dan madrasah- dikelola oleh badan atau organisasi keagamaan maupun oleh perorangan. Pemerintah kolonial Belanda tidak turut campur tangan dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, bahkan dirasakan oleh umat Islam pihak Belanda menghambat perkembangan pendidikan Islam dengan adanya ordonasi guru 1905 dan ordonasi guru 1925.⁴⁵

Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia ke II. Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, dengan membawa semboyan : *Asia Raya Timur untuk Asia* dan semboyan *Asia Baru*. Pada awal pertamanya pemerintah Jepang menampakkan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia ke II.

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang untuk mendekati umat Islam, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama yang pada zaman Belanda di sebut Kantoer Voor Islamistische Saken yang dipimpin oleh orang-orang orientalisten Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Kantor Sumubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri yaitu KH. Hasyim Asy'ary dari Jombang dan di daerahdaerah dibentuk Sumuka.
2. Pondok pesantren yang besar-besar sering mendapatkan kunjungan dan bantuan dari pembesarpembesar Jepang.
3. Sekolah negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
4. Pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hisbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam, yang dipimpin oleh KH. Zainul Arifin.
5. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta.

⁴⁵ Ibid., hal. 171.

6. Para ulama Islam bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin nasionalis diizinkan membentuk barisan Pembela Tanah Air (PETA). Dan
7. umat Islam diizinkan meneruskan organisasi persatuan yang disebut Majelis A'la Indonesia (MIA) yang bersifat kemasyarakatan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Jepang adalah supaya umat Islam dan nasionalis dapat dibina untuk kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang.⁴⁶

Perang Dunia ke II menghebat dan tekanan pihak sekutu kepada Jepang makin berat. Beberapa tahun menjelang berakhirnya perang itu tampak semakin jelas betapa beratnya Jepang menghadapi musuh dari luar dan oposisi serta dari rakyat Indonesia sendiri. Dari segi militer dan sosial politik di Indonesia, Jepang menampakkan diri sebagai penjajah yang sewenang-wenang dan lebih kasar daripada penjajah Belanda. Kekayaan bumi Indonesia dikumpulkan secara paksa untuk membiayai perang Asia Timur Raya, sehingga rakyat menderita kelaparan dan hampir telanjang, karena kekurangan pakaian. Disamping itu, rakyat dikerahkan kerja keras (romusha) untuk kepentingan perang. Jepang membentuk badan-badan pemerintah rakyat seperti *Haihoo*, Peta, Keibodan, Seinan dan lain sebagainya, sehingga penderitaan rakyat lahir dan batin makin tak tertahankan. Keadaan seperti ini menimbulkan pemberontakan-pemberontakan, baik dari golongan Peta di Blitar Jawa Timur maupun oposisi dari para alim ulama, serta di daerah-daerah lain, sehingga banyak para ulama dan Kyai yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang.⁴⁷

Dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena peserta didik di sekolah setiap hari hanya disuruh gerak jalan, baris berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan lain sebagainya. Yang masih agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam

⁴⁶ Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, Op. Cit., hal. 151-152.

⁴⁷ Ibid., hal. 152.

lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan dengan agak wajar.⁴⁸ Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Islam bergerak lebih bebas dari zaman penjajahan Belanda.⁴⁹ Pemerintah Jepang memberikan dorongan pesantren dan kehidupan beragama untuk berkembang. Hal ini dapat dipahami sebagai *counter move* dari kebijaksanaan pemerintah Belanda yang menekan golongan agama dan memanjakan golongan priyayi, meskipun dalam arti fisik perkembangan itu sangat dirasakan tidak berarti karena memang waktunya sangat singkat. Masyarakat hidup dalam suasana yang sangat miskin, meskipun secara strategis sangat menentukan perkembangan selanjutnya, yaitu setelah direbutnya kemerdekaan Indonesia. Tititik-titik strategis itu terlihat pada hal-hal berikut ini: (1) didirikannya Kantor Urusan Agama, (b) dibentuknya Hisbullah dan (c) didirikannya Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia).⁵⁰

Dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena serta dididik di sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti (*romusha*), bernyanyi dan lain sebagainya. Yang masih agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan dengan agak wajar.⁵¹

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa :” Madrasah dan pesantren yang

⁴⁸ Ibid., hal. 152.

⁴⁹ (Mahmud Yunus, 1960: 107)

⁵⁰ Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi pendidikan Islam*. Op. Cit., hal. 150.

⁵¹ Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, Op. Cit., hal. 152.

pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah beruap berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah”.⁵²

Meskipun Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah dari terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan, untuk itu dibentuk Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha, terutama mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru.⁵³ Di samping itu, sebagai realisasi dari Agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama, yang juga mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia, termasuk di sekolah umum dan mengurus sekolahsekolah agama, seperti madrasah dan pondok pesantren.⁵⁴

Kebijakan strategis yang dikeluarkan pada masa pendudukan Jepang memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa kemerdekaan. Hal ini dapat di lihat dari: *pertama*: diteruskannya Kantor Urusan Gama menjadi Kementrian Agama yang kemudian membidangi lahirnya Pendidikan Guru Agama (PGA), Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA), Akademi untuk Ilmu Agama (ADIA) yang kemudian berubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN), dan Institut Agama Islam Negeri – sekarang ada yang menjadi UIN dan STAIN—yang kemudian diikuti oleh kelompok swasta seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain mendirikan perguruan yang sama. Sementara itu Kementerian Pengajaran dan

⁵² Hasbullah Mursyid, dkk., *Amal Bakti Departemen Agama RI: 3 Januari 1946 – 3 Januari 1996 (50 Tahun Departemen Agama) Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Loc. Cit., hal. 70.

⁵³ Ibid., hal. 74.

⁵⁴ Hanum Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Op. cit., hal. 178.

Kebudayaan di bawah Menteri Suwandi mengambil beberapa keputusan penting yang secara kategoris memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan Islam dan yang kemudian mendorong lahirnya PTAIN dan IAIN, yaitu (a) hendaknya pendidikan agama diberikan di semua sekolah, (b) guru agama harus mempunyai pengetahuan umum, (c) harus ada pendidikan guru agama, dan (d) pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.

Kedua; Masyumi menjadi partai politik umat Islam. Penggalangan persatuan umat memberikan landasan sosiologis dan politis bagi perkembangan pendidikan Islam, atau paling tidak dalam rangka pengambilan keputusan oleh lembaga-lembaga tinggi negara, umpamanya keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang diwajibkannya agama untuk diajarkan di semua sekolah. Keadaan mungkin sangat berubah terutama sejak 1959 sampai dengan 1965, yaitu pada saat Soekarno melaksanakan demokrasi terpimpin yang berkaki tiga, yaitu Nasakom. Pada masa ini dasar dan tujuan pendidikan nasional pun direvisi, yaitu dari Pendidikan Nasional Pancasila menjadi pendidikan Nasional Pancacitra yang berorientasi kepada tertebentuknya masyarakat sosialis. Pendidikan agama di sekolah-sekolah menghilang, baru kemudian muncul lagi setelah lahirnya orde baru pada tahun 1966 dengan ditetapkan oleh MPRS bahwa pendidikan agama diwajibkan mulai dari Sekolah rakyat (SR) sampai dengan perguruan tinggi.⁵⁵

Setelah Indonesia merdeka pendidikan Islam yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Islam, baik pesantren, sekolah maupun madrasah diserahkan pengelolaannya kepada Departemen Agama atau berada di bawah naungan Departemen Agama. Secara bertahap Departemen Agama memberdayakan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut, di bawah asuhan Dirjen Pendidikan Islam. Ada tiga direktorat yang berada di bawah Direktorat Jendral Pendidikan

⁵⁵ Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi pendidikan Islam*. Op. Cit., hal. 150-151.

Islam Departemen Agama RI, yakni Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.⁵⁶

Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, adalah bertugas untuk membina perguruan-perguruan Islam yang mencakup pesantren dan madrasah, baik negeri maupun swasta, pembinaan ketenagaan, kurikulum, sarana dan lain-lain. Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, membina pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di sekolah-sekolah umum, pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pembinaan ketenagaan, kurikulum, sarana dan lain-lain. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, membina pendidikan Islam pada jenjang perguruan tinggi negeri dan swasta, IAIN, STAIN, UIN dan perguruan tinggi Islam swasta. Pembinaan yang meliputi ketenagaan, kurikulum, sarana, mahasiswa, perpustakaan, dan lainlain.⁵⁷

Tahap demi tahap, sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa Indonesia, pendidikan Islam semian terintegrasikan secara total dalam pendidikan nasional. Pentingnya agama Islam yang menjadi bagian integral dari pendidikan nasional akhirnya mendapatkan kekuatan hukum dalam rumusan Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional. Rumusan tersebut, akhirnya dikukuhkan dalam BHGN berdasarkan TAP MPR No.II/1983.⁵⁸ Sampai saat ini, umat Islam di Indonesia merasakan perkembangan pendidikan Islam sangat luar biasa, bahkan lembaga pendidikan Islam di Indonesia terbanyak di dunia di bandingkan dengan negara-negara yang mayoritas muslim. Walaupun dalam perjalanannya, pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari zaman kemerdekaan awal (orde lam), orde baru sampai pada masa reformasi.

⁵⁶ Haidar Putra Daulay, cit., hal. 172.

⁵⁷ Ibid., 172.

⁵⁸ Hanum Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam. Op. cit., hal. 179.

Undang-undang sistem pendidikan nasional yang ada saat ini, memberikan peluang pendidikan agama untuk mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum, karena pendidikan agama disejajarkan dengan sekolah-sekolah umum. Dari segi finansial, pendidikan Islam saat ini sudah mendapat perhatian yang cukup tinggi dari pemerintah, sehingga sudah sangat banyak lembaga pendidikan islam yang berkembang, baik pendidikan dasar, menengah sampai pada perguruan tingginya. Termasuk guru-guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik negeri maupun swasta diberikan kesempatan yang sama dengan sekolahsekolah umum untuk mendapatkan tunjangan profesi.

Dari segi pengembangan keilmuan, lembaga pendidikan Islam di Indonesia sudah mengembangkan sains dan teknologi, termasuk di perguruan tinggi. Berubahnya sebahagian IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), menandakan keinginan umat Islam untuk menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi, sehingga umat Islam Indonesia tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah umum, maupun perguruan tinggi umum. Perkembangan pendidikan Islam yang terjadi saat ini, dengan perkembangan yang cukup drastis ini tidak bisa kita lepaskan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri di Indonesia.

C. Dinamika Perjalanan Sejarah Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Pendirian perguruan tinggi yang dilandasi nilai-nilai Islam merupakan cita-cita yang didambakan oleh umat Islam. Para cendekiawan muslim menyadari bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam dapat menjadi wahana yang strategis untuk mengembangkan umat, baik secara religius sebagai media pengembangan wawasan keagamaan masyarakat, ataupun bidang-bidang keilmuan lainnya. Oleh sebab itu, sejak era Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, ide dan wacana mengenai perguruan tinggi Islam telah muncul ke permukaan dan dibicarakan oleh sejumlah sarjana dan ilmuwan muslim bumiputera. Beberapa tokoh dari kelompok cendekiawan itu,

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

bahkan mewujudkan secara konkret apa yang mereka cita-citakan dengan merintis pembangunan lembaga pendidikan tinggi tersebut.

Di Sumatera, keinginan membentuk perguruan tinggi Islam telah dirintis oleh para pelajar bumiputera yang pernah menuntut ilmu di Mesir dan Mekkah. Sekembalinya dari masa studi yang dilakukan, mereka membangun dunia pendidikan Islam di wilayahnya dengan mengadopsi kurikulum lembaga pendidikan tinggi seperti halnya yang mereka dapatkan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan dengan tujuan mulia untuk mengembangkan masyarakat Islam. Adapun sejumlah lembaga pendidikan di wilayah Sumatera yang dibangun pada masa kolonial, di antaranya adalah:

1. *Al-Jami'ah Islamiyah*, yang didirikan di daerah Sungayang, Batusangkar pada tanggal 20 Maret 1931 oleh Mahmud Yunus. Tokoh pendidikan ini merupakan seorang alumni dari Darul Ulum, Kairo, Mesir;
2. *Normal Islam (Kulliyah Mu'alimien Islamiyah)*, yang dirintis pembangunannya di daerah Padang pada tanggal 1 April 1931 oleh Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI). *Normal Islam* ini dipercayakan pula kepemimpinannya kepada Mahmud Yunus oleh para pendiri lembaga tersebut;
3. *Islamic College*, yang dibangun di daerah Padang pada tanggal 1 Mei 1931 oleh Mr. Abdul Hakim beserta kolega-koleganya. Pada tahun 1935, posisi beliau sebagai pemimpin lembaga itu digantikan oleh Mukhtar Yahya yang baru saja kembali belajar dari Mesir.⁵⁹

Di Jawa, terdapat nama dua kakak beradik Soekiman Wirjosandjojo dan Satiman Wirjosandjojo yang menggagas ide tentang lembaga pendidikan tinggi Islam dan mengungkapkan gagasan pembentukan Pesantren Luhur pada tahun 1939 di Surakarta dalam

⁵⁹ Umar Asasuddin Sokah, "Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya," dalam Mohammad Damami (ed.), *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1998), hal. 112.

forum Musyawarah Alim Ulama dan Intelektual Muslim.⁶⁰ Lembaga pendidikan itu yang kemudian dianggap oleh Saifuddin Zuhri telah menginspirasi adanya pendidikan tingkat tinggi agama Islam di Indonesia yang setingkat dengan universitas. Menurutnya, secara tidak langsung lembaga itu telah melahirkan Sekolah Tinggi Islam (STI), IAIN, dan pelbagai universitas Islam lainnya.⁶¹ Meski demikian, ide besar itu tampaknya tidak pernah benar-benar terlaksana secara konkret, karena dua alasan mendasar, yaitu:

1. Adanya ketentuan baku dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tentang Ordonansi Guru, yang di antaranya mewajibkan kepada siapapun yang akan melakukan kegiatan belajar dan mengajar di tengah masyarakat, untuk melaporkan diri dan mendapat izin dari dinas terkait milik Pemerintahan Kolonial;
2. Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren. Pada masa itu, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengidentifikasi para santri sebagai benih-benih penentang kekuasaan mereka, akibat adanya sejumlah peristiwa perlawanan santri di Nganjuk dan Sidoarjo, Jawa Timur.⁶²

Tidak hanya karena dua alasan tersebut, pecahnya Perang Dunia II turut memengaruhi keberlangsungan pelbagai lembaga pendidikan Islam, termasuk di antaranya lembaga pendidikan tinggi Islam, karena sejak tahun 1941 lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Nusantara diperintahkan untuk ditutup secara bertahap demi menjaga segala sesuatu yang tidak diinginkan agar tidak terjadi. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkuasa pada masa itu, sedang berada di ambang keruntuhannya akibat kampanye militer dan perang Jepang yang begitu dahsyat. Penyelenggaraan pendidikan

⁶⁰ Mastuki HS, *Kebangkitan Santri Cendekia: Jejak Historis, Basis Sosial, dan Persebarannya*, (Tangerang Selatan: Pustaka Compass, 2016), hal. 168.

⁶¹ Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Jajang Husni Hidayat (ed.), (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013), hal. 162.

⁶² Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, "Prof. K.H. R. Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam", dalam Mohammad Damami (ed.), *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1998), hal. 47.

di Kepulauan Nusantara yang terjadi, tidak dapat dikelola secara optimal karena adanya ancaman politik dan militer tersebut. Bahkan kemudian, karena tidak mampu menjamin keamanan penduduk dan daerah kekuasaannya, pemerintah kolonial Hindia Belanda memilih untuk menutup seluruh lembaga pendidikan yang ada. Sejalan dengan perkembangan itu, lembaga pendidikan tinggi Islam yang sempat dirintis pun tidak dapat berkembang dan malah ditinggalkan karena setiap pemuda pada masa itu diharuskan turut berpartisipasi secara aktif dalam perang.

Pada saat Jepang berhasil mengusir Belanda dan mendirikan pemerintahan militer di Nusantara, mereka menyadari bahwa kelompok Islam yang sangat besar jumlahnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perang mereka. Oleh karena itu, pelbagai organisasi dan kalangan kaum muslim yang hidup pada masa itu, didekati oleh orang-orang Jepang dan mereka berupaya menarik simpati masyarakat dengan merealisasikan pelbagai permintaan yang disampaikan oleh kaum muslim. Pada masa pendudukan Jepang, kalangan cendekiawan muslim yang tergabung dalam *Majelis Syuro Muslimin Indonesia* (Masyumi) kembali menghidupkan ide gagasan mengenai cita-cita pendidikan tinggi Islam dengan mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) untuk pertama kalinya. Pemerintah Pendudukan Jepang memberi sinyal positif terhadap gagasan kelompok Islam tersebut. Adapun pendiriannya diawali oleh keinginan para cendekiawan muslim pada awal 1945 untuk membangun perguruan tinggi Islam. Oleh sebab itu, Panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam segera dibentuk oleh Masyumi. Drs. Mohammad Hatta dipilih sebagai ketua tim, didampingi oleh Wakil Ketua Mr. Soewandi, dan Sekretaris Dr. Ahmad Ramali. Sebagai anggota dalam tim tersebut adalah: K.H. Mas Mansur, K.H. Abdul Wahid Hasjim, K.H. R. Fatchurrahman Kafrawi, K.H. Farid Ma'ruf, dan K.H. Abdul Kahar Mudzakkir. Sebetulnya, nama lembaga ini awalnya adalah Sekolah Islam Tinggi (SIT) namun dalam perkembangannya, dengan *"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"*

pertimbangan terminologis, dirubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Islam (STI). Penggantian itu diusulkan oleh Drs. Mohammad Hatta yang didukung oleh Prof. Hoessein Djajadiningrat.⁶³ Kurikulum yang kemudian dipakai untuk mengelola lembaga pendidikan tinggi itu adalah kurikulum Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir.⁶⁴

Pada akhirnya, lembaga pendidikan tinggi ini dibuka secara resmi di Gedung Masyumi di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945 yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1364 H. Pada saat itu, Jl. van Heutz Boulevard (yang sekarang adalah Jl. Teuku Umar) menjadi ramai karena adanya pelaksanaan acara tersebut. Di dalam peresmian itu, tidak sedikit tokoh yang hadir dan banyak di antaranya merupakan pejabat di era Pemerintahan Pendudukan Jepang, seperti: Rektor *Ika Daigaku* (Sekolah Tinggi Kedokteran), penasihat utama *Jawa Hokokai* Ir. Soekarno, dan K.H. Abdul Wahid Hasjim. Dalam pembukaannya itu, STI memiliki 63 mahasiswa dan 2 mahasiswi, serta kurang lebih 250 mahasiswa/i pendengar (*mustami*) yang berasal dari banyak daerah.⁶⁵ Di antara para pengajar paling awal perguruan tinggi Islam itu, adalah: Moh. Rasjidi, K.H. M. Iljas, Dr. Slamet Iman Santoso, Dr. R.M. Priono, Mr. Ali Boediardjo, Mr. Abdul Karim, Mr. Soemanang, Drs. Bachtiar, Mr. Soetan Takdir Alisjahbana, Mr. Dr. Soepomo, H. Agus Salim, Abdul Hamid Hakim, K.H. Mas Mansur, H. Moenawar Cholil, K.H. Abdul Wahab, Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, M. Zain Djambek, Sadeli Hasan, H. Moesaddad, dan H. Farid Ma'roef.⁶⁶

Enam pekan pasca pembentukan STI, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berhasil dilakukan oleh Soekarno dan Moh. Hatta di Jakarta. Bersama para *founding fathers* lainnya, kedua proklamator

⁶³ Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan*, Artawijaya (ed.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hal. 103

⁶⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 99.

⁶⁵ Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan*, Artawijaya (ed.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hal. 104-105.

⁶⁶ *Soeara Moeslimin Indonesia*, No. 12, Th. 3, 4 Rajab 1364/15 Juni 2605, hal. 14.

negeri segera melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan kolonialisme yang ketika itu masih gencar dilakukan oleh Kerajaan Belanda yang masih berupaya untuk menguasai Nusantara. Setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh pendiri dan pengelola STI terlibat secara langsung dalam proses perjuangan tersebut.⁶⁷ Tidak hanya para pengajar, para pelajar STI pun sangat aktif dalam pergerakan nasional, dan bahkan sebagian besar dari mereka turut berperan secara langsung dan aktif dalam pergerakan perjuangan untuk mempertahankan harkat dan martabat kemerdekaan Indonesia. Hal itu tampak dari aktivitas konkret mereka dalam perjuangan, termasuk berani melawan kolonialisme meskipun harus gugur di medan perjuangan. Tokoh pelajar STI, Soebianto Djojohadikusumo, adalah salah seorang pejuang yang gugur di Lengkong, Tangerang, dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.⁶⁸ Soebianto adalah pelajar STI yang sangat revolusioner. Dua hari pasca peresmian STI, Soebianto dan kawan-kawannya mendeklarasikan PP (Persatuan Pelajar) STI, dengan dirinya yang diangkat forum sebagai Ketua Umum, Bagdja Nitidiwirja yang berperan sebagai Wakil Ketua, dan Siti Rahmah Djajadiningrat yang didaulat sebagai Sekretaris.

Belum genap setahun, perguruan tinggi Islam itu harus ditutup karena pada waktu itu kedatangan tentara Sekutu yang dibonceng oleh NICA membuat kondisi pelbagai wilayah di Indonesia menjadi sangat genting. STI memang kembali dibuka pada tahun 1946, namun kedudukannya tidak lagi di Jakarta melainkan berada di Yogyakarta sebagai ibukota darurat pemerintahan Republik Indonesia.⁶⁹ Sejak kepindahan pusat administrasi pemerintahan, sejumlah tokoh yang

⁶⁷ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 100.

⁶⁸ Lukman Hakiem, *Merawat Indonesia: Belajar dari Tokoh dan Peristiwa*, Artawijaya (ed.), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hal. 55.

⁶⁹ /B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982), hal. 118-119.

mengelola STI turut mengikuti kebijakan migrasi pemerintah karena beberapa di antaranya merangkap jabatan sebagai pejabat pusat negara. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada tanggal 10 April 1946 di Gedung Kepatihan Keraton Yogyakarta, dibarengi dengan pidato yang disampaikan oleh Moh. Hatta dan K.H. Hadjid. Pada saat itu, Hatta menyampaikan pesan-pesan pada acara tentang karakteristik lembaga pendidikan tinggi itu. Sementara K.H. Hadjid menguraikan pidatonya kepada seluruh hadirin yang ada mengenai ilmu tauhid. Acara pembukaan kembali STI itu, tidak hanya dihadiri oleh para pejabat dan pengelola lembaga semata, namun juga turut hadir Presiden Soekarno sebagai kepala negara yang membuat peristiwa itu menjadi semakin khidmat dan terhormat.⁷⁰ Aktivitas belajar para mahasiswa berjalan dengan sederhana karena pada masa itu, perang untuk mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan Kerajaan Belanda terus terjadi di banyak tempat, termasuk di wilayah Yogyakarta. Beberapa tokoh perjuangan Indonesia di wilayah Yogyakarta dan bahkan Indonesia, lahir dari rahim pendidikan yang ada di Kampus STI.

Seiring berubahnya bulan dan tahun, STI dituntut untuk meningkatkan kualitas pengajaran sekaligus mengembangkannya dengan lebih luas ke tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rapat para pengelola muncul ide untuk membuat STI menjadi lebih efektif dan efisien. Sejumlah sosok yang memiliki *concern* dalam bidang pendidikan, diminta untuk turut berpartisipasi dalam mengembangkan lembaga pendidikan tersebut. Sementara untuk pengembangan kampus, ditunjuk beberapa tokoh yang di antaranya adalah Fathurrahman Kafrawi. Ia diangkat sebagai Ketua Panitia Perbaikan Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta,⁷¹ dan menjadi sosok yang berpengaruh dalam upaya perluasan perguruan tinggi Islam

⁷⁰ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 100.

⁷¹ Akh. Minjahi dan M. Atho Mudzhar, "Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi: Pengajaran Agama di Sekolah Umum"

tersebut. Sejak November 1947, STI berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan membuka empat fakultas, yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi.⁷² Dari keempat fakultas tersebut, Fakultas Agama memainkan peranan penting karena bertransformasi menjadi perguruan tinggi Islam yang pengelolaannya kelak berada di bawah naungan Kementerian Agama secara langsung.

Pada saat ibukota pemerintahan berada di Yogyakarta, pemerintah menganugerahi kota itu sebagai kota universitas. Hal itu dilakukan sebagai penghargaan kepada Yogyakarta yang bersedia menerima pemerintahan Indonesia setelah sebelumnya terusir dari Jakarta. Wujud anugerah itu di antaranya adalah pembentukan Universitas Gajah Mada yang sebelumnya adalah universitas swasta menjadi sebuah universitas negeri melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950. Perintisan perguruan tinggi ini adalah wujud realisasi perhatian pemerintah terhadap kelompok nasionalis yang telah berjuang bersama elemen bangsa lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.⁷³ Selain kebijakan pendirian perguruan tinggi umum tersebut, pemerintah juga memiliki kebijakannya sendiri untuk perguruan tinggi Islam. Di tahun yang sama, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam. Dalam pasal pertama peraturan tersebut, dituliskan bahwa: "Dengan menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, yang mengatur pula adanya *Fakultit Agama* sepenuhnya, maka pada hari peraturan ini diundangkan, *Fakultit Agama* dari universitit Islam Indonesia di Jogjakarta dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, yang bertempat kedudukan di

⁷² Lihat lebih lanjut, Dahlan Thaib dan Moh. Mahfud MD, *5 Windu UII*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).

⁷³ Hasbullah Mursyid, dkk., *Amal Bakti Departemen Agama RI: 3 Januari 1946 – 3 Januari 1996 (50 Tahun Departemen Agama) Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Edisi ke-II, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996), hal. 38.

Jogyakarta.” Dengan demikian, sejak diundangkannya peraturan tersebut pada tanggal 14 Agustus 1950 oleh pemerintah, maka Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia dirubah statusnya menjadi perguruan tinggi Islam yang berada di bawah pengelolaan negara, yang dalam aturan itu dijelaskan adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam proses pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam yang dikembangkan dari *Fakultit Agama* Universitas Islam Indonesia, tidak hanya Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim yang memiliki peran untuk mewujudkannya, namun juga ada banyak tokoh lain yang namanya bisa disebutkan sebagai tokoh sentral dalam upaya tersebut. Salah satunya adalah Fathurrahman Kafrawi yang menjadi ketua tim beranggotakan sebelas orang yang memiliki tugas untuk melakukan pengembangan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pembukaan PTAIN tadi, mulai dari mempersiapkan gedung, peralatan, sampai proses penerimaan mahasiswa baru.⁷⁴ Di samping Kafrawi, ada pula nama-nama tokoh pendidikan Islam lain seperti A.G. Pringgodigdo, Abdul Kahar Muzakkir, Notosusanto, Abdullah Sigit, Abdullah Affandi, Farid Ma'ruf, Rusbandi, Sulaiman, dan lain-lain.⁷⁵ Setelah persiapan yang dilakukan itu rampung, maka Menteri Agama meresmikan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tanggal 15 September 1951 di Yogyakarta, sebagai tempat rintisan lembaga pendidikan tinggi Islam milik negara yang dinegerikan dari salah satu fakultas Universitas Islam Indonesia. Pelaksanaan lembaga ini kemudian diatur oleh kebijakan kolaboratif antara Menteri Agama Wahid Hasyim (Surat Keputusan Menteri Agama No. K/I/14641 Tahun 1951) dan Menteri Pendidikan dan

⁷⁴ Akh. Minjahi dan M. Atho Mudzhar, “Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi: Pengajaran Agama di Sekolah Umum”, hal. 42.

⁷⁵ Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, “Prof. K.H. R. Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam”, dalam Lima Tokoh, hal. 49.

Kebudayaan Mr. Wongsonagoro (Surat Keputusan Menteri Pendidikan, P dan K No. 28665/Kab).⁷⁶

Pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) tidak hanya didasari oleh kepentingan politik semata, namun juga dilandasi oleh kebutuhan mendesak atas sumber daya manusia dalam bidang atau ilmu keagamaan. Pada masa itu, tenaga ahli dalam bidang keilmuan agama, seperti halnya agama Islam, masih sangat minim. Padahal kondisi masyarakat saat itu, benar-benar membutuhkan kehadiran para tenaga fungsional yang ahli agama di dalam pelbagai bidang kehidupan, seperti di bidang hukum, pengajaran dan birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, perintisan PTAIN seolah menjadi jawaban atas kebutuhan sumber daya manusia yang sangat mendesak pada masa itu, sehingga dengan adanya perguruan tinggi Islam maka akan tercetak banyak tenaga pengadil yang kompeten untuk bertugas di pengadilan agama (Islam) guna memutuskan suatu perkara tertentu, tenaga pengajar yang mumpuni untuk bertugas mengajarkan agama di sekolah atau madrasah yang dikelola pihak swasta ataupun pihak pemerintah, tenaga fungsional di internal ataupun eksternal Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Tujuan lainnya adalah menyediakan tempat pengajaran tinggi serta membentuk pusat pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan mengenai agama, khususnya agama Islam.⁷⁷

Agar pembentukan PTAIN dapat diterima seluruh kalangan umat Islam dan tidak menimbulkan gejolak apa pun, K.H. Mohammad Adnan dipilih sebagai Ketua Fakultas PTAIN. Meski pada saat akan diangkat untuk menduduki jabatan itu, ia masih memimpin Mahkamah Islam Tinggi Surakarta sebagai ketua, seluruh panitia pembentukan PTAIN secara bulat tetap merekomendasikan K.H. Mohammad Adnan. Alasannya adalah karena ia adalah tokoh Islam

⁷⁶ Menteri Agama, hal. 225.

⁷⁷ Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, "Prof. K.H. R. Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam", dalam Lima Tokoh, hal. 49.

yang dapat diterima oleh semua pihak atau semua kalangan Islam. Walaupun sempat mempertimbangkannya dengan cermat, menerima atau menolak permintaan itu, pada akhirnya K.H. Mohammad Adnan menerima usulan seluruh koleganya. Menurutnya, bila ia sampai menolak permintaan itu maka ia akan merasa lebih bersalah karena tidak menerima tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.⁷⁸ Meskipun telah memasuki usia yang sangat senja, ia tetap berusaha untuk bekerja sebaik mungkin sebagai ketua PTAIN. Karena belum adanya aturan yang baku mengenai PTAIN di masa itu, label yang disematkan kepada K.H. Mohammad Adnan sebagai ketua PTAIN bermacam-macam. Ada yang menyebutnya sebatas “Ketua Fakultas”, “Ketua PTAIN”, dan bahkan “Presiden PTAIN”. Untuk panggilan yang terakhir, disematkan kepada K.H. Mohammad Adnan karena PTAIN dianggap sejajar dengan universitas yang terdiri dari pelbagai macam disiplin ilmu.⁷⁹

Pada awal berdirinya, para pengajar di PTAIN terdiri dari sejumlah dosen yang berasal dari banyak latar belakang pendidikan.⁸⁰ Beberapa dosen yang dimaksud adalah: Thaib Thohir Abdul Muin, pengajar mata kuliah Ilmu Kalam yang merupakan alumnus Universitas Al-Azhar; Mukhtar Yahya, pengajar mata kuliah Ilmu Tafsir yang merupakan alumnus Universitas Darul ‘Ulum Kairo; Hasbi Ash-Shiddieqy, pengajar mata kuliah Ilmu Hadits yang merupakan alumnus pesantren; Hertog Joyonegoro, pengajar mata kuliah Antropologi dan Sejarah Kebudayaan yang merupakan alumnus Universitas Leiden, Belanda; Soenarjo, pengajar mata kuliah Asas Hukum Tata Negara yang merupakan alumnus *Recht Hoge School*

⁷⁸ Buku Tahunan PTAIN, 1951.

⁷⁹ Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, “Prof. K.H. R. Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam”, dalam Lima Tokoh, hal. 54.

⁸⁰ Di samping para pengajar dengan latar belakang pendidikan modern, ada pula pengajar yang berasal dari lembaga pendidikan tradisional madrasah. Salah satu pengajar yang tidak pernah belajar dalam lembaga pendidikan modern adalah Prof. Dr. Tengku Moh. Hasbi Ash-Shiddieqy yang kelak menjadi tokoh penting di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lihat lebih lanjut, Nourouzzaman Shiddiqi, “Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy”, hal. 149-214.

(Sekolah Tinggi Hukum). Di tahun pertama pembelajarannya, telah ada 100 orang mahasiswa yang diterima oleh PTAIN. Namun dalam tahun kedua, hanya ada 36 orang mahasiswa yang diterima dari 77 orang pendaftar dengan ragam latar belakang pendidikan menengah. Para calon pelajar di PTAIN yang memiliki *background* pendidikan madrasah atau pesantren, dan ternyata belum juga memenuhi syarat minimal untuk memasuki tingkat pendidikan di Perguruan Tinggi, maka mereka diharuskan untuk mengikuti studi pendahuluan di sebuah lembaga yang berada dalam naungan kementerian yang sama, yaitu Sekolah Persiapan PTAIN. Mereka yang lulus pada ujian akhir Sekolah Persiapan PTAIN dan mendapatkan nilai yang pantas, maka status mereka disamakan dengan lulusan SMA negeri dan kemudian baru dapat mengikuti proses perkuliahan di PTAIN.⁸¹ Meski menerima pelajar yang berasal dari lulusan sekolah menengah umum, penguasaan ilmu agama dan Bahasa Arab juga tetap diperhatikan, sehingga sekolah persiapan difungsikan tidak hanya menyeleraskan para calon mahasiswa dari madrasah namun juga dari sekolah umum.⁸²

Di PTAIN, lama studi yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa adalah empat tahun atau empat tingkat, dengan ciri dan nama khasnya masing-masing. Pada tahun atau tingkat pertama, mahasiswa disebut sebagai tingkat *Propedeuce*. Sedangkan untuk tahun atau tingkat kedua, para pelajar mendapat nama tingkat *Kandidat*. Sementara itu, untuk para mahasiswa yang berada di tahun atau tingkat ketiga, mereka dikenal dengan nama *Bakaloreat*. Adapun tahun atau tingkat keempat, para mahasiswa disebut dengan tingkat *Doktoral*. Pada masa perintisannya, PTAIN hanya terdiri dari satu disiplin ilmu yaitu Ilmu Agama Islam. Oleh karena itu, di masa kepemimpinan K.H. Mohammad Adnan, PTAIN belum memiliki

⁸¹ Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, "Prof. K.H. R. Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam", dalam Lima Tokoh, hal. 54-55.

⁸² Mukhtar Yahya, hal. 119.

fakultas, jurusan, ataupun program studi karena istilah “perguruan tinggi” yang disematkan kepadanya mengandung arti yang sebetulnya masih sangat umum, yakni suatu lembaga pendidikan tingkat tinggi.

83

Beberapa tahun setelah pembentukan PTAIN di Yogyakarta, pemerintah kembali membangun sebuah lembaga pendidikan tinggi di Jakarta yang memiliki tujuan untuk mencetak para pegawai negeri di bidang pendidikan sekolah menengah pertama. Lembaga yang dimaksud adalah Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) yang diresmikan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1957. Masa studi yang harus ditempuh seorang mahasiswa di ADIA adalah lima tahun, yang antara lain terdiri dari tingkat seni akademik (tiga tahun) dan tingkat akademik (dua tahun). Pada awal mula pembentukannya, kurikulum ADIA masih terbilang sederhana dan memiliki persamaan dengan kurikulum PTAIN, khususnya dalam pelaksanaan sejumlah mata kuliah tertentu. Saat dibuka, ADIA hanya memiliki tiga jurusan, yang di antaranya adalah:

1. Jurusan Pendidikan Agama;
2. Jurusan Bahasa Arab; dan
3. Jurusan *Da'wah wal Irsyad*.

Secara khusus, ADIA memiliki dua karakteristik yang khas. *Pertama*, mahasiswa yang mendapat tugas untuk menjalani perkuliahan di ADIA adalah para pegawai atau guru dari lingkungan Departemen Agama, baik pusat ataupun daerah, yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan akademis tertentu. Hal ini dapat terjadi karena ADIA adalah lembaga akademis yang mengikat, mengingat statusnya adalah akademi dinas. *Kedua*, ADIA adalah lembaga pendidikan yang memiliki mandat untuk mencetak guru-guru agama yang modern dan maju, dengan dikelola baik secara sumber daya manusia ataupun keuangan diserahkan kepada Kementerian Agama (yang secara

⁸³ Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, “Prof. K.H. R. Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam”, dalam Lima Tokoh, hal. 54-55.

spesifik pada masa itu dikenal sebagai Jawatan Pendidikan Agama [Japenda] Departemen Agama). Di samping Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, hanya Kementerian Agama yang juga memiliki tugas untuk mengelola lembaga pendidikan. Untuk yang terakhir ini, dikhususkan pada penyiapan guru agama Islam modern pada lembaga pendidikan berciri khas Islam, seperti halnya madrasah.

Pada tahun 1959, terjadi penelaahan dan perbaikan terhadap PTAIN. Dalam rapat-rapat yang dilakukan, muncul wacana untuk Kementerian Agama hanya memiliki satu lembaga pendidikan tinggi Islam negeri namun berkualitas. Memulai upaya itu, Kementerian Agama menerbitkan putusan berupa Penetapan Menteri Muda Agama No. 41 tahun 1959 tentang Panitia Perbaikan Perguruan Tinggi Agama Islam, yang diketuai oleh Mr. Soenarjo. Setelah beberapa kali pertemuan, panitia menyampaikan usulan untuk menyatukan PTAIN (Yogyakarta) dan ADIA (Jakarta) menjadi satu kesatuan lembaga pendidikan. Nama yang diajukan untuk perguruan tinggi itu adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), karena landasan hukum yang ada pada masa itu belum dapat memaksimalkan peran lembaga pendidikan tinggi itu menjadi lembaga pendidikan yang berstatus “universitas”. Meski demikian, hak dan kewajiban yang ada pada IAIN akan disama-ratakan dengan universitas negeri lain yang ada di Indonesia.

Usulan yang disampaikan oleh panitia, lalu diterima Pemerintah sehingga kemudian terbitlah Peraturan Pemerintah Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan IAIN. Dengan landasan Peraturan Pemerintah yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1960 ini, turun pelbagai ketetapan lain dari Menteri Agama. Pertama-tama adalah Penetapan Menteri Agama No. 28 tahun 1960 yang membentuk tim kerja untuk mempersiapkan perguruan tinggi Islam yang diproyeksikan bernama “Al-Djami’ah”. Panitia yang kembali dipimpin oleh Mr. Soenarjo, melakukan banyak pertemuan

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

untuk mencari usulan-usulan terbaik guna penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi Islam yang akan dibentuk. Tim kerja ini hanya memiliki waktu sampai akhir Bulan Juli 1960 untuk memikirkan pelbagai macam hal yang berkaitan dengan rencana penyelenggaraan IAIN. Setelah itu, penyelenggaraan IAIN akan segera dilakukan dengan dasar Penetapan Menteri Agama No. 43 tahun 1960. Setelah pelbagai persiapan rampung dilakukan, pada tanggal 24 Agustus 1960, yang bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1380 H., akhirnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Al-Jami'ah Al-Islamiah Al-Hukumiyah" dideklarasikan secara resmi oleh para pejabat pemerintah di Yogyakarta.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, di tahun berikutnya, keluarlah Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan IAIN. Pasca peresmian, diketahui bahwa IAIN "Al-Jami'ah Al-Islamiah Al-Hukumiyah" memiliki empat fakultas, dengan dua fakultas berada di Yogyakarta dan dua fakultas lainnya berada di Jakarta. Pada awal pembentukannya itu, yang diangkat sebagai rektor IAIN "Al-Jami'ah Al-Islamiah Al-Hukumiyah" adalah Prof. Mr. R.H. A. Soenarjo. Ia memimpin empat orang dekan yang menjabat di empat fakultas yang lokasinya berada di dua daerah, yaitu: Tengku Moh. Hasbi Ash-Shiddieqy (Dekan Fakultas Syariah) dan Prof. Muchtar Jahja (Dekan Fakultas Ushuluddin) di kampus Yogyakarta, serta H. Mahmud Junus (Dekan Fakultas Tarbiyah) dan H. Bustami Abdul Gani (Dekan Fakultas Adab) di kampus Jakarta. Pada masa itu, jabatan rektor disebut dengan nama "presiden". Ketika menduduki kursi rektor, Mr. Soenarjo dibantu oleh seorang sekretaris senat bernama Mr. Wasil Aziz.⁸⁴

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, pembentukan IAIN "Al-Jami'ah Al-Islamiah Al-Hukumiyah" menimbulkan animo yang tinggi di tengah masyarakat untuk mempelajari agama dan

⁸⁴ IAIN Jogjakarta, *Buku Tahunan 1960-1962*, hal. 21-22.

mengembangkannya untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Oleh sebab itu, datanglah berbondong-bondong para calon siswa dari daerah yang berkeinginan untuk belajar di IAIN “Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah”, baik yang berada di Yogyakarta ataupun Jakarta. Tidak hanya itu, sejak diresmikannya IAIN “Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah” pula, di beberapa daerah dan provinsi di Indonesia, muncul banyak perguruan tinggi Islam yang berupaya untuk menampung aspirasi ke-Islaman, mengakomodasi minat belajar para pelajar muslim yang berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dalam bidang Islam, dan menjadi sarana pengembangan ilmu-ilmu agama agar selalu relevan dalam perkembangan zaman. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam itu sebagian berstatus swasta, dan sebagian lainnya menjadi cabang IAIN “Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah” baik yang ada di Yogyakarta ataupun Jakarta.

Melihat perkembangan itu, pemerintah bergerak untuk mengakomodasi pelbagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang telah hadir di banyak daerah. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1963, yang memungkinkan terbentuknya IAIN di daerah-daerah yang berada di luar Yogyakarta dan Jakarta. Dengan perkembangan sosial politik yang terjadi pada tahun 1960-an, perubahan terjadi menjadi semakin cepat. Hal itu mendorong pengembangan IAIN oleh Menteri Agama, sehingga kemudian timbul ide untuk membuat masing-masing IAIN yang ada di Yogyakarta dan Jakarta menjadi lebih otonom. Dengan pandangan tersebut, dipisahkanlah IAIN “Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah” menjadi dua institut yang masing-masing berdiri sendiri. Dengan Keputusan Menteri Agama No. 49 tahun 1963, IAIN “Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah” secara resmi dibagi menjadi IAIN Sunan Kalijaga yang berpusat di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah yang berpusat di Jakarta. Selain menjadi lembaga yang mandiri, kedua institut itu juga memiliki tugas yang lain, yaitu mengoordinir

"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

beberapa lembaga pendidikan tinggi Islam yang ada di daerah-daerah. Untuk memudahkan koordinasi itu, dilakukan pembagian pengelolaan sebagai berikut:

1. IAIN Sunan Kalijaga yang berpusat di Yogyakarta, mengoordinasikan fakultas atau lembaga pendidikan tinggi Islam lain, yang meliputi daerah atau wilayah: Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua (yang ketika itu bernama Irian).
2. IAIN Syarif Hidayatullah yang berpusat di Jakarta, mengoordinasikan fakultas atau lembaga pendidikan tinggi Islam lain, yang meliputi daerah atau wilayah: Jakarta, Jawa Barat, dan Pulau Sumatera.

Dalam perkembangannya kemudian, peraturan pemerintah memungkinkan pembentukan IAIN yang baru, apabila syarat-syarat dapat dipenuhi, yang di antaranya adalah jumlah fakultas yang tidak lagi tunggal. Untuk perguruan tinggi Islam yang ada di bawah koordinasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beberapa di antaranya bertransformasi menjadi IAIN yang mandiri sejak peraturan itu diterbitkan. Sementara untuk fakultas cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada beberapa daerah yang telah mencapai syarat itu, ditingkatkan menjadi IAIN yang otonom sehingga dapat dipisahkan untuk berdiri secara mandiri. Untuk cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dikembangkan itu, antara lain:

1. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang dibentuk pada tahun 1963;
2. IAIN Raden Fatah Palembang, yang dibentuk pada tahun 1964;
3. IAIN Imam Bonjol Padang, yang dibentuk pada tahun 1966;
4. IAIN Sultan Thaha Saefuddin Jambi, yang dibentuk pada tahun 1967;
5. IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang dibentuk pada tahun 1968;
6. IAIN Syarif Qasim Pekanbaru, yang dibentuk pada tahun 1970;

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

Sejak tahun 1960-an, perguruan tinggi Islam terus berkembang dan bahkan terus bermunculan lembaga-lembaga serupa di banyak daerah. Meskipun demikian, lembaga-lembaga itu tidak dapat sepenuhnya bergerak secara sendiri, terutama yang statusnya adalah cabang atau bagian dari IAIN lain yang lebih besar. Sebagai contoh, pada tahun 1965, lembaga pendidikan tinggi Islam di Cirebon adalah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah cabang Cirebon (*Fakultas Tarbijah Al-Djami'ah Sjarief Hidayatullah tjabang Tjirebon*) yang merupakan kepanjangan lembaga dari IAIN Syarif Hidayatullah yang berpusat di Jakarta. Hingga tahun 1976, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mempunyai sepuluh fakultas yang tersebar di sejumlah daerah, yaitu: empat fakultas berpusat di Jakarta; dua fakultas berkedudukan di Serang, Banten; dua fakultas berlokasi di Cirebon, Jawa Barat; dan satu fakultas berada di Singkawang, Kalimantan.

BAB III

PERIODE PERINTISAN DAN PELETAKAN LANDASAN, 1962-1965.

A. Cirebon Pada Masa Orde Lama

Sejak Republik Indonesia merdeka di tahun 1945, negeri itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Sebagai proklamator, Soekarno dan Mohammad Hatta tampil sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama. Meski semangat kemerdekaan tengah menggelora dan membawa kebahagiaan bagi seluruh bangsa Indonesia, namun timbul pertanyaan lain setelah merdeka, terkait arah kemajuan bangsa ini. Karena adanya kebimbangan dalam persoalan tersebut, pada dua dasawarsa paling awal kemerdekaan, Indonesia kerap kali dihinggapai perpecahan karena sejumlah daerah dengan tokoh-tokohnya memiliki perbedaan pandangan dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Kondisi yang demikian itu tidak hanya terjadi di Jakarta, namun merembet hingga ke tingkat daerah, termasuk ke wilayah Cirebon. Pada masa itu, di Cirebon hidup sejumlah kalangan yang memiliki perbedaan yang tajam, khususnya dalam hal pandangan ideologis.

Meskipun demikian, administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan cukup baik sehingga masyarakat dapat hidup secara layak. Adapun pelbagai gangguan yang sejak tahun 1946-1949 terjadi, berekses kecil pada daerah ini. Yang terbesar adalah gerakan pemberontakan kaum komunis di tahun 1946 dan gerakan DI TII di tahun 1950-an saja. Situasi politik yang dipenuhi kecurigaan dan kesalahpahaman itu dilandasi oleh pengumpulan ideologi yang belum tuntas, sehingga mengakibatkan terjadinya pergolakan hingga ke tingkat akar rumput. Yang menjadi korban tentu saja adalah masyarakat.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia masa orde lama berkaitan erat dengan peran Departemen Agama yang secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

spesifik, usaha ini ditangani oleh bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam UU Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan UU Pendidikan tahun 1954 No. 20 yang berbunyi:

1. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama. Dan orang tua murid berhak menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
2. Cara menyelenggarakan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri di atur melalui menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan (PPK) bersama menteri agama.

Pada tahun 1960 sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di Perguruan Tinggi Umum dan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti ataupun tidak. Namun, pada tahun 1967 (pada awal Orde Baru), ketetapan itu diubah dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah agama dan mata kuliah ini termasuk kedalam sistem penilaian.

B. Kondisi Kalangan Terpelajar Muslim di Cirebon

Pada masa Orde Lama, kehidupan pendidikan sangat dipengaruhi oleh iklim sosial dan politik yang masih mencari bentuknya. Karena masih terjadi pergolakan identitas, kondisi sosial, politik dan ekonomi masih berada dalam suasana yang tidak stabil dan bahkan cenderung kritis. Sejak Dekrit Presiden yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, kekuasaan berpusat pada dirinya. Sementara itu, kekuatan rakyat yang semestinya menjadi aset pembangunan, malah terpecah ke dalam pelbagai serpihan fanatisme ideologis, dan perselisihan antar golongan: nasional-agama-komunis, yang sebetulnya berusaha disatukan oleh Soekarno melalui kebijakan integrasi Nasakom-nya. Alih-alih menyatu, ketiganya justru berada dalam posisi yang kritis seolah siap menerkam satu sama lainnya. Pada saat itu, syarat hidup

bagi suatu kekuatan sosial-politik hanya satu, yaitu melakukan kolaborasi dengan Bung Karno; tanpa hal itu, maka ia akan dipaksa minggir tersisihkan atau bahkan harus mati terkubur karena dampak perseteruan.

Bagi kalangan pelajar dan masyarakat secara umum, bertahan hidup adalah keinginan terbesar mereka, sehingga mereka berupaya untuk mempertahankan diri, dengan cara mendukung kobaran semangat Sang Pemimpin Revolusi. Karena tidak adanya pilihan, kalangan terpelajar muslim memilih untuk bekerja sama dengan Soekarno. Namun di samping itu, pertimbangan terbesar lainnya adalah kenyataan bahwa presiden mesti dibentengi oleh nilai-nilai agama agar tidak serta merta terpengaruh oleh paham komunisme yang saat itu merajalela. Dengan kata lain, mendekatnya kalangan muslim kepada Presiden Soekarno bukan hanya karena berupaya menyelamatkan diri di tengah kondisi yang tidak pasti, namun juga menjauhkan diri sang presiden dari pengaruh- pengaruh komunisme yang pemikiran dan gerakannya cenderung membahayakan.

Kalaupun ada kelompok terpelajar muslim yang tidak memiliki pemikiran seperti itu, mereka hanya bisa melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi tanpa mampu memperlihatkan sikapnya secara terbuka. Bagaimanapun, keselamatan adalah hal yang paling utama dan hal itu mesti mereka jaga agar jiwa dan raganya tidak dihabisi oleh kondisi zaman yang sangat membahayakan. Sejumlah tokoh terpelajar Islam yang tersebar di wilayah Cirebon, seperti K. Bisri Amin, K. Oton Hulaimy, K. Abdullah Abbas, H. Abdul Ghany Ichya, dan lain sebagainya, sebetulnya merasa geram dengan kondisi sosial politik pada masa itu yang sangat dinamis. Namun karena bergerak secara terang-terangan akan sangat membahayakan, akhirnya dipilihlah perjuangan melalui lembaga pendidikan.

Salah satu cara yang paling memungkinkan untuk menggelorakan semangat perjuangan tanpa perlu menegaskan sikap adalah dengan cara seperti itu, sehingga akhirnya kalangan terpelajar

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

ini merintisnya dengan membentuk grup-grup kajian yang terinspirasi dari semangat kelompok Islam lainnya yang juga menggelora di daerah-daerah lain. Cara ini terbilang efektif, karena menyuarakan suara kritis mereka namun tidak berdampak buruk terhadap eksistensi kalangan muslim terpelajar yang ada di Cirebon. Kedudukan tokoh-tokoh itu, yang kebetulan menjabat di pemerintahan, juga terbilang aman meskipun secara aktif turut mengelola grup kajian tersebut.

C. Manifestasi Gerakan Kalangan Pelajar Muslim

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, kondisi Republik Indonesia belum berada dalam keadaan yang stabil. Pada era yang kemudian dikenal sebagai Orde Lama tersebut, sebagai suatu bangsa yang baru merdeka, Indonesia masih membangun pondasi dan bangunan identitas sistem kenegaraannya. Tidak stabilnya kondisi negara, mendorong terjadinya pelbagai macam peristiwa bentrokan mengerikan yang dilandasi oleh latar belakang perbedaan keyakinan dan ideologi masyarakat.⁸⁵ Hingga dua dasawarsa pertama pasca kemerdekaan, negeri yang baru seumur jagung itu mengalami banyak pergolakan, baik yang disebabkan oleh pengaruh internal ataupun eksternal. Intensitas perseteruan ideologis memuncak pada sekitar awal tahun 1960-an, saat Presiden Soekarno menghendaki integritas Republik Indonesia yang terdiri dari ragam suku bangsa dengan pemikiran penyatuan ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Meski presiden mengakomodasi semua kalangan, kelompok komunis melalui PKI (Partai Komunis Indonesia) tampak berkembang lebih pesat karena memaksimalkan gerakan mereka hingga ke tingkat paling bawah dengan mendirikan BTI (Barisan Tani Indonesia) serta banyak organisasi lainnya.

⁸⁵ Tendi, ADS hal. 203

Kalangan agama, khususnya kaum muslim, menyadari potensi laten gerakan agresif kaum komunis. Oleh sebab itu, mereka berupaya mengimbangi perkembangan paham komunis dengan menginisiasi pendirian lembaga pendidikan Islam yang dapat melahirkan banyak kalangan terpelajar muslim di generasi-generasi yang akan datang. Geliat cendekiawan muslim dalam bidang pendidikan, hampir merata di setiap daerah, khususnya daerah yang didominasi oleh orang-orang beragama Islam. Salah satu daerah yang dimaksud adalah Cirebon, daerah dengan sebagian besar penduduknya yang memeluk agama Islam namun memiliki jejak sejarah kelam karena pernah berkembangnya ideologi komunis di kawasan tersebut pada masa revolusi kemerdekaan. Pergumulan ideologi yang terjadi pada masa itu di wilayah Cirebon, melahirkan pelbagai macam hal yang diharapkan dapat mendukung gerakan masing-masing kelompok. Apabila kaum komunis berhasil melahirkan banyak organisasi *onderbouw* guna menyokong partainya, maka kaum religius seperti kalangan muslim memilih untuk mengembangkan lembaga pendidikan sebagai upaya mereka dalam menangkis pengaruh orang-orang komunis.

Manifestasi gerakan kaum muslim Cirebon dalam bidang pendidikan, salah satunya tampak dari kegiatan yang berjalan dengan motor kelompok belajar *Islamic Study Club* (ISC) Cirebon yang terdiri dari banyak kalangan terpelajar Islam di Cirebon. Perjuangan itu juga diwujudkan dengan pendirian lembaga pendidikan tinggi untuk kalangan muslim di Cirebon yang pada masa itu berkiblat pada Universitas Islam Indonesia dan perkembangan IAIN "Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah", baik di Yogyakarta maupun di Jakarta. Untuk perguruan tinggi yang terakhir ini, yakni IAIN yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1961,⁸⁶ telah menghadirkan animo masyarakat yang sangat tinggi sehingga banyak

⁸⁶ Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan IAIN.

pelajar muslim dari pusat hingga daerah yang berkeinginan untuk belajar di lembaga pendidikan tinggi Islam milik negara tersebut. Adapun perguruan tinggi Islam yang dibentuk oleh ISC sendiri adalah Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UNISHA) yang pengelolaannya berada di bawah binaan sebuah yayasan yang kemudian dikenal sebagai Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Syarif Hidayatullah.

Proses Pendirian UNISHA tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan yang sangat kuat dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pejabat daerah, politisi, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Islam dan aktifis mahasiswa. Kompaknya hampir seluruh elemen masyarakat Cirebon di pertengahan tahun 60-an untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam, dikarenakan beberapa hal, diantaranya; *pertama*, semangat kaum santri dan guru-guru khususnya guru agama untuk melanjutkan pendidikan setelah menempuh pendidikan di tingkat SMA/ Aliyah/ PGA atau SPG. *Kedua*, untuk melawan perkembangan faham komunisme yang sangat masive di Indonesia. Dan *ketiga*, semangat aktifis dan cendekiawan Islam untuk dapat berperan secara konkret di lembaga-lembaga formal yang menuntut pengalaman pendidikan tinggi dan gelar formal. Dengan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh elemen masyarakat Cirebon pada saat itu, UNISHA dapat berjalan selama beberapa waktu.

Meski pada mulanya minat masyarakat tampak begitu tinggi terhadap lembaga ini, pada perkembangannya terdapat tren penurunan sehingga akhirnya para pengelola lembaga pendidikan ini memilih untuk mentransformasikannya menjadi sebuah perguruan tinggi yang berada di bawah kepengurusan pemerintah. Selain itu, persoalan dana operasional untuk menjalankan aktivitas kampus juga tampak sangat mahal sehingga dengan berafiliasi kepada pemerintah maka setidaknya masalah keuangan lembaga pendidikan Islam dapat teratasi. Keterbatasan soal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNISHA, yang juga dibarengi dengan situasi politik beserta kondisi

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

birokrasi yang kala itu sangat dinamis karena pergumulan ideologi, mengakibatkan lembaga pendidikan tinggi Islam di Cirebon itu mengalami perkembangan yang stagnan. Namun di tengah kondisi demikian, Menteri Agama yang saat itu diduduki oleh K.H. Saifuddin Zuhri memiliki keinginan dan usaha yang serius untuk mengembangkan perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri memiliki dua alasan penting yang memotivasinya melakukan kebijakan tersebut. *Pertama*, rasa hormat, kagum, dan penghargaan diri seorang santri terhadap tokoh-tokoh Islam yang telah memberi manfaat dan perjuangan terhadap umat; *Kedua*, pemikiran K.H. Saifuddin Zuhri yang memandang bahwa IAIN memiliki posisi yang strategis karena dapat difungsikan sebagai media untuk mewujudkan misi utamanya guna mengusung agama sebagai bagian pokok dari *nation building* (pembangunan bangsa).⁸⁷ Oleh karena dua hal tersebut, K.H. Saifuddin Zuhri berupaya untuk melakukan pengembangan dan penambahan IAIN di seluruh Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya..

Momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh pengurus yayasan yang berusaha untuk menjemput kebijakan Kementerian Agama yang digawangi oleh K.H. Saifuddin Zuhri, dengan cara mengajukan penegerian Fakultas Agama UNISHA. Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 12 Agustus 1965, salah satu dari tiga Fakultas di lingkungan UNISHA, yaitu fakultas Agama, dinegerikan dan diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN “*Al-Jami’ah*” Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon. Sedangkan dua fakultas lainnya yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi menjadi cabang dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Atas dasar itulah maka tanggal 12 Agustus 1965 dijadikan sebagai hari jadi IAIN Cirebon. Dalam proses ini banyak tokoh-tokoh Ulama,

⁸⁷ Muhaemin Abdul Ghofur, “KH Saifuddin ZUhri; Eksistensi Agama dalam Nation Building”, hal. 224.

Masyarakat dan Aktifis Mahasiswa terlibat dalam mewujudkannya, diantaranya:

1. KH. Bisri Amin (DPRGR)
2. KH. Habib Saleh Assegaf
3. KH. Syarif Muhammad (Ayip Muh)
4. KH. M. Sanusi (JKPP Ciwaringin)
5. KH. Hariri (Ciwaringin)
6. KH. Otong Hulaimy (Majalengka)
7. KH. Abdullah Abbas (Buntet Pesantren)
8. KH. Jawahir (Buntet Pesantren)
9. Sultan Muhammad Nurus (Sultan Kanoman)
10. Sa'dillah Fathony (Sekretaris Penegrian IAIN Cirebon)
11. Amin Kartubi (Ketua Umum PMII Cirebon)
12. Halim Nawawy (Ketua HMI Cirebon)
13. Moh. Amsar (Ketua PSII)
14. Sutisna (Bupati Cirebon)
15. Ma'mury Ichsany (Ketua DPRD Kab. Cirebon)

BAB IV

PERIODE PENYESUAIAN AKADEMIK DAN MANAJEMEN, 1965-1997

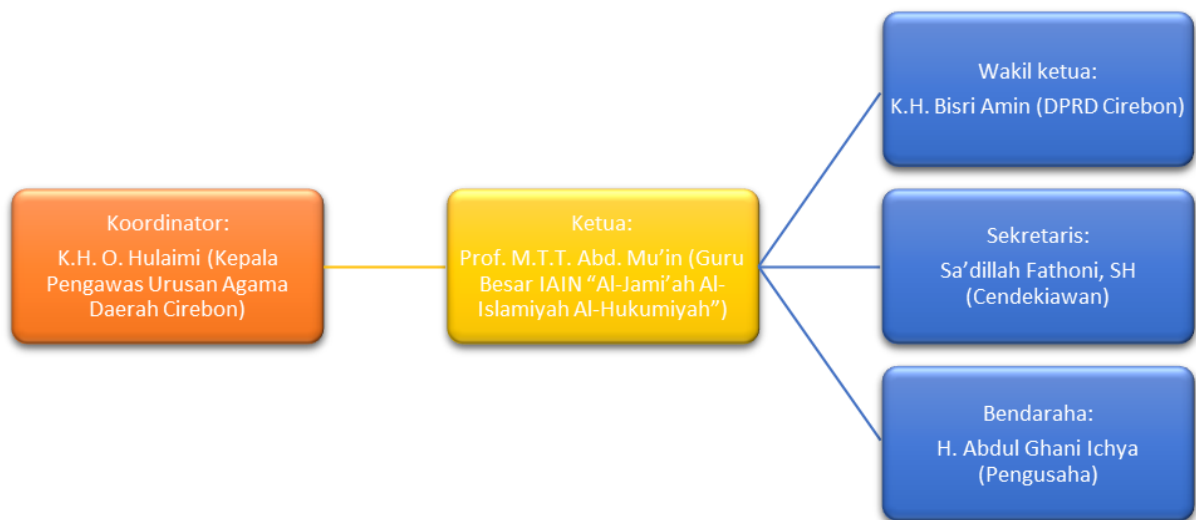
A. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah cabang Cirebon (*Fakultas Tarbijah dan Ushuluddin Al-Djami'ah Sjarief Hidajatullah tjabang Tjirebon*)

Keterbatasan soal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UNISHA), yang juga dibarengi dengan situasi politik beserta kondisi birokrasi yang kala itu sangat dinamis karena pengumpulan ideologi, mengakibatkan lembaga pendidikan tinggi Islam di Cirebon itu mengalami perkembangan yang stagnan. Namun di tengah kondisi demikian, Menteri Agama yang saat itu diduduki oleh K.H. Saifuddin Zuhri memiliki keinginan dan usaha yang serius untuk mengembangkan perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri memiliki dua alasan penting yang memotivasinya melakukan kebijakan tersebut. *Pertama*, rasa hormat, kagum, dan penghargaan diri seorang santri terhadap tokoh-tokoh Islam yang telah memberi manfaat dan perjuangan terhadap umat; *Kedua*, pemikiran K.H. Saifuddin Zuhri yang memandang bahwa IAIN memiliki posisi yang strategis karena dapat difungsikan sebagai media untuk mewujudkan misi utamanya guna mengusung agama sebagai bagian pokok dari *nation building* (pembangunan bangsa).⁸⁸ Oleh karena dua hal tersebut, K.H. Saifuddin Zuhri berupaya untuk melakukan pengembangan dan penambahan IAIN di seluruh Indonesia melalui kebijakan- kebijakannya.

Momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh pengurus yayasan yang berusaha untuk menjemput kebijakan Kementerian Agama yang

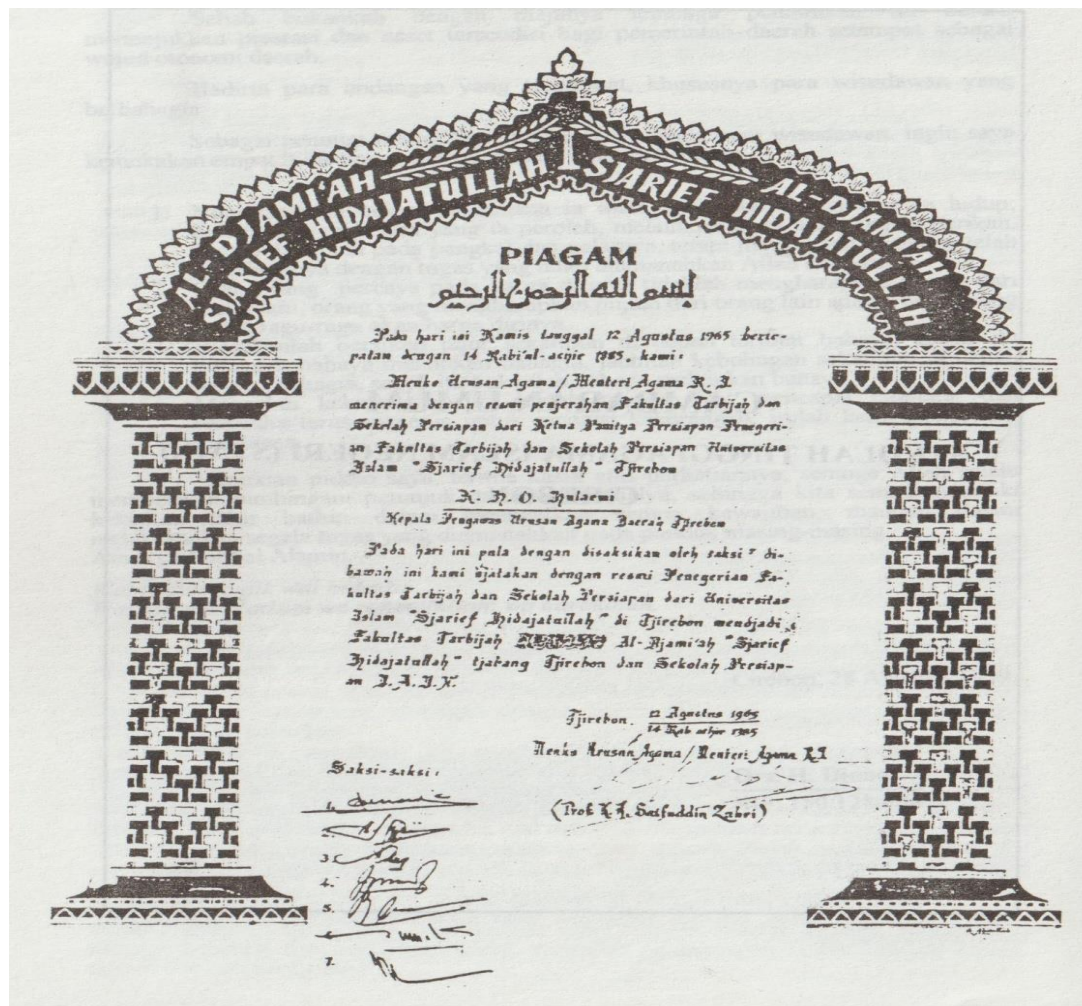
⁸⁸ Muhaemin Abdul Ghofur, "KH Saifuddin ZUHri; Eksistensi Agama dalam Nation Building", hal. 224.

digawangi oleh K.H. Saifuddin Zuhri, dengan cara mengajukan penegerian Fakultas Agama UNISHA. Untuk mempermudah seluruh proses yang ada, yayasan menunjuk sejumlah tokoh yang diharapkan dapat melaksanakan keinginan tersebut. Adapun tokoh-tokoh yang ditunjuk sebagai tim panitia kerja itu, adalah sebagai berikut:



Melalui proses yang relatif lebih mudah, pada akhirnya Fakultas Agama UNISHA berhasil dinegerikan dan lembaga itu kemudian diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah cabang Cirebon. Landasan formil yang berupa SK Menteri Agama No. 59/1965 tanggal 12 Agustus 1965 menetapkan bahwa Prof. K.H.M. Taib Thahir Abdul Mu'in adalah Dekan pertama fakultas cabang IAIN tersebut. Momentum penegerian ini menjadi landasan penting perkembangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sehingga tanggal 12 Agustus 1965 dijadikan sebagai hari jadi yang diperingati setiap tahun oleh seluruh civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tidak hanya sampai disitu, peresmian lembaga pendidikan ini juga diabadikan dalam sebuah piagam penegerian yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, secara langsung dan prosesnya disaksikan oleh sejumlah tokoh pendidikan dan Cirebon pada masa itu, yang di *"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"*

antaranya adalah: Prof. Drs. H. Soenardjo, H. Mustofa, K.H. Bisri Amin, dan Sultan Keraton Kanoman, M. Nurus, di Gedung Negara yang berada di Jalan Siliwangi Cirebon. Dalam proses penegerian itu, terdapat peran seorang pegawai di Departemen Agama yang bernama Chowas Sumarta, B.A. Ia merupakan putra asal Cirebon, sehingga turut membantu proses kelancaran administrasi bagi penegerian Fakultas Agama UNISHA. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, diresmikan pula Sekolah Persiapan IAIN dengan direktur pertama: Drs. O. Djauharuddin AR.



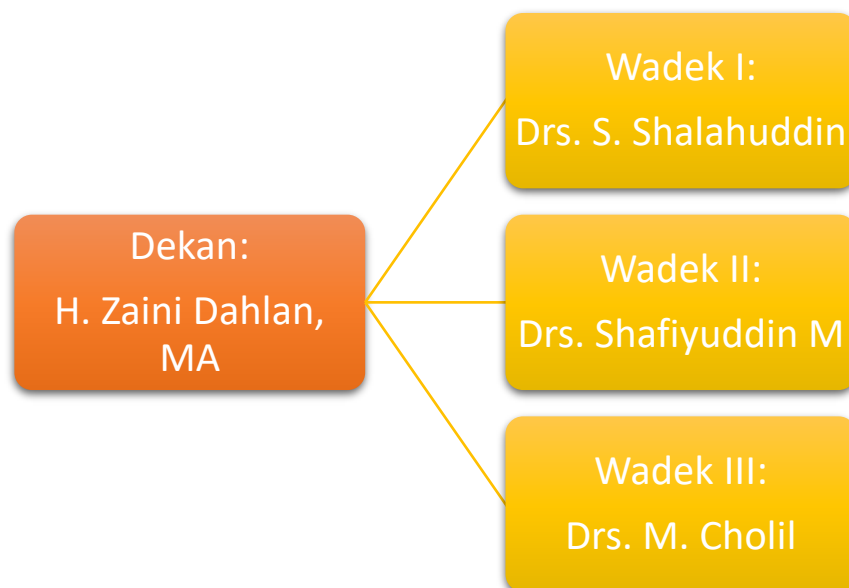
Piagam Penegerian Fakultas Tarbiyah Cabang Cirebon

Pasca perubahan status Fakultas Agama tersebut, maka terjadi pemisahan administrasi antara Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah cabang Cirebon di satu sisi dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi UNISHA di sisi lainnya. Jika Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah cabang Cirebon, sudah berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama (Kementerian Agama) soal *management*-nya, maka Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi UNISHA yang pengelolaannya masih berada di bawah kewenangan yayasan akhirnya menjadi bagian dari Universitas Islam Indonesia cabang Cirebon yang berafiliasi pada Universitas Islam Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Keputusan peralihan status tersebut merupakan keputusan penting karena menjadi kerjasama yang apik antara pihak pemerintah dan swasta dalam membendung perkembangan paham komunisme yang ketika itu tengah mencapai puncaknya. Pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun daerah, memang berasal dari pelbagai kalangan. Namun kalangan Islam di dalamnya, tetap mengupayakan agar bangsa ini tidak terjerebab ke dalam kubangan pengaruh PKI. Pada masa itu, aparat pemerintah daerah di Cirebon banyak yang berafiliasi dengan partai kiri. Oleh sebab itu, pejabat daerah baik di tingkat eksekutif ataupun legislatif yang berafiliasi dengan komunitas kanan meski mengambil tindakan untuk menahan pengaruh tersebut. Tokoh penting dari kalangan pejabat Cirebon yang menyadari perkembangan situasi tersebut, salah satunya adalah K.H. Bisri Amin. Beliau adalah seorang tokoh pesantren dari lingkungan Pesantren Babakan Ciwaringin, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Cirebon. Dengan kapasitasnya tersebut, beliau mendorong agar Fakultas Agama UNISHA dapat dialihstatuskan dan menjadi kepanjangan tangan kalangan Islam untuk menjaga agar generasi muda tidak terjatuh ke lembah ajaran komunis. Meski tidak secara langsung turut serta dalam pengelolaan lembaga, Ketua Nahdlatul Ulama Cirebon tahun 1960-an itu turut berkiprah secara maksimal

dalam pelbagai kesempatan guna mendorong percepatan perubahan status perguruan tinggi Islam tersebut.

Karena animo masyarakat di sekitar Cirebon sangat tinggi dan juga adanya dorongan untuk melakukan pengembangan kajian ke-Islaman yang lebih luas, maka Kementerian Agama kembali membuka fakultas cabang di Cirebon pada tahun 1968. Fakultas yang dimaksud adalah Fakultas Ushuluddin Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah cabang Cirebon, yang saat pembentukannya ditetapkan pula struktur organisasi pengelolaannya sebagai berikut:



Dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan administrasinya, kedua fakultas tersebut beroperasi sebagai fakultas cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Meski demikian, kondisinya masih sangat sederhana karena sebagai kampus rintisan, pelbagai sarana dan prasarana lembaga masih dalam keadaan yang terbatas. Kantor dekan masih nomaden karena harus beberapa kali mengalami perpindahan, dan tempat perkuliahan pun masih tersebar di banyak tempat, seperti rumah seorang dermawan di Jl. Siliwangi, ruangan di Masjid Agung At-Taqwa, sejumlah lokal di Jl. Samadikun No. 31, dan beberapa kelas

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

yang berada di sebuah bangunan berlantai dua di Jl. Toha No. 36, Cirebon. Meski dengan kondisi yang demikian itu, dua fakultas yang berafiliasi ke Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut tetap memiliki daya tariknya tersendiri di tengah masyarakat muslim yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya, sehingga setiap tahun terdapat puluhan pelajar sekolah menengah yang tetap mendaftar ke lembaga tersebut dan menjadi mahasiswanya.

Pasca turunnya suhu politik akibat kemunduran kaum komunis di Indonesia,⁸⁹ maka suhu pergumulan ideologi yang semula panas pun menjadi semakin mendingin. Bersamaan dengan kondisi itu, lembaga pendidikan tinggi Islam mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di Cirebon sendiri, geliat kemajuan pendidikan tinggi Islam tampak dengan munculnya kelas-kelas filial di sejumlah pesantren yang masyhur dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Pesantren yang mengupayakan kelas filial itu, di antaranya adalah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Pesantren Buntet. Namun karena persoalan administrasi yang tumpang tindih dan tidak tertib, akhirnya model kelas filial tersebut dihapuskan oleh pemerintah. Pada masa itu, Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon telah memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) dan Jurusan PBA (Pendidikan Bahasa Arab). Beberapa tokoh yang diketahui sebagai alumni dari kedua jurusan tersebut, antara lain: Mahmud Rohimi, Fakhrruraji, Sueb Kurdi, Sukanta, Matsna, Agus Al- Wafir dan lain-lain. Mereka tidak hanya menjadi tokoh pendidikan yang masyhur karena beberapa orang di antaranya bertransformasi lebih jauh sehingga berhasil menjadi guru besar dalam bidang keilmuannya masing-masing.

⁸⁹ Peristiwa G30S (Gerakan 30 September) yang terjadi pada 30 September dan 1 Oktober 1965, merupakan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Menurut sebagian besar orang, gerakan ini dimotori oleh kaum komunis Indonesia. Pasca kegagalan G30S, maka kelompok ini menjadi bulan-bulanan massa dan bahkan organisasi serta ideologinya dilarang oleh pemerintah yang diformalkan dalam peraturan resmi pemerintah.

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

Pelaksanaan perkuliahan pada masa-masa awal pasca penegerian lembaga, dipenuhi oleh jumlah mahasiswa yang melakukan pendaftaran, namun karena kelulusannya di tingkat akhir perkuliahan memakai sistem gugur maka banyak pula mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dengan baik hingga tidak mampu mencapai gelar BA (*Bachelor of Art*). Oleh karena itu, perjalanan perkuliahan memiliki kualitas yang sangat bagus. Kertas ujian memakai kode bukan nama, maka tidak aneh kalau ada saudara atau anak dosen yang tidak lulus dalam sebuah mata kuliah walaupun yang mengajar adalah saudara atau bahkan orang tuanya sendiri. Para dosen tidak bisa dengan mudah memberikan nilai A kepada mahasiswa, karena perhitungannya terukur. Karena iklim akademis yang terbilang berat sehingga sulit untuk mencapai kelulusan, maka diperlukan belajar bersama. Melalui pertemuan-pertemuan itu, kebersamaan para mahasiswa dan dosen dapat terbangun. Pada masa itu pula, para mahasiswa Fakultas Tarbiyah mampu mengikuti pertemuan intelektual dan berpartisipasi secara aktif bersama dengan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi besar lainnya, seperti UI (Universitas Indonesia), UNPAD (Universitas Padjadjaran), ITB (Institut Teknologi Bandung), dan IPB (Institut Pertanian Bandung).

Pada saat kampus Cirebon berafiliasi ke IAIN Al-Jami'ah Syarif Hidayatullah Jakarta, setidaknya terdapat tiga periode kepemimpinan di Fakultas Tarbiyah dan satu periode kepemimpinan di Fakultas Ushuluddin. Tiga pemimpin yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah adalah Prof. K.H. M. Taib Thahir Abdul Mu'in (1965-1972), Drs. H. O. Djauharuddin AR (1972-1975), dan Drs. Salim Umar, M.A. (1975-1977). Sedangkan di Fakultas Ushuluddin, satu-satunya sosok yang pernah menjabat sebagai pemimpinnya hanyalah H. Zaini Dahlan, M.A. Secara umum, keempat dekan tersebut menjalankan roda akademik perguruan tinggi Islam di Cirebon secara maksimal meskipun berada dalam kondisi yang serba situasional. Pola kepemimpinan seluruh dekan itu senantiasa mengedepankan mutu akademik yang

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

berkualitas, walaupun dengan keadaan fasilitas yang serba terbatas. Bahkan, dalam kesaksiannya, H. Zaini Dahlan, M.A. menyatakan kesederhanaan kehidupan yang dijalaninya saat ia berada di Cirebon. Meskipun demikian, seluruh dosen fakultas beserta para pejabatnya, tetap melaksanakan kegiatan akademik dengan penuh tanggung jawab tanpa memedulikan pelbagai kekurangan yang mendera kehidupan mereka.

Pada masa itu, moda transportasi masih sangat minim dan jarak dari rumah atau kontrakan dosen ke tempat mengajar yang relatif jauh ditempuh dengan sekadar berjalan kaki atau memakai sepeda bagi yang memilikinya. Tidak ada alat komunikasi yang mumpuni, namun perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui, selalu dapat ditepati jika tidak ada halangan yang berarti. Misalnya janji untuk bertemu guna tambahan jam belajar pada pukul 14.00 WIB antara dosen dan mahasiswa, maka tepat di waktu tersebut semuanya akan hadir di dalam kelas. Atau contoh lainnya adalah waktur rapat dosen yang dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB, maka seluruh pengajar akan mencatat waktu pertemuan itu dengan baik dan berusaha hadir tepat waktu di dalam kegiatan tersebut. Berbeda dari kondisi sekarang, yang dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi, namun malah membuat persoalan janji menjadi sulit untuk ditepati. Kesederhanaan dan keterbatasan civitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin cabang Cirebon pada saat itu, hampir merata dirasakan oleh semua dosen. Oleh sebab itu, meski memiliki ragam perbedaan latar belakang, baik daerah ataupun organisasi, pada umumnya mereka memiliki hubungan yang harmonis karena pada dasarnya mereka memiliki motivasi yang sama, nasib yang tidak jauh berbeda, dan rasa sepenanggungan untuk sama-sama mengabdikan pada negara dalam dunia pendidikan.

Keharmonisan tidak hanya terjadi di lingkungan bekerja di antara para dosen dan pegawai administrasi semata, namun juga terbangun dengan baik antara civitas akademika kampus dengan seluruh

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

stakeholders yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Hubungan yang baik itu bermuara pada terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) antara kampus dengan seluruh pihak berkepentingan yang ada. Sebagai contoh, ikatan yang harmonis antara dosen-dosen di kampus dengan pihak pesantren, membuat kedua belah pihak saling berkoordinasi dalam pelbagai macam acara guna meramaikannya. Dalam aktivitas itu, tampak para dosen mampu mensosialisasikan bidang keilmuan yang dikuasainya dengan baik pada masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, secara tidak langsung pihak kampus juga turut memiliki media promosi gratis yang memungkinkan mereka melakukan sosialisasi lembaga pendidikan tinggi Islam terhadap khalayak yang lebih luas di lingkungan pesantren di seluruh wilayah Cirebon dan sekitarnya. Jalinan komunikasi yang baik itu memiliki dampak yang positif, karena setelah itu animo masyarakat untuk menguliahkan anak mereka di kedua fakultas cabang Cirebon menjadi semakin tinggi. Tidak hanya itu, Sekolah Persiapan IAIN yang ada disana juga menjadi penuh dengan siswa-siswa yang mendaftarkan diri. Sekolah tersebut menjadi sekolah yang sangat diminati oleh para siswa, karena dengan menjalani pendidikan di lembaga itu mereka menganggap bahwa mereka memiliki gengsi dan kebanggaannya sendiri, di samping mempermudah proses pendidikan mereka untuk melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi.

Hubungan yang harmonis juga terjalin di antara pihak kampus dan pihak pemerintah. Selain karena memang terdapat peran aparatur pemerintahan daerah, baik dari kalangan eksekutif ataupun legislatif, di dalam penegerian dan pengembangan kampus cabang Cirebon, beberapa tokoh akademisi dari perguruan tinggi Islam itu memang sangat kompetitif sehingga sempat dijadikan sebagai anggota dewan karena kemampuannya. Beberapa pimpinan Fakultas cabang Cirebon yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan di antaranya adalah: H. Zaini Dahlan, M.A., Drs. O. Djauharuddin AR., dan H. Romli. Kiprah dan sepak terjang di bidang pemerintahan, tidak hanya memiliki azas *"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"*

kebermanfaatan bagi diri dan karir pribadi, namun juga memiliki manfaat yang lebih luas, khususnya bagi kampus cabang Cirebon. Karena dengan kedudukan itu, para pemimpin fakultas cabang di Cirebon mampu mengawali perintisan kepemilikan aset tanah bagi lembaga dan bahkan menghasilkan ruang kuliah yang akomodatif di Jalan Siliwangi dan juga menghadirkan mobil dinas untuk kepentingan operasional kampus. Walaupun aktif dalam bidang politik, para tokoh itu tidak lantas membawa nuansa politis mereka ke lingkungan kampus. Pada generasi paling awal kepemimpinan Fakultas cabang Cirebon tersebut, hubungan antar individu sangat hangat meskipun mereka memiliki latar belakang daerah dan organisasi yang berbeda.

Dalam perkembangannya, Fakultas Ushuluddin cabang Cirebon tidak mampu tumbuh sebagaimana halnya Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon, sehingga kemudian tampak adanya kesenjangan di antara kedua fakultas tersebut. Pada mulanya hal itu tidak terlalu dipikirkan oleh masing-masing civitas akademika kedua lembaga tersebut, namun pasca adanya perubahan peraturan pemerintah yang baru, pada akhirnya hanya ada satu fakultas yang akan dipertahankan sementara fakultas yang lainnya harus dihapuskan atau digabungkan kembali ke lembaga penyelenggaraan pendidikan pusatnya. Kebijakan pemerintah yang mendorong penghapusan Fakultas Ushuluddin cabang Cirebon didasari oleh adanya rasionalisasi jumlah IAIN di seluruh Indonesia sehingga pada akhirnya di tahun 1974, Fakultas Ushuluddin tidak lagi diperkenankan untuk menerima mahasiswa yang baru. Meski perjalanan fakultas ini terbilang relatif singkat, namun dalam praktiknya telah mampu menghasilkan alumni-alumni yang terbilang sukses dalam karir akademiknya seperti Drs. Djono, Drs. Effendi S. Umar, M.Ag, Prof. Dr. Abdullah Ali, dan lain sebagainya.

Setelah berjalan selama kurang lebih 11 tahun, Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon menginduk pengelolaannya ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pelbagai raihan telah berhasil dicapai lembaga untuk menahbiskan eksistensinya dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia.

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

Di tengah kondisi sarana dan prasarana yang masih sangat sederhana, Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon tetap mampu menghasilkan pelbagai prestasi yang luar biasa. Akan tetapi, sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976 tentang pemindahan pengindukan, maka Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon dan Fakultas Syariah Serang Banten yang semula berada di bawah koordinasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam hal pengelolaannya maka dipindahkan menjadi berada di bawah koordinasi IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Peraturan ini merupakan jejak kebijakan rasionalisasi jumlah perguruan tinggi Islam negeri di daerah dan penyesuaian pengelolaannya sehingga perlu dipusatkan di tingkat provinsi. Dalam hal ini, meskipun usia penegerian Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon lebih tua dari penegerian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, namun karena kedudukan kampus kedua itu berada di ibukota provinsi, maka mau tidak mau kampus pertama yang berada di daerah harus menginduk kesana.

B. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati cabang Cirebon

Hingga tahun 1976, lembaga pendidikan tinggi Islam milik negara di Cirebon berafiliasi ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena perguruan tinggi Islam itu memiliki kewenangan untuk mengkoordinir fakultas-fakultas di daerah yang tersebar di sejumlah tempat yang meliputi Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera. Namun karena adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya terkait rasionalisasi jumlah perguruan tinggi Islam negeri di suatu daerah, maka di tahun 1976 kampus Cirebon berubah status menjadi cabang IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Karena dua tahun sebelumnya Fakultas Ushuluddin cabang Cirebon telah dihapuskan, maka pada masa transisi tersebut yang ada tinggal Fakultas Tarbiyah. Dengan demikian, sejak tahun 1976 di Cirebon hanya ada satu perguruan tinggi Islam negeri, yakni Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati cabang Cirebon.

Sebetulnya, Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon berusia lebih tua ketimbang IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Karena status negeri kampus cabang Cirebon telah didapat di tahun 1965 sementara status negeri kampus IAIN Bandung baru ada pada tahun 1968. Lebih tepatnya, penegerian kampus yang kedua itu terjadi pada tanggal 8 April 1968 M yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1388 H melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 1968.⁹⁰⁵⁶ Namun karena lokasi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung berada di ibukota provinsi, maka pada saat pemberlakuan rasionalisasi satu daerah satu IAIN itu maka IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi pusat perguruan tinggi Islam negeri di Jawa Barat. Sementara kampus lain, seperti Fakultas Tarbiyah di Cirebon dan Fakultas Syariah di Serang, menjadi cabang dari kampus Bandung itu setelah sebelumnya berada di bawah koordinasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan demikian, kebijakan rasionalisasi yang digulirkan oleh pemerintah tahun 1976 mengantarkan Fakultas Tarbiyah di Cirebon menjadi fakultas cabang dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada masa transisi tersebut, Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon tengah dipimpin oleh Drs. Salim Umar, M.A. yang telah menjabat sebagai dekan ketiga sejak tahun 1975

M. Seiring dengan perubahan pengindukan pengelolaan, terjadi pula perubahan dalam sejumlah hal di internal lembaga. Salah satunya adalah perubahan sistem perkuliahan mahasiswa, yang dalam periode sebelumnya menggunakan sistem gugur dan kemudian berganti pada periode ini menjadi sistem perkuliahan SKS (Sistem Kredit Semester) yang secara umum digunakan pada kampus-kampus masa kini. Perubahan itu terjadi secara bertahap karena adanya penyesuaian yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika kampus terhadap kebijakan baru yang diberlakukan. Arah koordinasi yang ditempuh juga turut

⁹⁰ IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Kenang-Kenangan 20 Tahun IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1968-1988*, Bandung: Gunung Djati Press, 1988, hal. 41-42.

mengalami perubahan, dari Kota Jakarta menuju Kota Bandung. Dalam konteks ini, terjadi penyesuaian dalam pelbagai macam hal, tidak hanya soal moda transportasi namun juga soal hubungan lainnya.

Setahun setelah berubah pengindukan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung cabang Cirebon mengalami pergantian kepemimpinan. Drs. Salim Umar, M.A. yang sebelumnya menjabat, digantikan oleh Drs. H. Marzuki Dimiyati yang tampil sebagai dekan yang baru di fakultas cabang tersebut. Beliau merupakan seorang sosok pemimpin yang memiliki tingkat disiplin yang sangat tinggi, di samping sangat selektif karena selalu mempertimbangkan banyak hal dari pelbagai sudut pandang, dan pemberani karena siap menghadapi segala resiko yang ada ketika sudah memiliki suatu pegangan atau prinsip tertentu. Karakter kepemimpinannya tersebut, membawa iklim akademik di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Cirebon menjadi hidup dan menghasilkan mahasiswa yang sangat berkualitas. Namun meski demikian, ketegasannya terkadang membuat mahasiswa yang tidak mampu mengikuti kebijakannya menjadi kebingungan sekaligus frustrasi, seperti dalam hal pembelajaran dan ujian kemampuan interpretasi Al-Qur'an. Saat itu, beberapa mahasiswa yang tidak mampu mengikuti kebijakan tersebut, mengadu ke Departemen Agama. Sebagai solusi, Drs. H. Marzuki Dimiyati merumuskan kebijakan lain dengan pihak terkait, yang akhirnya lahirlah Tim Penguji Al-Qur'an yang bertugas mengurus para mahasiswa yang sulit mengikuti ketentuan tentang kemahiran mengkaji Kitab Suci Umat Islam tersebut. Pada masa ini, kemajuan akademik terdapat pada konsistensi seluruh elemen kampus untuk mendorong mahasiswa memiliki kemahiran, tidak hanya dalam membaca, namun juga menafsirkan Al-Qur'an.

Kebiasaan hidup dengan disiplin yang ketat tersebut tidak hanya ditampilkan dalam urusan akademik semata, namun juga tampak dalam kepemimpinannya dalam pengelolaan kampus di hadapan dosen dan karyawan. Ia senantiasa menegaskan agar seluruh pegawai

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Cirebon dapat menjadi suri tauladan bagi para mahasiswa, sehingga mereka disarankan untuk dapat melakukan sholat berjama'ah bersama, khususnya pada waktu shalat dzuhur dan ashar dimana pertemuan antara seluruh elemen kampus biasa terjadi. Dalam menyampaikan segala ketetapanannya itu, beliau terbiasa memulainya dengan memberi contoh. Oleh sebab itu, salah satu sudut shaf shalat di masjid kampus pasti ditempati oleh beliau yang mengisinya. Karena ketegasannya itu, tak jarang para mahasiswa yang menyebutnya sebagai dosen *killer*. Bagaimanapun, mengambil kebijakan yang tidak populer akan melahirkan resiko atau kesan yang kurang berkenan di mata mahasiswa seperti itu. Secara keseluruhan, kepemimpinan Drs. H. Marzuki Dimiyati berhasil memberi warna di dalam sejarah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada masa jabatannya, Drs. H. Marzuki Dimiyati berhasil membangun ikatan persaudaraan yang kental di tengah civitas akademika Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Cirebon. Kebersamaan yang tercipta di antara dosen, karyawan, dan seluruh pegawai, dilatarbelakangi oleh kondisi masing-masing pihak di internal lembaga yang saling merasa sepenanggungan. Jalinan hubungan harmonis dengan pihak eksternal, baik unsur pemerintahan ataupun lembaga pendidikan Islam lainnya, tetap terpelihara karena beliau menganggap bahwa sinergitas seluruh elemen masyarakat akan mampu menghadirkan lembaga pendidikan tinggi Islam yang lebih berkualitas.

Tidak hanya di internal kampus, karakter tegas dan penuh disiplin Drs. H. Marzuki Dimiyati tampak pula di dalam kehidupan keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau senantiasa mendorong anak-anaknya untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan rumah tangganya agar mereka terbiasa merasa memiliki tanggung jawab sehingga dalam kehidupan yang akan dijalannya nanti di masa depan, mereka dapat menjadi sosok yang mandiri dan tidak pernah bergantung kepada orang lain. Sholat dan aktivitas ibadah lainnya juga sangat ditekankan

"IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

oleh beliau kepada seluruh anggota keluarganya. Bagaimanapun, hal itu adalah wujud perhatian yang ia miliki terhadap seluruh anggota keluarganya. Pendidikan yang beliau tegakkan di internal keluarga, berjalan selaras dengan pendidikan yang beliau berlakukan di kampus yang dipimpinnya. Meski begitu, Drs. H. Marzuki Dimiyati menjalaninya dengan penuh keikhlasan karena seluruh kegiatan itu merupakan bagian dari kehidupannya.

Drs. H. Marzuki Dimiyati menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Cirebon selama kurang lebih 3 tahun, sejak tahun 1977 hingga tahun 1980. Di tengah kelebihan dan kekurangan yang ada, pelbagai prestasi telah beliau torehkan di masa kepemimpinannya. Jabatannya selama 3 tahun itu adalah periode pertama kepemimpinannya, karena satu dasawarsa kemudian, ia kembali tampil sebagai dekan dan hal itu merupakan periode kedua jabatannya dalam menjadi kepala pengelola Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon yang menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada tahun 1980, Drs. Muhaimin, M.Ag muncul sebagai dekan kelima Fakultas Tarbiyah cabang Cirebon menggantikan dekan sebelumnya. Beliau memimpin lembaga dengan penuh semangat sehingga berhasil membawa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Cirebon menjadi salah satu perguruan tinggi Islam yang diperhitungkan karena kepemimpinannya membawa perubahan tidak hanya dalam aspek akademik, namun juga aspek fisik. Dari pelbagai capaian yang ditorehkan, yang terpenting adalah perintisan pembelian tanah yang kelak menjadi pusat aktivitas kampus di Jalan Perjuangan, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Meski ruangan perkuliahan yang ada di sejumlah tempat masih berjalan, di tanah yang diproyeksikan sebagai kampus pusat itu telah dimulai perintisan pembangunan fasilitas yang diperuntukkan

bagi kegiatan pengelolaan, kegiatan belajar dan mengajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Cirebon.

Pada periode pertama kepemimpinannya, Drs. Muhaimin, M.Ag masih memimpin lembaga dari kantor yang bukan hak milik Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Cirebon. Kelas perkuliahan pun masih tersebar, baik yang berada di sebuah rumah di Jl. Siliwangi, ruangan di Masjid Agung At-Taqwa, sejumlah lokal di Jl. Samadikun No. 31, dan beberapa kelas yang berada di sebuah bangunan berlantai dua di Jl. Toha No. 36, Cirebon. Kondisi yang demikian itu kemudian mendorong Drs. Muhaimin, M.Ag untuk mewujudkan ruangan belajar yang akomodatif dan memadai. Setelah berkonsultasi dengan Departemen Agama (kini Kementerian Agama) dan menyampaikan kebutuhan ruang kelas yang mendesak tersebut, akhirnya dikeluarkanlah anggaran dari pemerintah untuk menyediakan lahan yang kini telah menjadi pusat aktivitas kampus yang berada di Jalan Perjuangan. Meskipun lahan itu dulunya adalah tempat yang sepi dan banyak ditumbuhi oleh pohon palem serta terbilang angker, namun kini telah berubah dan menjadi salah satu kawasan pendidikan yang terpenting di wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Komunikasi baik yang terjalin di antara pejabat kampus dengan pejabat pemerintahan daerah, baik di tingkat Kabupaten Cirebon ataupun Kota Cirebon, membuat hubungan di antara kedua belah pihak menjadi sangat akrab. Bahkan, Kampus Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Cirebon saat itu, menjadi tempat yang seolah “kerasan” bagi para pemangku kebijakan pemerintah daerah karena mereka seringkali datang dan bersilaturahmi dengan pimpinan fakultas. Meskipun kantor dekan dan kampus cabang Cirebon terbilang tidak terlalu bagus pada masa itu, namun para pemimpin pemerintahan daerah itu tidak segan untuk bercengkerama disana. Sebut saja misalnya Sekda Kabupaten dan Bupati Cirebon yang saat itu dijabat oleh Bapak Kholas Santoso dan Gunawan Bratasasmita. Begitu juga dengan Sekda dan Walikota Cirebon yang pada masa itu dijabat

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

oleh Bapak Jatmo Prawiro dan Bapak Dasa Warsa. Kedekatan yang positif dengan para penentu kebijakan di tingkat daerah maupun pusat memuluskan transaksi pembelian tanah untuk pembangunan kampus yang baru di Jalan Perjuangan yang pada masa itu masih sangat sepi namun lokasinya diperebutkan banyak pihak untuk dimiliki. Selain itu, fakultas juga mendapatkan fasilitas berupa mobil dan rumah dinas yang dibangun di kompleks kampus dengan harapan bisa fokus dalam mengurus kampus.

Selain itu, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon juga menjalin hubungan yang sangat harmonis dengan kalangan pesantren di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kedua belah pihak terikat dalam hubungan simbiosis mutualisme karena kampus tidak hanya menyediakan tenaga pengajar yang sangat dibutuhkan oleh dunia pesantren, namun juga menjadi opsi bagi para santri yang kelak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sementara bagi kampus, pesantren tidak hanya menjadi sumber dukungan paling potensial bagi pengembangan fakultas namun juga menjadi sumber input yang sangat besar untuk pendaftaran mahasiswa yang hendak belajar disana. Terlebih kepribadian Drs. Muhaimin, M.Ag yang sangat supel, membuat hubungan itu menjadi sangat terjaga. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cabang Cirebon itu terbilang humoris, pandai menyusun kata-kata yang diksinya tepat dengan kalimat yang rapi. Penyampaiannya pun memikat karena ia seperti seorang orator ulung yang memiliki daya tariknya sendiri terhadap para pendengar. Di samping itu, kemampuannya dalam mengorganisir dosen dan karyawan juga terbilang baik sehingga kampus tampak berkembang secara dinamis karena beliau dapat menggerakkan seluruh potensi yang ada di internal lembaga yang dimotorinya.

Dengan diterbitkannya SK Menteri Agama RI NO. 65/1982, maka status Cabang IAIN Cirebon dihilangkan. Kemudian dengan SK Menteri Agama RI No. 69/1982 status fakultas ditingkatkan dari Fakultas Muda *"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"*

menjadi Fakultas Madya, sehingga dapat menyelenggarakan perkuliahan sampai program sarjana yang mulai dibuka pada tahun akademik 1982/1983. Berdasarkan peningkatan status tersebut, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon sejak tahun akademik 1982, diperkenankan membuka perkuliahan program sarjana untuk jurusan Pendidikan Agama (PAI) dan jurusan Bahasa Arab (PBA). Kemudian pada tahun akademik 1983/1984, mengingat besarnya minat masyarakat pelajar dari berbagai latar belakang pendidikan untuk mendaftarkan diri pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon, maka dibukalah jurusan Tadris dengan sub jurusan IPS. Selanjutnya tahun akademik 1984/1985 dibuka sub jurusan Bahasa Inggris. Pembukaan jurusan tadris secara nasional di Masa Menteri Agama Jenderal Alamsyah Ratu Perwira Negara sebagai sebuah kebijakan politis dan taktis di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yoesoef menolak keras pembukaan jurusan biologi dan ilmu-ilmu umum di Perguruan Tinggi Agama Islam, sehingga terjadi kemudian rivalitas antar dua departemen, sementara mata pelajaran yang ada di MTs dan MA sebagai sebuah sekolah umum bercirikan khas islam banyak kandungan mata pelajaran umumnya. Dengan demikian, jalan keluarnya adalah dengan membuka jurusan- jurusan umum di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri termasuk di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Cirebon. Guru-guru alumni Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri mampu berintegrasi ilmu dengan agama, tidak mungkin diambil dari pendidikan umum. Idealnya Fakultas Tarbiyah berekspansi membuka jurusan fisika dan kimia.

Dalam bidang akademik di masa kepemimpinan Drs. Muhaimin, M.Ag, terjadi pengembangan yang berarti, karena praktikum mengajar bagi mahasiswa akhir sudah bisa ditempatkan di MA dan SMA yang ada di sekitar Cirebon. Tidak hanya itu, terjadi pula pembukaan pendidikan doktoral (sarjana) yang mana tokoh-tokoh yang termasuk dalam

program ini adalah (alm.) Prof. Dr. Maksun Mochtar dan (alm.) Prof. Dr. Imron Abdullah. Program ini dapat diwujudkan melalui 'Deklarasi Gontor Ponorogo' yang isinya adalah pernyataan mahasiswa yang sudah mencapai gelar (BA) untuk dapat melanjutkan program doktoral (sarjana). Surat yang mereka bubuhi tanda tangan itu menjadi senjata ampuh untuk membuka program doktoral, karena setelahnya Departemen Agama Republik Indonesia pada akhirnya menyetujui dan memberikan izin penyelenggaraannya.

Pada masa kepemimpinan Drs. Muhaimin, M.Ag, terbentuk pula pengajian rutin bulanan 'Nurjati' yang dipelopori oleh Drs. Maman Supriatman yang dibantu oleh Drs. Adang Djumhur, Drs. Imron Abdullah, dan Drs. Maksun Mochtar. Nama Nurjati telah dipakai jauh sebelum penamaan IAIN yang diambil dari Kitab Purwaka Caruban Nagari, pengisi materi dalam pengajian ini adalah tokoh-tokoh terkenal nasional seperti: Amien Rais, Djalaludin Rakhmat, Cak Nur, dan Gus Dur yang menjadi moderator Pak Ahmad Tafsir. Sementara pengajian untuk anak-anak remaja bulanan diadakan di Masjid At- Taqwa. Hal yang patut dibanggakan pada masa ini adalah penerbitan Jurnal Pendidikan lektur yang dieketuai oleh Drs, Maman Supriatman dengan redaktornya Drs. Affandi Mochtar hingga terakreditasi dengan nilai yang sangat memuaskan A. Obsesi untuk menjadikan jurnal terdepan dalam hal pendidikan tercapai. Keharuman Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon bertambah lagi dengan sosok pribadi Prof. Dr. H. Muhaimin, M.Ag yang dipercaya untuk memberikan ceramah agama di berbagai tempat, di antaranya Seskoad, DPRD Jawa Barat, Kowiltabes Yogyakarta bahkan ke Malaysia.

Periode selanjutnya dipimpin oleh Drs. H. Syafiyuddin Mudjahid (1987-1990) yang memiliki dedikasi untuk memajukan FT dengan melanjutkan apa yang dirintis pada masa sebelumnya walaupun mengalami kendala karena beliau sakit-sakitan. Pada masa

ini, terjadi perubahan dalam bidang akademis, khususnya terkait jurusan tadaris. Berdasarkan hasil pertemuan Rektor IAIN seluruh Indonesia tanggal 01 Maret 1989, dengan pertimbangan bahwa jurusan tadaris sebagai *Cash Program* dan diperkirakan sudah memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah Departemen Agama, maka mulai tahun akademik 1989/1990 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon tidak lagi diperkenankan untuk menerima mahasiswa baru jurusan *tadaris*. Meski dengan kondisi demikian, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon tetap menjalankan peranannya untuk membentuk sarjana-sarjana muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan cakap, serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan umat dan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia, di samping melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam serta mengaplikasikannya bagi perkembangan budaya dan pembangunan masyarakat. Terlebih sejak keluarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun

1990 tentang Pendidikan Tinggi, maka kedudukan dan status Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon secara kelembagaan menjadi lebih kuat dari sebelumnya.

Pada tahun 1990, Drs. H. Marzuki Dimiyati kembali menjadi dekan setelah sebelumnya menjadi Wakil Dekan I di masa kepemimpinan Drs. H. Syafiyuddin Mudjahid. Pada periode kedua kepemimpinannya, Drs. H. Marzuki Dimiyati mengembangkan sejumlah bidang yang berkaitan satu sama lain, yang di antaranya adalah:

1. Bidang Pendidikan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan di IAIN Sunan Gunung Djati ialah SKS (Sistem Kredit Semester) dengan Program S1. Kurikulum yang dipergunakan ialah kurikulum berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 122 tahun 1988. Kegiatan perkuliahan terdiri dari tatap muka terjadwal, kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik mandiri. Sedangkan

evaluasi tiap semester berdasarkan kepada ketiga kegiatan akademik tersebut dengan bobot yang lebih besar pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dosen, IAIN Sunan Gunung Djati selalu berusaha untuk mengirimkan mereka mengikuti berbagai kegiatan seperti: penataran, seminar, diskusi ilmiah, lokakarya. PLPA (Program Latihan penelitian Agama), PLPIIS (Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial), SPS (Studi Purna – Sarjana), Pasca Sarjana dan Program Doktor, baik dalam Negeri maupun luar negeri. Untuk menunjang cita-cita dan tujuan IAIN, kegiatan mahasiswa dikembangkan melalui program-program yang meliputi bidang penalaran dan intelektual, minat bakat dan pengabdian pada masyarakat serta kesejahteraan mahasiswa. Organisasi mahasiswa yang telah dibentuk yaitu Resimen Mahasiswa Fakultas, Pramuka, Mahapeka, Senat Mahasiswa Fakultas, himpunan-himpunan mahasiswa Jurusan, seperti: Hima PA, Hima PAI, Himaba.

2. Bidang Penelitian. Sasaran penelitian yang dilaksanakan IAIN Sunan Gunung Djati ialah agama dan kemasyarakatan yang menjadi bidang garapan IAIN, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian murni dan terapan sebagai bahan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam dan bahan Penyusunan kebijakan dalam pembangunan nasional.
3. Pembinaan Organisasi dan Manajemen. Struktur IAIN Sunan Gunung Djati berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 22 tahun 1988. Dalam upaya menciptakan koordinasi dan fungsionalisasi mekanisme kerja serta tata administrasi diterapkan pola administrasi penyusunan perincian kerja bagi kebutuhan teknis pelaksanaan tugas-tugas administrasi. Untuk mengembangkan tenaga administrasi IAIN mengikuti latihan-latihan seperti Suscatur, Suscata, Sepada, Sepala, Sepadia, dan Sespa.

4. Pembinaan Sarana. Dari tahun ke tahun ditingkatkan pembangunan sarana fisik berupa areal kampus pembangunan gedung-gedung. Saat ini areal kampus yang telah dimiliki di Cirebon 2,5 Ha. Bangunan yang telah dimiliki di samping ruang kuliah dan kantor antara lain: Laboratorium Bahasa, Perpustakaan, Masjid, Aula, dan perumahan dinas.
5. Program Study/Perkuliahan. Program S1, 4-7 tahun, lulusan bergelar Sarjana (Doktorandus).
6. Profesi/Lapangan Kerja. 1) Sarjana dari lulusan PAI memiliki keahlian dalam bidang PAI pada STMA dan PT; dan 2) Sarjana dari Pendidikan Bahasa Arab (BA) memiliki keahlian Bahasa Arab pada SMTA dan PT. Sesuai dengan keahlian di atas lapangan kerja untuk lulusan Fakultas Tarbiyah adalah pada lingkungan Departemen Agama maupun lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga-lembaga sosial dan pendidikan lain yang memerlukannya. Menurut hasil penelitian tentang kebutuhan guru agama di Jawa Barat saja masih banyak diperlukan, dengan hasil perbandingan jumlah sekolah yang ada dengan guru agama yang tersedia, khususnya bagi sekolah lanjutan dan perguruan tinggi umum. Dengan demikian, para lulusan fakultas tersebut masih sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru agama.
7. Alumni Fakultas Tarbiyah. Sampai sekarang Fakultas Tarbiyah Cirebon telah menghasilkan 1490 orang sarjana. Sebagian besar telah menempati pekerjaan sesuai dengan profesinya.

Dilihat dari tugas dan profesi IAIN serta misi Departemen Agama, maka aspek- aspek ekologis dan sosio-kulutral pedagogis masyarakat Indonesia merupakan kekayaan yang terpendam yang menggairahkan bagi objek penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu agama serta pematangan tenaga-tenaga ahli yang dicetak oleh IAIN.

Begitu juga kepemimpinan selanjutnya, yaitu kepemimpinan Drs. H. Tauhid (1994-1997), Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung

Djati Cirebon berusaha untuk melakukan kemajuan dengan melestarikan apa yang sudah tercapai. Ada tiga macam kelas/sip perkuliahan di masa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon, yaitu:

1. Kelas Reguler I, perkuliahannya seperti biasa.
2. Kelas Reguler 2, perkuliahannya di waktu sore.
3. Kelas Non-Reguler, perkuliahannya diadakan pada hari Jum'at hingga Ahad pada sore harinya.

Dari ketiga macam kelas/sip ini, Nampak sekali kesibukan mengajar dan ampus tidak pernah sepi dari perkuliahan. Mahasiswa sangat banyak namun yang dilaporkan ke Bandung hanya mahasiswa yang masuk kategori Kelas Reguler 1 dan 2 karena mahasiswa kelas non-reguler pengelolaannya dilakukan secara otonom oleh fakultas cabang. Bagaimanapun, pelbagai tindakan itu merupakan wujud partisipasi lembaga dalam pembangunan menurut profesinya, terutama dalam memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam pelbagai bidang, seperti pendidikan agama di sekolah-sekolah, penyuluhan dan penerangan agama serta bimbingan keagamaan kepada masyarakat, pembinaan kehidupan beragama pada masyarakat dan pengetahuan potensi umat beragama bagi pembangunan, pengisian tenaga-tenaga ahli untuk peradilan Agama, dan pembinaan serta pengembangan kebudayaan Islam pada masyarakat Indonesia yang religious dan telah memiliki peadaban luhur.

Proses panjang yang dijalani oleh lembaga ini sejak perubahan statusnya di tahun 1965 hingga tahun 1997, merupakan periode penyesuaian baik dalam hal akademik ataupun pengelolaannya. Karena selama kurun waktu tersebut, terjadi pelbagai macam perubahan yang tidak selalu tetap, yang meskipun sempat membingungkan para pelaksana di tingkat daerah, namun akhirnya berhasil dilaksanakan pada proses selanjutnya. Pada penghujung proses penyesuaian tersebut, Drs. H. Tauhid menahkodai perubahan lembaga dari yang

semula merupakan fakultas cabang menjadi sebuah sekolah tinggi yang mandiri. Tidak jauh berbeda dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) juga menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai program studi dan menyediakan jurusan-jurusan *tarbiyah*, *syari'ah*, *dakwah*, *ushuluddin*, dan *adab*. Di samping menyelenggarakan jenjang pendidikan Sarjana (S1), STAIN juga dapat menyelenggarakan program pendidikan D2, D3, program Akta IV, dan bahkan Program Pascasarjana. Dengan demikian, berdirinya STAIN Cirebon memberikan kesempatan yang lebih luas dan leluasa bagi para lulusan sekolah tingkat menengah (SMA dan MA) di wilayah III Cirebon dan sekitarnya (termasuk Brebes, Tegal, Subang, Karawang, Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut) untuk memasuki lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di wilayahnya sendiri dalam berbagai program studi atau kajian yang diminati, yang tidak lagi terbatas pada satu jurusan yakni jurusan *tarbiyah* (kependidikan). Sejak diangkatnya ketua definitif yang baru pada tanggal 7 Januari 1998, maka fakultas cabang yang telah menjadi STAIN Cirebon itu terus melakukan pembenahan dan senantiasa menyusun strategi serta langkah-langkah di segala bidang yang memiliki landasan sesuai dengan semangat awal mula pendiriannya di masa lalu.⁹¹

⁹¹ Ibid., , hal. 28

BAB V

PERIODE PEMANTAPAN KELEMBAGAAN, 1997-2009

A. Perintisan Awal Otonomi Kelembagaan

Pada paruh kedua tahun 1990-an, perkembangan sosial dan politik terjadi begitu cepat, sebelum kemudian memuncak pada tahun 1998 yang bahkan berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari kedudukannya sebagai pemimpin Republik Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, pelbagai perubahan tampak jelas terlihat di dalam banyak bidang, termasuk dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Departemen Agama (sekarang menjadi Kementerian Agama) merasa perlu untuk melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang berada di dalam pengelolaannya, menyusul adanya wacana kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan terbaru yang bisa saja mempersulit atau bahkan menghapuskan kedudukan seluruh lembaga keagamaan tersebut. Hal itu merupakan sesuatu yang ditakutkan oleh banyak pihak, khususnya kalangan umat Islam. Oleh sebab itu, Departemen Agama di bawah koordinasi Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar, mengambil langkah strategis dengan mendorong pemegang otoritas dan regulasi untuk memberikan rasionalisasi dan otonomi terhadap pelbagai perguruan tinggi Islam yang tersebar di banyak daerah.

Terkait kebijakan tersebut, Departemen Agama melakukan pelbagai langkah strategis untuk memajukan perguruan tinggi yang ada dalam lingkungan kerjanya dengan dua cara. *Pertama*, rasionalisasi perguruan tinggi. Karena ada sejumlah lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki beberapa fakultas di dalam satu daerah, maka perlu penyatuan atau peleburan guna penguatan internal kelembagaan perguruan tinggi itu sendiri. Di Jawa Barat misalnya, IAIN Sunan

"IAIN Sykeh Nurjati Cirebon Dalam Alur Dinamika Sejarah (1965-2021)"

Gunung Djati Bandung memiliki dua fakultas Tarbiyah (di Bandung dan Cirebon) dan dua Fakultas Syari'ah (di Bandung dan Serang), yang setelah tahun 1997 dihapuskan. *Kedua*, otonomi kelembagaan. Di samping penyatuan dan penghapusan lembaga karena adanya rasionalisasi, pemerintah juga memberikan kesempatan otonomi terhadap perguruan tinggi yang memiliki ketercukupan dalam hal segala sumber daya yang diperlukan. Hal itu menjadi penting karena banyak fakultas cabang di seluruh Indonesia, yang pada masa itu memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Tidak hanya dalam hal sarana dan prasarana, namun juga dalam kualitas pendidikan, dan sumber daya manusia yang mengelolanya.

Untuk mengeksekusi kebijakan tersebut, Departemen Agama melakukan pemantauan terhadap lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam, dan kemudian menganggap beberapa di antaranya yang memenuhi segala persyaratan untuk ditetapkan sebagai lembaga yang otonom dan dipisahkan dari lembaga induknya. Sebagai bagian dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Cirebon merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kesiapan untuk menerima kebijakan tersebut. Beberapa pertimbangan yang turut mendorong kebijakan otonomi terhadap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Cirebon adalah: 1) Kenyataan bahwa lembaga itu merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Jawa Barat bagian timur dengan mahasiswa yang tidak terbatas dari wilayah tiga Cirebon, melainkan juga Karawang, Bekasi, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, dan Brebes; 2) Memiliki daya tarik yang kuat sehingga membuat minat pelajar tinggi terhadap lembaga tersebut; 3) Kesiapan fasilitas, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap; dan 4) Adanya dukungan banyak pesantren yang tersebar di wilayah Cirebon.

Secara internal kelembagaan, Drs. H. Tauhid selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Cirebon, dapat

menyambut perubahan dengan baik. Sarana dan prasarana kampus telah sejak lama dikembangkan, dan gedung rektorat pun sedang dalam pembangunan. Tidak hanya itu, dengan kemauannya yang keras, beliau mendorong pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia kampus. Ia menyadari bahwa fakultas yang dipimpinnya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi jika dosen-dosen yang menjadi pengajar di dalamnya turut melibatkan diri dalam perubahan dan terus mengembangkan diri yang salah satunya melalui melanjutkan studi. Oleh karena itu, sejak jauh-jauh hari, Drs. H. Tauhid memberikan banyak motivasi para dosen untuk studi lebih lanjut, dan bahkan turut membantu pembiayaan pendidikan beberapa di antaranya yang berasal dari dana pribadi yang dimilikinya. Melalui kebijakan- kebijakannya, Drs. H. Tauhid secara tidak langsung telah menyiapkan lembaga untuk menerima perubahan yang terjadi.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon dibentuk bersama 32 sekolah tinggi lainnya yang tersebar di banyak daerah. Meski secara tertulis di dalam peraturan itu nomenklaturnya adalah “pendirian”, sebetulnya sekolah-sekolah tinggi itu banyak yang sudah eksis sejak jauh sebelum tahun 1997 dengan nama atau bentuk lembaga yang berbeda. STAIN Manado dan STAIN Batusangkar misalnya, keduanya adalah perguruan tinggi yang sudah eksis sejak beberapa dasawarsa sebelumnya sebagai fakultas cabang dari perguruan tinggi keagamaan yang ada di pusat daerah masing-masing. Apabila STAIN Manado berkembang dari Fakultas Syari’ah IAIN Alauddin (sekarang UIN) Makassar yang berasimilasi dengan Institut Agama Islam (IAI) Manado, maka STAIN Batusangkar tumbuh dari metamorfosa Fakultas Tarbiyah yang merupakan cabang IAIN Imam Bonjol Padang di Batusangkar.

Kondisi yang tidak jauh berbeda, terjadi juga dengan STAIN Cirebon. Sekolah tinggi ini merupakan lembaga yang sebetulnya hanya

berubah bentuk dari status kelembagaan sebelumnya yang merupakan fakultas cabang dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Oleh sebab itu, pada saat kebijakan ini telah bergulir, lembaga pendidikan tinggi itu sudah cukup baik kondisinya dan kepemimpinannya masih dikelola oleh pejabat yang lama. Dalam hal ini, Drs. H. Tauhid yang pada periode sebelumnya merupakan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung cabang Cirebon, kembali ditunjuk sebagai Ketua STAIN yang baru meskipun kedudukannya hanya sebagai pejabat sementara. Dalam proses alih status, dari fakultas cabang menuju otonomi lembaga menjadi STAIN Cirebon, kedudukan Drs. H. Tauhid sebagai Pejabat Sementara Ketua STAIN dikukuhkan oleh ketetapan formal berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. E/125/1997 tanggal 24 Juni 1997. Di waktu yang mendesak, karena beliau menjabat dalam jangka waktu yang pendek yaitu selambat-lambatnya enam bulan, Drs. H. Tauhid bisa mengondisikan lembaga pada masa transisi dan hasil kerja terbaiknya adalah mengantarkan STAIN Cirebon memiliki ketua definitif, beserta struktur pejabat pembantu-pembantunya dalam lembaga.⁹²

B. STAIN Cirebon dan Pengembangan Awal Lembaga

Penetapan ketua definitif di lingkungan STAIN Cirebon, dilakukan pada tanggal 7 Januari 1998. Pejabat yang diangkat sebagai pemimpin lembaga itu adalah Drs. H. Djono yang pada periode kepemimpinan sebelumnya merupakan Pembantu Dekan II. Kenaikannya sebagai Ketua STAIN Cirebon yang pertama, dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No: B.II/3/7467/1998. Surat itu memiliki landasan Surat Men-Pan No: B-589/1/1997 tanggal 13 Juni 1997 yang dikuatkan oleh Pertimbangan Baperjakat Depag Nomor B.II/1-a/Kp.07.06/194/1998 tanggal 17 April 1998.

⁹² Tim Penulis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, *Kenangan Wisuda Sarjana: 28 Agustus 1999*, (Cirebon: STAIN Cirebon, 1999), hal. 35

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan, lembaga yang baru itu diharuskan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: a. Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua; b. Senat STAIN; c. Unsur Pelaksana Akademik: Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laboratorium/studio, dan Kelompok Dosen; d. Unsur Pelaksana Administratif: Bagian; dan e. Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis.⁹³ Dengan landasan ini, ditetapkanlah susunan kelembagaan yang disesuaikan dengan

pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti kapasitas dan kemampuan akademis yang dimiliki. Sebagai contoh, unsur atau lembaga penunjang yang berupa Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), dibentuk dan dikepalai oleh Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A., yang memiliki keahlian dalam bidang riset.

Dengan pengalaman yang dimiliki pada masa-masa sebelumnya, Drs. H. Djono mulai menata lembaga dengan langkah-langkah yang strategis. Pembenahan yang dilakukan, disusul dengan penyesuaian strategi yang dapat membawa lembaga ke arah yang lebih baik dan maju. Bagaimanapun, pembentukan STAIN Cirebon memberikan kesempatan yang lebih luas dan leluasa bagi para lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Madrasah Aliyah (MA) di wilayah III Cirebon dan sekitarnya (termasuk Brebes, Tegal, Subang, Karawang, Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut) untuk dapat mendaftarkan diri dan masuk ke lembaga Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) yang memiliki jarak lebih dekat karena berada di wilayahnya sendiri. Para calon mahasiswa juga memiliki kebebasan untuk memilih program studi yang mereka minati untuk melakukan pendalaman studi, karena STAIN Cirebon menyediakan pelbagai peminatan program kajian yang tidak terbatas hanya pada Jurusan Tarbiyah (kependidikan) namun memiliki lebih banyak variasi pilihan peminatan.

⁹³ Lihat ketentuan ini dalam Pasal 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Presiden Republik Indonesia

Kebijakan men-STAIN-kan fakultas daerah, yang dimana salah satunya adalah fakultas yang ada di Cirebon, memiliki implikasi langsung pada bentuk kemandirian lembaga. Dengan kata lain, segala pengelolaan atau pengaturan perguruan tinggi menjadi lebih merdeka karena telah dilepaskan dari induknya. Hal itu dilakukan dengan harapan agar lembaga yang telah memiliki otonomi tidak hanya bisa berkembang secara maksimal, namun maju secara strategis dengan ciri khas atau karakteristik unik yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Di samping itu, kebijakan pendirian STAIN juga memiliki dampak pada hubungan struktur dan koordinasi lembaga, karena sejak saat itu fakultas yang ada di Cirebon tidak lagi terikat pada induknya di Bandung namun mampu berhubungan secara langsung dengan Kementerian Agama RI di Jakarta pusat regulator yang membawahi seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia.

Sejak tahun 1997, kemandirian dalam mengembangkan Perguruan Tinggi Islam di Cirebon telah menjadi sebuah kenyataan. Namun meski kebijakan itu telah membawa banyak kebaikan, dalam beberapa hal sempat membuat kerumitan bagi para pegawai saat melakukan pengelolaan kelembagaan. Pada masa transisi itu, hal yang paling rumit adalah perubahan nomenklatur perguruan tinggi dan pengaruhnya terhadap pelbagai kegiatan administratif, seperti kegiatan korespondensi lembaga, pengurusan surat-surat di unit kemahasiswaan dan dosen, serta penegasan status ijazah yang mesti disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Dalam kasus yang terakhir, kerumitan juga terjadi dalam hal teknis karena ijazah pada masa sebelumnya baru dapat diambil setelah adanya sidang dan perbaikan skripsi, sementara pada masa transisi itu ijazah sudah dapat diambil setelah sidang dilakukan oleh mahasiswa meskipun tanpa melakukan perbaikan terhadap tugas akhirnya. Kondisi penyesuaian dan perbaikan terkait pelbagai macam masalah, termasuk persoalan

ijazah, cukup memusingkan para pengelola lembaga hingga memakan waktu yang relatif lama.

Pada saat menjadi Ketua STAIN Cirebon, Drs. H. Djono berkesempatan mengikuti kursus pengelolaan kepemimpinan (*leadership management*) yang penyelenggaraannya diinisiasi oleh Kementerian Agama yang disokong McGill University, Kanada. Program itu terbilang sebagai program unggulan kementerian dan bertaraf internasional, karena pelaksanaan kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk memberi apresiasi dan membekali pemimpin lembaga pendidikan tinggi Islam, namun sekaligus memberi motivasi dan dorongan agar setiap pemimpin dapat memiliki dedikasi untuk pengembangan perguruan tinggi, sehingga lembaga yang dipimpinnya tidak pernah tertinggal dan malah mampu bertransformasi menjadi salah satu perguruan tinggi tingkat dunia. Kegiatan *leadership management* itu banyak memengaruhi cara pandang Drs. H. Djono terhadap segala hal yang dihadapinya saat menduduki kursi Ketua STAIN Cirebon.

Drs. H. Djono menganut sistem terbuka dalam periode kepemimpinannya. Beliau tidak hanya bergerak sendiri dan memutuskan suatu perkara secara otoriter, namun turut melibatkan peran para dosen untuk ikut menentukan dan memutuskan kebijakan kampus secara demokratis. Kebijakan ini memiliki dasar pemikiran bahwa pelbagai kegiatan yang berlangsung di kampus merupakan aktivitas yang ditujukan untuk kepentingan bersama, sehingga perumusan dan eksekusinya pun harus dilakukan secara demokratis agar menyerap pelbagai macam usulan yang ada. Dalam menjalankan roda kepemimpinan STAIN Cirebon, Drs. H. Djono berhasil memfungsikan para pembantu/wakil ketua sesuai dengan bidangnya masing-masing. Beliau mendelegasikan pelbagai tugas yang tidak dapat dilakukannya, kepada seluruh bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kompetensinya masing-masing. Hal itu mesti beliau

lakukan, agar seluruh aktivitas kampus dapat berjalan dan beroperasi secara optimal.

Mengingat bahwa organisasi dapat berjalan dengan baik apabila seluruh elemen kelembagaan berfungsi secara optimal, maka Drs. H. Djono senantiasa membina hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh pegawai, baik itu pejabat struktural ataupun pekerja fungsional, baik staff pengajar ataupun tenaga kependidikan. Hal itu beliau lakukan dengan mengunjungi ruang-ruang kelas dan jurusan, dan membangun komunikasi dengan seluruh komponen lembaga. Dalam proses interaksi itu, Drs. H. Djono mendapat banyak saran dan masukan, tidak hanya untuk kepengimpinannya namun juga untuk pengembangan STAIN Cirebon guna melangkah ke arah yang lebih maju dan menjadikannya sebagai salah satu perguruan tinggi yang unggul. Karena kebiasaannya turun ke bawah tersebut, beliau dapat melihat segala kekurangan dan kelebihan lembaga secara faktual dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dalam melakukan tugas terpentingnya sebagai pengambil kebijakan publik (*public policy*) dalam struktur kelembagaan.

Dalam hal sarana dan prasarana, Drs. H. Djono berupaya untuk mengembangkan STAIN Cirebon. Ia menyadari bahwa kemajuan yang diidamkannya tidak akan mungkin dapat direngkuh apabila ia tidak segera melakukan gebrakan di dalam masa kepengimpinannya. Koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan, tidak hanya dipertahankan, namun juga kemudian ditambah dan diperlengkap dengan koleksi yang lebih bervariasi. Terkait hal ini, buku-buku berbahasa Arab dan Inggris merupakan literatur tambahan yang sangat diperhatikan oleh Drs. H. Djono karena hal itu ia anggap sebagai sarana yang dapat mengantarkan civitas akademika STAIN Cirebon semakin maju ke taraf internasional. Sedangkan dalam hal prasarana, kepengimpinannya juga berhasil membuat lembaga itu mendapatkan lahan tambahan untuk kegiatan kampus berupa tanah seluas 2420 meter persegi secara

formal. Sebidang tanah kosong yang menurut keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tanah Swapraja Kasepuhan yang kemudian diakuisisi negara berdasarkan kebijakan yang berlaku pada tahun 1961 dan 1964, agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal, pada akhirnya, lahan itu sejak tahun 1987 sudah diproyeksikan sebagai lahan untuk kepentingan pendidikan. Pada 23 Juni 1998, tanah yang berada dalam Lembar 14 Kotak C-d, 3-4 Kelurahan Karyamulya itu akhirnya bersertifikat atas nama STAIN Cirebon (tertulis Departemen Agama Cq. IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon yang saat itu dijabat oleh ling Marso'i, B.A.

Setelah berjalan selama lebih dari empat tahun, kepemimpinan Drs. H. Djono akhirnya berakhir pada awal tahun 2002. Beliau berhasil menorehkan sejarah awal pengembangan STAIN Cirebon sebagai sebuah lembaga yang otonom. Pada masa jabatannya itu, Drs. H. Djono mampu membangun lembaga, tidak hanya secara fisik namun juga secara akademik. Meski demikian, saat kepemimpinannya berakhir, beliau tidak berniat untuk kembali mengajukan diri sebagai Ketua STAIN Cirebon yang baru. Pertimbangan terbesar keputusannya itu adalah motto yang ia jadikan sebagai prinsip kehidupan, yaitu: "tidak lupa untuk kembali berdiri, setelah duduk nyaman dalam sebuah posisi". Dengan adanya sosok pemimpin yang baru, ia berharap agar beban amanah yang terlalu besar itu dapat dipikul dengan lebih baik sehingga mampu mengantarkan STAIN Cirebon menjadi lembaga pendidikan tinggi yang progresif dan kompetitif, baik di tingkat regional maupun nasional.

C. Pemantapan Kelembagaan STAIN Cirebon

Menjelang akhir masa kepemimpinannya, Drs. H. Djono menegaskan pilihannya untuk tidak kembali mencalonkan diri. Hal itu beliau wujudkan dengan membuat pernyataan dalam sebuah surat yang isinya adalah "bahwa Drs. H. Djono tidak akan mencalonkan diri

sebagai Ketua STAIN Cirebon untuk periode yang kedua”. Pernyataan itu tidak hanya beredar di internal kampus, namun juga beliau kirimkan secara langsung ke Direktorat Jenderal - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Dirjen Diktis) Kementerian Agama. Di instansi terkait, Drs. H. Djono bertemu dengan Dr. Komarudin Hidayat selaku pejabat penerima dari Kementerian Agama dan beliau menyampaikan keinginannya tersebut. Dalam kunjungannya itu, Drs. H. Djono ditemani oleh sejumlah pejabat STAIN Cirebon seperti Drs. Adang Djumhur S., M.Ag (selaku Puket I), Drs. Dedy Djubaedi, M.Ag (selaku Puket III), Drs. H. Abdullah Ali, MA (selaku Ketua Jurusan Dakwah), dan Drs. Imron Abdullah, M.Ag (selaku Puket II setelah sebelumnya menjadi Ketua Jurusan Syariah). Keteguhan Drs. H. Djono dalam persoalan politik kampus tidak hanya sampai disitu, beliau juga memberi pemahaman kepada semua calon penggantinya bahwa ia bersikap netral dan hal itu ia wujudkan dengan cara tidak memilih salah satu calon/pihak yang berkompetisi dalam bursa pencalonan Ketua STAIN Cirebon yang baru.

Setelah melalui proses yang panjang, dari seluruh peserta yang mendaftarkan diri dalam bursa pencalonan, terpilihlah Dr. Imron Abdullah, M.Ag sebagai Ketua STAIN Cirebon definitif yang baru. Pada periode ini, STAIN Cirebon mengalami perkembangan yang luar biasa. Geliat pembenahan yang dilakukan, tidak hanya sebatas pada paras cantik fisiknya, namun juga pada aspek internal berupa pengembangan sumber daya manusia. Apabila fisik bangunan menjadi magnet penarik minat para calon mahasiswa, maka sumber daya manusia menjadi media yang mampu membantu para mahasiswa itu untuk berubah menjadi lebih maju, baik dari segi cara berpikir, maupun cara bekerja guna memandang kehidupan dengan lebih bijak. Kedua bidang tersebut didesain sedemikian rupa, agar STAIN Cirebon yang dipimpinnya, mampu berbenah dan bersaing dengan pelbagai lembaga pendidikan tinggi lain yang ada di Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya.

Demi mewujudkan cita-cita untuk membawa STAIN Cirebon menjadi lebih besar, Dr. Imron Abdullah, M.Ag mendorong agar lembaga yang dipimpinnya tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan di tingkat sarjana saja, namun harus dikembangkan dengan menyediakan sekolah pascasarjana. Melalui perjuangan yang melelahkan, seluruh elemen kampus yang memiliki kompetensi dalam bidang ini turut serta berkecimpung merumuskan bentuk dan berusaha untuk mewujudkannya. Pada akhirnya, di penghujung tahun 2004, kabar gembira tentang proses panjang izin penyelenggaraan Program Pascasarjana di lingkungan STAIN Cirebon berhasil didapatkan dari pemerintah. Surat Keputusan No. Dj.II/476/2004 tanggal 28 Desember 2004 itu menegaskan bahwa STAIN Cirebon memiliki izin dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam untuk membuka Program Pascasarjana Studi Pendidikan Islam. Keberhasilan untuk memperoleh izin itu bukan semata-mata karena persoalan politis semata, namun karena secara praktis di internal lembaga, sumber daya manusianya sudah terbilang mumpuni. Pada tahun itu, STAIN Cirebon telah memiliki tenaga pengajar yang handal dengan gelar doktor (S3) dan bahkan guru besar di dalam bidang keilmuan studi Islam.

Perhatian Dr. Imron Abdullah, M.Ag terhadap pengembangan kualitas kepribadian muslim dalam diri para mahasiswa, tampak dari pelbagai kebijakan yang diberlakukannya saat memimpin STAIN Cirebon. Dalam pandangannya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), baik itu yang berbentuk STAIN, IAIN, ataupun UIN merupakan lembaga yang terumuskan jati dirinya sebagai pemelihara dan pewaris pelbagai nilai-nilai positif yang terkandung dalam dua sumber pokok kehidupan yang menjadi pedoman terpenting umat Islam di dunia ini, yaitu: al-Qur'an dan Sunnah.⁹⁴

⁹⁴ Imron Abdullah, "STAIN dan Transformasi Budaya Keilmuan," dalam *LEKTUR*, Seri IX (Cirebon: STAIN, 2001), hal. 90

Oleh sebab itu, beliau mendorong perubahan elemen-elemen lembaga terkait, dari sebuah lembaga kampus bernomenklatur “unit” menjadi “pusat” dengan tujuan pemberian kewenangan yang lebih luas. Salah satunya adalah Pusat Pengembangan Tilawatil Qur’an (PPTQ). Perubahan itu bukan sekadar perubahan nama semata, namun memuat arti penting yang dapat memantik semangat para mahasiswa untuk mampu menyerap kebaikan dari sumber-sumber otoritatif hukum umat Islam dan mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan status itu, eksistensi PPTQ dapat dioptimalkan keberadaannya sehingga mahasiswa STAIN Cirebon bisa menafsirkan ayat-ayat suci, atau setidaknya mampu membaca Al-Qur’an.

Pengembangan pribadi mahasiswa berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur’an itu disadari oleh Dr. Imron Abdullah, M.Ag sebagai langkah penting untuk menghasilkan mahasiswa berwawasan keagamaan luas, karena inti pedoman ajaran Islam terdapat dalam pemahaman Al-Qur’an. Penghayatannya terhadap nilai-nilai keagamaan memang dalam, karena guru besar STAIN Cirebon tersebut tidak hanya berkecimpung dalam kehidupan religius kampus namun juga di luar lingkungannya, seperti di Islamic Centre dan Masjid Agung At-Taqwa Kota Cirebon. Dengan pergaulannya yang luas tersebut, ia menjadi tokoh yang serba bisa dan menjadi panutan banyak orang. Nilai-nilai Islam yang dipelajarinya sejak muda, telah membawa diri seorang Dr. Imron Abdullah, M.Ag menjadi motivator sekaligus motor yang menggerakkan seluruh elemen kampus untuk berubah dan berbenah. Di bawah kepemimpinannya, STAIN Cirebon mengalami banyak perkembangan dan perubahan.

Sebagai organisatoris yang ulung, Dr. Imron Abdullah, M.Ag mampu mengelola sumber daya manusia STAIN Cirebon secara proporsional. Ia memahami bahwa dosen-dosen di lembaga yang dipimpinnya memiliki potensi yang luar biasa. Oleh sebab itu, dalam

pelbagai kesempatan, dosen yang dimiliki oleh STAIN Cirebon tidak hanya difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar di kampus saja, namun juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar, dengan kerjasama yang lebih luas bersama instansi- instansi lainnya. Dr. Imron Abdullah, M.Ag yang menyadari pentingnya hal itu memfasilitasi pelbagai kegiatan kolaboratif tersebut, yang di antaranya adalah: Kolaborasi dengan Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Jawa Barat dalam program sertifikasi para tenaga pengajar di madrasah yang ada di Jawa Barat. Kerjasama ini menjadi capaian penting karena melibatkan perguruan tinggi lain yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang pendidikan dan “nama besar” sehingga secara tidak langsung menempatkan STAIN Cirebon sebagai salah satu bagian dari lembaga pendidikan dengan predikat tersebut.

Dalam program tersebut, Dr. Imron Abdullah, M.Ag memercayakan tim dari STAIN Cirebon kepada Anwar Sanusi, M.Ag yang memiliki relasi luas dan mampu mengorganisir seluruh anggotanya dengan baik. Melalui perjuangan yang panjang, STAIN Cirebon mendapatkan kesempatan untuk menjadi partisipan dalam program tersebut pada tahun anggaran 2003/2004. Di tahun itu, STAIN Cirebon memiliki tugas untuk melakukan kegiatan sertifikasi guru-guru madrasah yang ada di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Sejumlah perguruan tinggi lain yang turut serta pada tahun itu dua di antaranya adalah IKIP (UPI) Bandung yang bertugas di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, dan UIN Sunan Gunung Jati yang memiliki tugas di wilayah III Cirebon. Mengingat kegiatan ini berada dalam ranah pendidikan, maka secara struktural tim program sertifikasi guru MI STAIN Cirebon juga berasal dari Fakultas Tarbiyah yakni Drs. Nasehuddin Pono, M.Pd. Beliau didampingi oleh Drs. H. Nawawi sebagai Sekretaris dan Anwar Sanusi, M.Ag sebagai Bendahara kegiatan. Karena tim ini bekerja dengan baik, pada tahun anggaran 2004-2005 STAIN Cirebon kembali mendapat kepercayaan untuk mengelola

program sertifikasi guru MI di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Pada periode pertama kepemimpinannya, Dr. Imron Abdullah, M.Ag mampu menghadirkan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas pembelajaran di kampus. Sarana yang dimaksud di antaranya adalah gedung perkuliahan berlantai tiga (yang sekarang menjadi gedung Fakultas Tarbiyah lama di kampus 1, gedung Fakultas Syari'ah lama, gedung Pascasarjana lama), gedung untuk kantor Pusat Pengembangan Bahasa, gedung perpustakaan, dan gedung serba guna. Tidak hanya dalam hal sarana, dalam hal prasarana pun STAIN Cirebon di bawah kepemimpinan Dr. Imron Abdullah, M.Ag mengalami sejumlah peningkatan. Selain adanya negoisasi aset-aset tanah untuk perluasan kampus, ada pula pengukuhan status tanah milik lembaga yang dilakukan pada periode tersebut, seperti misalnya tanah seluas 2.543 meter persegi di Majasem, Kelurahan Karyamulya. Lahan yang sebelumnya adalah sebidang tanah sawah milik IAIN Gunung Jati Cirebon dengan tanda berupa patok bata itu dilakukan pengukuran pada tahun 2003 dengan surat ukur No. 158/Karyamulya/2003. Sehari setelahnya, tanah yang berada di lembar 26, Kota dc-4, Karyamulya itu akhirnya berhasil terbit sertifikatnya. Semua sarana dan prasarana itu merupakan hasil kerja keras seluruh pihak STAIN Cirebon untuk merealisasikan kemajuan kampus yang telah dicita-citakan bersama.

Perubahan fisik STAIN Cirebon yang diwakili dengan berdirinya sejumlah gedung baru, berjalan beriringan dengan perubahan dalam hal akademik, baik bagi mahasiswa ataupun dosennya. Pelbagai kebijakan dikeluarkan oleh para penentu keputusan di kampus untuk mendukung perkembangan akademik mahasiswa. Sementara untuk mengembangkan bekal akademik tenaga pengajar, mereka didorong untuk kembali melanjutkan studi mereka guna menopang gerak kemajuan keilmuan di lingkungan STAIN Cirebon. Dr. Imron

Abdullah, M.Ag menyadari bahwa kemajuan bidang akademik hanya akan terjadi apabila sumber daya manusia dosen dan karyawan yang dipimpinnya benar-benar mumpuni. Untuk itulah kebijakan menyekolahkan dosen dan sebagian karyawan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan kebijakan yang sangat bijak dan keputusan yang tepat. Kebijakan tersebut sebenarnya merupakan lanjutan dari apa yang pernah dirintis oleh Drs. H. Tauhid ketika menjabat Dekan dan Ketua STAIN masa transisi, namun pada masa Dr. Imron Abdullah, M.Ag lebih dipermudah, karena dosen-dosen diberi bantuan dalam hal pendanaan dan bersifat massif karena jumlahnya yang sangat banyak. Dalam hal ini, Dr. Imron Abdullah, M.Ag mengelola keuangan kampus dengan sistem tangan terbuka. Artinya, selama keuangan itu ada dan untuk kepentingan kemajuan bersama yang punya kaitan dengan lembaga, maka beliau tidak segan untuk memfasilitasinya.

Setelah menjabat selama 4 tahun sebagai Ketua STAIN Cirebon, tiba bagi Dr. Imron Abdullah, M.Ag untuk menyerahkan tampuk pimpinan kampus kepada tokoh yang kelak dipilih oleh seluruh elemen STAIN Cirebon sebagai ketua yang baru. Namun setelah melalui proses pemilihan panjang dan melibatkan banyak orang, Dr. Imron Abdullah, M.Ag kembali terpilih sebagai pemimpin STAIN Cirebon untuk periode kedua. Turut sertanya beliau dalam proses pencalonan ketua yang baru dilatarbelakangi oleh kemauannya untuk melanjutkan misi pembangunan fisik maupun akademik yang telah dimotori oleh Dr. Imron Abdullah, M.Ag sebelumnya. Torehan pada periode pertama kepemimpinannya, menjadi pertimbangan terbesar bagi civitas akademika STAIN Cirebon untuk mempercayakan kepemimpinan STAIN Cirebon periode 2006-2010 kembali ke pundak Dr. Imron Abdullah, M.Ag. Terhitung sejak 1 Maret 2006, beliau secara resmi menjalankan amanat sebagai Ketua STAIN Cirebon dan memulai masa kepemimpinannya pada periode kedua.

Pada masa pengabdian yang kedua, Prof. Dr. H. M. Imron Abdullah, M.Ag melanjutkan apa yang telah dicapainya pada periode sebelumnya. Pembangunan sarana terus digalakkan, terutama gedung-gedung perkuliahan. Sejumlah gedung yang dimaksud adalah gedung Fakultas Tarbiyah, gedung Fakultas Adadin, dan gedung Pascasarjana yang baru. Pembangunan sarana-sarana itu dilakukan karena tuntutan pengembangan lembaga mensyaratkan adanya ruang-ruang perkuliahan yang memadai bagi kegiatan mahasiswa selama melakukan pembelajaran dan aktivitas kemahasiswaan lainnya. Tidak hanya itu, pembangunan gedung rusunawa (asrama Mahasiswa) yang berbentuk gedung lima lantai, juga dilakukan di periode tersebut. Pembangunan asrama mahasiswa dilaksanakan berkat dana hibah sebesar Rp. 10.500.000.000,- (*sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Proses pengajuan untuk mendapatkan dana hibah tersebut sangat panjang, karena Anwar Sanusi, M.Ag. yang dipercaya oleh Ketua STAIN Cirebon, mesti bolak-balik ke Jakarta untuk memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu, surat dukungan dari pemerintah daerah dan juga surat pernyataan wakil orang tua mahasiswa sangat membantu dalam proses tersebut, sehingga di tingkat Jawa Barat, proposal yang diajukan oleh tim STAIN Cirebon menjadi peringkat tertinggi. Adapun pembangunan gedung ini dilakukan secara langsung oleh Kemenpera, dimana pemenang tendernya adalah CV. Pajar Parahiyangan dari Bandung. Pihak STAIN Cirebon, baik itu pimpinan lembaga ataupun Anwar Sanusi, M.Ag. sebagai pelaksana, hanya menerima kunci setelah bangunan itu jadi dan tidak mengikuti proses pembangunannya. Hal ini penting ditekankan untuk menjawab pelbagai tuduhan yang tidak bertanggungjawab terkait realisasi proyek gedung tersebut. Bagaimanapun, kehadiran rusunawa merupakan hal yang sangat strategis karena secara internal gedung itu dapat dijadikan oleh STAIN

Cirebon sebagai tempat pendalaman sekaligus praktikum keseharian baik Bahasa Arab- Inggris maupun amaliyah ke-Islaman mahasiswa, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam seluruh civitas akademika STAIN Cirebon.

STAIN Cirebon pada periode ini, mengupayakan pengembangan kampus dengan cara melakukan perluasan lahan. Beberapa bidang tanah kosong di Jalan Persil yang termasuk Kelurahan Sunyaragi berhasil diperoleh. Menurut sertifikatnya, lahan yang berada dalam lembar 9 kotak c-d-e-5 Peta Dasar Sunyaragi itu memiliki luas yang bervariasi, seluas 7.815 meter persegi yang diperoleh pada tahun 2006 dan 7.180 meter persegi yang didapatkan pada tahun 2007. Di samping itu, lahan seluas 3.425 meter persegi yang diperuntukkan pembangunan rusunawa dan ma'had kedua berhasil disertifikatkan pada tahun 2009 sehingga kekuatan hukumnya telah kuat dan tetap. Persoalan itu menjadi penting karena seiring berkembangnya waktu, kawasan Jalan Perjuangan menjadi kawasan pendidikan yang secara materil nilainya menjadi melambung tinggi. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan di tengah masyarakat yang berkaitan dengan perebutan lahan. Kepemilikan lembaga secara penuh terhadap pelbagai asetnya, akan meminimalisir konflik atau bahkan menghilangkannya sama sekali di kemudian hari.

Pelbagai perubahan yang digerakkan untuk memajukan pengembangan studi ke- Islaman sebelumnya, berhasil membuat peningkatan terhadap kemampuan keagamaan mahasiswa STAIN Cirebon. Namun meski demikian, pada masa itu nyatanya masjid yang memadai sebagai sarana untuk memusatkan kajian Islam dan mengaplikasikan teori yang dipelajari, belum dimiliki oleh kampus. Oleh sebab itu, Prof. Dr. H. M. Imron Abdullah, M.Ag menginisiasi pembangun Masjid Al-Jami'ah yang megah di dalam kampus dan berusaha merealisasikannya. Beliau bergerak cepat dengan memercayakan pembangunannya kepada panitia yang diketuai oleh

Drs. H. Effendi S. Umar. Dalam perjalanannya, pembangunan masjid berlantai dua dan mampu menampung ribuan jama'ah itu, menelan biaya sekitar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) dan bisa segera digunakan dengan baik oleh seluruh dosen, mahasiswa, dan karyawan kampus. Pada tanggal 23 Maret 2007, Masjid Al-Jami'ah STAIN Cirebon diresmikan oleh Ketua STAIN Cirebon, Prof. Dr. H.M. Imron Abdullah. Keberadaan masjid menjadi hal yang sangat diharapkan oleh seluruh pihak karena menjadi pondasi dan pilar pemberdayaan civitas akademika agar mampu mewujudkan sarjana muslim dan cendekiawan yang bertaqwa.

Di samping pelbagai kekurangannya, Prof. Dr. H. M. Imron Abdullah, M.Ag berhasil membawa STAIN Cirebon ke gerbang pengembangan dan perubahannya. Sebagai penyelenggara tertinggi jalannya roda pendidikan dalam lembaga, beliau telah memposisikan diri sebagai pemimpin yang bisa mendengar masukan staff dan dosen, melayani, mengarahkan dan bahkan tidak jarang membantu pelbagai keperluan materi mereka. Karena kebaikannya tersebut, ia dikenal sebagai seorang dermawan oleh banyak kalangan. Karakter yang demikian itu merupakan modal yang penting untuk membangun komunikasi efektif terhadap pelbagai pihak. Dengan perjuangan panjangnya selama dua periode tersebut, beliau seolah mampu manifestasikan dirinya sebagai agen perubahan STAIN Cirebon.

Semangat perubahan untuk menjadikan STAIN Cirebon sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang unggul terus menguat di periode kedua kepemimpinan Prof. Dr. H. M. Imron Abdullah, M.Ag. Harapan pengembangan seluruh elemen kampus itu bermuara pada tuntutan perubahan status lembaga, dari STAIN menjadi IAIN. Keinginan itu bukanlah kemauan yang mengada-ada, karena secara logis pelbagai hal yang menjadi syarat dan prasyarat transformasi telah dipenuhi. Sebagaimana disinggung di atas, secara fisik, STAIN Cirebon telah membangun banyak ruang kelas di dalam gedung-gedung perkuliahan

yang akomodatif. Kampus juga memiliki gedung perpustakaan memadai yang terdiri dari tiga lantai dan memuat banyak koleksi buku dengan isi beragam ilmu pengetahuan, mempunyai gedung pertemuan yang berkapasitas 800 orang, laboratorium bahasa yang menopang kemampuan berbahasa mahasiswa, laboratorium IPA-Biologi yang menyokong studi para pelajar *tarbiyah*, dan laboratorium computer yang meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Masjid al-Jami'ah juga dimiliki oleh STAIN Cirebon yang menjadi sarana terpenting bagi seluruh elemen kampus untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat Islam, yakni beribadah sepenuh hati ke hadirat Ilahi.

Selain dukungan sarana dan prasarana, secara akademik STAIN Cirebon juga memiliki dukungan dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Pada masa itu, perguruan tinggi Islam itu memiliki 7 (tujuh) orang gugur besar (professor), baik dalam bidang agama maupun sosial. Selain itu, STAIN Cirebon juga telah memiliki 20 orang dosen dengan kualifikasi doktor (S3) dalam berbagai bidang ilmu, dan ratusan magister (S2) yang melengkapinya sebagai tenaga pengajar mahasiswa. Tidak hanya tenaga pendidik, tenaga pendidikan yang terdiri dari karyawan dan pegawai administrasi pun banyak yang memiliki kualifikasi mumpuni karena dari keseluruhan 60 orang karyawan pada masa itu, 7 orang di antaranya telah memiliki kualifikasi magister (S2).

Dukungan untuk melakukan perubahan status lembaga juga mengalir deras dari masyarakat di wilayah Cirebon. Dukungan itu datang dari pelbagai macam pihak, mulai dari kalangan pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh alim-ulama, lingkungan bangsawan keraton Cirebon, cendekiawan dan juga masyarakat umum. Hal ini dibuktikan dengan pelbagai kegiatan yang berlangsung di kampus dan juga tengah masyarakat yang menghadirkan pelbagai rekomendasi dan saran untuk pengembangan STAIN Cirebon. Salah satu dari kegiatan tersebut adalah acara Sarasehan Alim-Ulama dan

Tokoh Masyarakat wilayah III Cirebon pada tanggal 14 Mei 2008 di gedung seba guna STAIN Cirebon. Sarasehan tersebut menghadirkan Prof. Dr. K.H. Said Aqiel Siradj pengurus PBNU, sejumlah dosen UIN Jakarta asal Cirebon, PRA. Arief Natadiningrat, SE selaku anggota DPD RI dan putra mahkota Kraton Kasepuhan Cirebon, serta Drs. H. Nunung Sanuhri, M.M yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Cirebon.

Modal dan dukungan itu telah direspon oleh pihak STAIN Cirebon dengan beberapa kali membentuk tim panitia persiapan perubahan lembaga. Secara teknis- internal, tim panitia yang berganti hingga empat kali karena habisnya waktu tugas, melakukan pelbagai upaya dan pelbagai rapat konsultasi, baik secara internal ataupun eksternal yang melibatkan institusi lainnya. Hasil kerja panjang seluruh panitia itu bermuara pada diberikannya restu dari pemerintah agar STAIN Cirebon bisa berubah menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Setelah melalui proses yang berliku dengan segala halangan dan rintangannya, akhirnya pada hari Sabtu 9 Januari 2010 jam 13.00-16.00 bertempat di halaman rektorat, Menteri Agama RI, Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si meresmikan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang disaksikan oleh segenap civitas akademik kampus dan masyarakat sekitar.

Selama dua belas tahun perkembangannya, yakni sejak tahun 1997 hingga tahun 2009, STAIN Cirebon telah mengalami pemantapan dalam hal kelembagaan karena pelbagai terobosan yang dilakukan pada periode sebelumnya, semakin kokoh dan mengalami pemantapan pada periode tersebut. Geliat akademik, kualifikasi tenaga pengajar, dan pembangunan fisik, menjadi ciri terpenting yang menjadi wujud nyata pemantapan tersebut. Perkembangan yang disokong oleh kekokohan pondasi lembaga, tidak hanya menjadikan STAIN Cirebon sebaga salah satu perguruan tinggi Islam yang maju semata, namun juga mampu membawa lembaga itu memiliki kewenangan yang lebih luas karena berhasil bertransformasi menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB VI

PERIODE TRANSFORMASI, 2009-2021

A. Dinamika di Masa Transisi

Setelah mendapatkan surat sakti berupa Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon resmi berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Perubahan status lembaga ini merupakan langkah penting transformasi lembaga menuju perguruan tinggi yang lebih maju dan unggul, di tingkat regional, dan nasional. Ketetapan pemerintah yang terbit pada tanggal 10 November 2009 tersebut, diiringi dengan surat keputusan Menteri Agama yang menetapkan bahwa secara kelembagaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan dipimpin oleh seorang Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) rektor. Tokoh yang dipilih oleh Kementerian Agama sebagai pejabat itu adalah Prof. Dr. Moh. Matsna HS., M.A. Penunjukkan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu diharapkan oleh pelbagai macam pihak dapat meredam gejolak politik internal yang mengiringi masa transisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pada periode awal transformasi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon sedang berada dalam masa transisi. Perubahan bentuk lembaga, dari STAIN Cirebon menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ternyata masih menyisakan pelbagai dinamika, khususnya terkait masalah kepemimpinan. Pasca penetapan status baru lembaga, sempat terjadi kebingungan di tengah civitas akademika kampus karena belum ada pimpinan definitif yang ditetapkan. Namun pada akhirnya, Kementerian Agama menetapkan Prof. Dr. Moh. Matsna HS., M.A. sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) rektor pada 8 Januari 2010. Penetapan putra daerah asal Sindang Jawa Cirebon sebagai pimpinan itu, diharapkan dapat mengakomodasi semua kepentingan elemen kampus, karena beliau berasal dari luar IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan terbilang sebagai sosok yang netral. Kebijakan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Agama tersebut diharapkan dapat menenangkan kondisi internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sangat dinamis. Selama hampir 10 bulan, Prof. Dr. Moh. Matsna HS., M.A. menjalani aktivitasnya sebagai pucuk pimpinan tertinggi lembaga. Ia bekerja dengan semangat yang tinggi, guna mengarahkan perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik.

Pucuk pimpinan tertinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon kembali berganti pada Bulan Oktober 2010, setelah adanya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/15747/2010 yang di dalamnya terdapat penunjukkan Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. sebagai pejabat pengganti sementara rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selang tiga bulan kemudian, pemerintah menetapkan Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. sebagai rektor definitif. Ketetapan itu dilandasi oleh Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/16520/2010 yang telah dilayangkan pada 6 Desember 2010 oleh Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si selaku Menteri Agama. Menurut Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. H. Mahsusi, M.M., pemilihan Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. dilakukan dengan prosedur yang jelas. Nilai kumulatif seluruh calon dalam serangkaian tes yang dilakukan, memperlihatkan bahwa total nilai yang didapatkan Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. merupakan nilai paling tinggi di antara calon lainnya.⁹⁵

Sejak ditetapkan sebagai Pgs Rektor, Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. telah berupaya untuk merangkul seluruh elemen kampus untuk dapat bekerjasama membangun lembaga. Tokoh akademisi yang sekaligus santri itu menyadari bahwa kemajuan akan sulit didapatkan apabila tidak dibarengi dengan usaha komunal yang dapat saling meringankan. Oleh sebab itu, sejak dalam kegiatan serah terima jabatan, Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. mengungkapkan bahwa

⁹⁵ Try & Ayu, "Rektor Definitif IAIN Syekh Nurjati Berinisial 'M'", *Buletin Methoda*, (Lembaga Pers Mahasiswa [LPM] Fatsoen IAIN Syekh Nurjati Cirebon), Edisi 45, Februari 2011, hal. 5

mungkin dirinya bukanlah sosok yang terbaik untuk memimpin lembaga, namun akan berusaha untuk menjadi lebih baik dengan terus belajar dari tokoh-tokoh yang memiliki kebaikan melebihi dirinya. Tidak hanya itu, ia juga meminta dukungan seluruh komponen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar dapat melaksanakan program kerja dengan baik, dan meminta dikritik apabila melakukan hal-hal yang kurang tepat. "Saya berharap seluruh civitas akademik bisa mengikuti apa yang baik dan berikanlah saya kritikan dan masukan yang baik," ujarnya dalam kesempatan tersebut.⁹⁶

B. Pembaharuan dan Pengembangan Kelembagaan

Setelah melalui proses awal yang dinamis, Prof. Dr. H. Maksum Mochtar, M.A. berupaya untuk menjalankan roda kepemimpinan kampus secara akomodatif. Hal itu dilakukan agar seluruh program kerja yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga cita-cita yang sebelumnya telah dicanangkan dapat direalisasikan. Pada masa kepemimpinannya, Prof. Dr. H. Maksum Mochtar, M.A. melakukan pemantapan program yang telah direncanakan atau bahkan dilakukan pada periode-periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satu program yang dimaksud adalah perintisan *Ma'had al-Jami'ah* (asrama mahasiswa perguruan tinggi), yang kehadirannya diperuntukkan para mahasiswa/i baru agar mereka dapat memahami ke-khasan lembaga pendidikan tinggi Islam. Untuk itu, dibentuk pula kepengurusan asrama mahasiswa yang berasal dari kalangan dosen guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penghuninya. Suasana asrama dihidupkan dengan nilai-nilai Islam, layaknya hidup di pesantren yang dipenuhi nuansa ke-Islam-an. Harapannya, mahasiswa/i baru dapat menjadi akademisi yang tidak hanya mumpuni dalam bidang keilmuan yang dipelajarinya namun juga dalam bidang keagamaan yang sangat aplikatif di tengah masyarakat. Kehadiran

⁹⁶ <https://www.radarcirebon.com/2010/10/26/pgs-baru-minta-kritikan/>.

lembaga ini merupakan media penting untuk mengembangkan dimensi spiritual para pelajar agar kepribadian dan karakternya dapat terbentuk secara baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan program *Ma'had Al-Jami'ah* merupakan upaya berkesinambungan para pemimpin kampus dari periode ke periode untuk mengembangkan kualitas para mahasiswa yang belajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pelbagai sarana dan prasarana yang sebelumnya direncanakan pengadaan dan pembangunannya, juga direalisasikan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. Sarana yang dibutuhkan untuk melengkapi laboratorium jurusan, diadakan guna mendukung secara optimal kegiatan pembelajaran. Inventaris meja, kursi, dan sejumlah sarana lainnya, juga turut diperbaharui dan ditambahkan. Tidak hanya soal sarana, untuk prasarana pun turut digalakkan. Pada tahun 2013, gedung asrama yang baru, berhasil dibangun untuk menampung animo mahasiswa/i baru yang sangat tinggi terhadap kehadiran *Ma'had Al-Jami'ah*. Bangunan ini terdiri dari 5 lantai, yang fasilitasnya jauh lebih bagus dari gedung asrama yang telah ada sebelumnya. Selain itu, pembangunan gedung pascasarjana yang diperuntukkan para mahasiswa tingkat lanjut, juga berhasil dirampungkan. Dengan sarana dan prasarana yang baik, kegiatan belajar mengajar mahasiswa pascasarjana menjadi lebih fokus dan nyaman karena memiliki motivasi belajar yang tinggi. Pelbagai fasilitas yang terus didorong pembangunannya, merupakan wujud konkret dari para pimpinan lembaga agar cita-cita IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk menjadi inspirasi kebaikan di tengah masyarakat melalui kiprah positif para mahasiswa/i nya dapat terwujud.

Menyadari bahwa area di kampus 1 sudah sangat terbatas, sedangkan kebutuhan untuk pengembangan kampus masih perlu dilakukan, maka pada tahun 2013 mulai dirintis lah perluasan areal IAN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk itu, dilakukan pemetaan wilayah dan tanah yang dapat diproyeksikan sebagai area pembangunan kampus

yang baru. Setelah mencari ke beberapa tempat, didapatkan lah lahan yang sesuai dengan pelbagai pertimbangan dan aspek yang dipikirkan para pejabat terkait, yang mana tanahnya berlokasi di Desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Tanah yang telah berhasil dibeli status SPH-nya itu adalah tanah yang merupakan lahan kebun seluas 40.190 M2. Akses ke lokasi lahan cukup representatif dan bisa dicapai dari Jl. Raya Panembahan yang merupakan bagian dari Jalan Raya Pantura. Di areal itu, sudah terdapat jaringan listrik yang dapat memudahkan pembangunan fasilitas lain untuk kepentingan perluasan kampus. Di tahun yang sama, IAN Syekh Nurjati Cirebon juga berhasil membeli tanah seluas 1.847 M2 berstatus SPH di Jalan Karang Yudha yang lokasinya berdekatan dengan kampus.

Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. adalah sosok yang sangat peduli terhadap mutu atau kualitas. Menurut kesaksiannya, Gumiandari menyatakan bahwa dalam banyak *event*, sang professor senantiasa mengingatkan kepada para civitas akademika akan pentingnya peningkatan kualitas atau mutu. Pelbagai macam hal, termasuk hal kecil seperti dalam sebuah penyusunan buku, ia tetap menyarankan agar mendesain suatu pekerjaan untuk selalu berada dalam koridor kualitas atau ranah yang bermutu.⁹⁷ Pada masa kepemimpinannya, lembaga PPMA (Pusat Pengembangan Mutu Akademik) yang merupakan salah satu unit kampus, dikembangkan menjadi Lembaga Penjamin Mutu (LPM) yang memiliki *concern* terhadap pengembangan aktivitas mahasiswa dan dosen yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada prosesnya, peningkatan ini sempat menjadi kebijakan yang tidak populer di mata sejumlah dosen karena penguatan mutu kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan regulasi mengenai pembuatan BKD (Beban Kerja Dosen) seolah dipaksakan.

⁹⁷ Septi Gumiandari, "Inisiator Penjaminan Mutu Lembaga", Ilman Nafi'a dan Septi Gumiandari (eds.), *Mengarungi Jejak Visionary Leadership: Sang Professor Santri*, (Cirebon: CV. Confident, 2020), hal. 117

Namun dalam perkembangannya, hal itu sedikit demi sedikit dapat diterima semua dosen sebagai bagian dari tugas yang memang menjadi kewajiban yang harus mereka tunaikan. Tokoh yang berasal dari kalangan santri ini menyadari bahwa dengan mutu, maka yang akan berkembang dan maju ke arah yang lebih baik bukan hanya civitas akademika perguruan tinggi semata, namun semua lapisan masyarakat yang bersentuhan dengan nilai-nilai pendidikan berkualitas yang dikembangkan oleh lembaga untuk kepentingan bersama.

Perhatian terhadap persoalan mutu kemudian dikembangkan ke dalam gagasan nyata berupa “konsep *muhsin*” yang dapat menjadi landasan pengembangan kampus. Bangunan keilmuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang dikonsepsikan melalui dimensi *Muhsin* sebagai distingsinya, memiliki harapan agar pelbagai macam disiplin ilmu yang dikembangkan di internal perguruan tinggi dapat mengandung nilai-nilai kerohanian yang mendalam. Bukan semata wujud kode formal atau nilai simbolis dari adanya motivasi regulasi, melainkan dimanifestasikan melalui wujud ruh keilmuan yang dalam. Dengan kata lain, tujuan pengembangan keilmuan yang dilakukan tidak hanya upaya untuk memenuhi tuntutan formalitas semata, namun juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pada aspek spiritual dan kerohanian. Terkait hal ini, Satibi menyatakan bahwa gagasan penyatuan dimensi *muhsin* yang sering diutarakan oleh Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. memiliki harapan agar konstruk bangunan pengetahuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya mengandalkan pada faktor epistemologinya *an sich*, tetapi penting juga pada aspek aksiologinya. Epistemologi bisa menghasilkan kebenaran pengetahuan yang bersumber dari olah rasional sedangkan pada aspek aksiologi menghasilkan pengetahuan nilai yang bersumber dari rasa kerohaniaan, seperti nilai kebaikan, nilai kerahmatan, nilai keindahan dan nilai keharmonian, dalam terminologi kitab *Ta’lim Muta’allim*

disebut *Ilmu Ahwal*. Nilai-nilai tersebut dengan sendirinya akan membentuk *Muhsin Sejati*.⁹⁸

Kepemimpinan Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. di IAIN Syekh Nurjati Cirebon berjalan selama 4 tahun, sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Secara kuantitatif, maka waktu jabatannya itu terbilang tidak terlalu lama karena hanya satu periode saja. Namun apabila dipandang dari sudut pengembangan dan pembaharuan kelembagaan, maka kita akan melihatnya sebagai suatu hal yang luar biasa. Pembangunan kampus, tidak hanya terjadi dalam bidang fisik semata, namun juga dalam bidang non-fisik yang meliputi mutu pendidikan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Secara fisik, kita dapat menyaksikan pelbagai macam sarana dan prasarana yang telah dibangun pada zaman itu. Sedangkan secara non-fisik, kita dapat melihat bahwa sejak masa itu pula perhatian terhadap peningkatan kualitas akademik kampus mengalami kenaikan. Hasil kerja yang diupayakan pada masa itu, tidak hanya tampak dari sisi internal lembaga, namun juga terlihat oleh pihak-pihak yang berasal dari luar IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Syamsun Ni'am dari IAIN Tulungagung misalnya, mengungkapkan bahwa meski secara hitungan waktu jabatannya tidak terlalu lama, namun perubahan yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. di IAIN Syekh Nurjati Cirebon terbilang spektakuler, karena ia mampu membawa pembaharuan dalam bidang akademis serta kelembagaan. Kebaikan yang diupayakan untuk kemajuan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada masa ini dapat menjadi inspirasi bagi para generasi penerusnya.⁹⁹

Meski pada masa kepengurusannya Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, M.A. telah menorehkan banyak prestasi dan berhasil

⁹⁸ Hajam, "Kritik Epistemologi Dengan Paradigma *Muhsin* (Refleksi Atas Pemikiran Integratif Prof. Maksun)", Ilman Nafi'a dan Septi Gumindari (eds.), *Mengarungi Jejak Visionary Leadership: Sang Professor Santri*, (Cirebon: CV. Confident, 2020), hal. 183

⁹⁹ Syamsun Ni'am, "Selamat Jalan Prof. Maksun. Inspirasimu Tidak Akan Pernah Padam", Ilman Nafi'a dan Septi Gumindari (eds.), *Mengarungi Jejak Visionary Leadership: Sang Professor Santri*, (Cirebon: CV. Confident, 2020), hal. 70

membawa pembaharuan dalam sejumlah bidang pengembangan kampus, kesalahan prosedur dalam pengadaan tanah untuk lokasi Kampus baru turut menyeret beliau ke meja hijau di akhir-akhir masa jabatannya sebagai rektor.¹⁰⁰

Hal itu membuat kepemimpinan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon sempat vakum selama beberapa waktu. Rektor definitif baru, yakni Dr. Sumanta, M.Ag., kemudian ditetapkan dan dilantik pada tanggal 6 Januari 2015 di Jakarta.¹⁰¹ Dalam proses pemilihan kandidat rektor oleh Senat IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ia mampu lebih unggul atas 2 kandidat lainnya, yakni Prof. Dr. Adang Jumhur M.Ag dan Prof. Dr. Jamali, M.Ag.

C. Transformasi Kelembagaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Dari Institut Menjadi Universitas

Pengembangan lembaga pendidikan tinggi Islam yang ada di Cirebon, tidak hanya merupakan keinginan seluruh civitas akademika yang ada di lembaga tersebut semata, melainkan juga merupakan cita-cita yang diinginkan terwujud oleh masyarakat Cirebon secara umum. Selain karena aspek historis yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan wilayah Cirebon yang dikenal sebagai sentra Islamisasi di Jawa Barat, masyarakat juga memahami bahwa kehadiran perguruan tinggi Islam dengan bentuk universitas akan membantu daerah mereka agar dapat lebih baik lagi ke depannya. Oleh sebab itu, animo yang tinggi dari masyarakat berkaitan dengan transformasi kelembagaan, mendorong seluruh komponen organisasi yang ada di

¹⁰⁰ Dalam putusan yang keluar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, diketahui bahwa dalam proses pengadaan tanah Drs. H. Ali Hadiyanto, M.Si selaku Kepala Biro, melakukan negosiasi dan kesepakatan harga kepada Pemilik Tanah yaitu NY. Melly Leonora Sarlim, yang mana hal itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU No. 2/2012 Jo Perpres No. 71/2012 Jo PERKA BPN No. 5/2012. Dalam struktur organisasi kampus yang juga dicantumkan dalam putusan itu, kedudukan Prof. Dr. H. Maksum Mochtar, M.A. berada di atas nama Drs. H. Ali Hadiyanto, M.Si. Hal itulah yang kemudian membuat nama rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga turut dipersalahkan oleh para jaksa penuntut umum yang bertugas. Lihat lebih lanjut, Putusan Nomor: 33/PIPIKOR/2015/PT.BDG

¹⁰¹ <https://kemenag.go.id/read/menag-lantik-sejumlah-rektor-dan-pejabat-eselon-ii-pg79l>

internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk berbenah dan bekerja lebih keras, guna menyongsong perubahan dengan langkah-langkah yang lebih konkret dan jelas. Di bawah kepemimpinan Dr. Sumanta, seluruh unit yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon didorong untuk segera dapat merealisasikan cita-cita bersama itu. Pelbagai unit diinstruksikan untuk saling bahu membahu melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, agar lembaga pendidikan tinggi ini dapat segera bertransformasi menjadi sebuah universitas yang dibanggakan bersama-sama.

Hingga tahun 2021, Dr. Sumanta, M.Ag berhasil membawa IAIN Syekh Nurjati Cirebon berkembang sehingga perguruan tinggi Islam itu mampu membuka 29 program studi, baik itu jenjang sarjana (S1) ataupun pascasarjana (S2 dan S3). Untuk jenjang sarjana, terdapat 24 program studi yang tersebar di 3 fakultas, yaitu: 1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; 2) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam; dan 3) Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah. Sementara untuk 5 program studi lainnya, berada di unit Pascasarjana. Secara kelembagaan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah terakreditasi. Melalui surat BAN-PT Nomor: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, diketahui bahwa institusi itu telah memperoleh peringkat B untuk hasil akreditasinya. Sedangkan untuk akreditasi setiap program studi, terdapat ragam perolehan. Adapun terkait akreditasi setiap program studi, sebagian besar program studi (prodi) telah memiliki akreditasi B sebanyak 52%. Terdapat 4 prodi baru yang belum memiliki nilai akreditas, 4 prodi yang terakreditasi C dengan persentase 14%. Di antara semua prodi, terdapat beberapa program studi yang telah memiliki akreditasi A dengan persentase 20%. Tidak hanya itu, dalam sertifikasi lainnya, IAIN Syekh Nurjati juga telah teruji melalui sertifikasi ISO 9001: 2015 pada tahun 2018. Bahkan setahun setelahnya, yaitu pada tahun 2019, telah dilakukan *surveillance* terhadap sertifikasi tersebut.

Dari segi sumber daya manusia, IAIN Syekh Nurjati memiliki kemampuan yang mumpuni karena pada tahun 2020 telah memiliki 390 dosen. Pada tahun 2019, dari seluruh dosen terdapat 25% dosen berpendidikan S3. Sementara 75% sisanya masih berpendidikan S2. Aktivitas para dosen dibantu oleh tenaga kependidikan yang sebagian besar telah berpendidikan sarjana, bahkan terdapat yang telah berpendidikan pascasarjana di tingkat doctoral (S3). Kondisi itu menggambarkan bahwa untuk operasional perguruan tinggi, IAIN Syekh Nurjati telah memiliki komposisi sumber daya manusia yang memadai. Rasio antara jumlah pegawai (dosen dan karyawan) terhadap jumlah mahasiswa, mencapai angka yang ideal. Dosen-dosen muda yang direkrut pada proses penerimaan pegawai yang dilakukan, disaring secara resmi melalui tes-tes kompetitif yang sulit untuk direkrut karena berbasis teknologi. Hal ini membuat tenaga pegawai yang terjaring adalah calon-calon terbaik dari para pelamar yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menuju universitas berdaya saing global.

Sumber daya manusia IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memadai menghasilkan aktivitas pendidikan dan penelitian yang sangat baik. Dalam bidang pendidikan, kinerja positifnya ditandai oleh menurunnya masa studi dan meningkatnya indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa dari tahun ke tahun. Pencapaian itu dapat terjadi karena Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terimplementasikan secara optimal untuk meningkatkan kinerja program studi. Dalam bidang penelitian, berbagai upaya yang dilakukan unit lembaga kampus (LPM) telah tampak menghasilkan peningkatan kinerja penelitian. Sejumlah kegiatan yang merupakan wujud usaha itu, di antaranya adalah:

1. Kegiatan sosialisasi dana hibah penelitian;
2. Pelatihan penulisan proposal penelitian;
3. *Workshop* atau pelatihan penguatan metodologi penelitian;

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian,
5. Mendorong perolehan Hak Paten/HAKI.

Peningkatan kinerja penelitian juga terlihat jelas dari *trend* penelitian dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari tahun ke tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan dalam penelitian yang diselenggarakan oleh LPM, baik dari segi judul, jumlah dosen, dan juga keterserapan anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan, tidak hanya diupayakan untuk bisa diterbitkan guna mendapatkan sertifikat HAKI, namun juga didorong untuk dapat dipublikasikan dalam bentuk Buku Ber-ISBN, tulisan dalam *proceedings* kegiatan ilmiah, dan artikel jurnal nasional ataupun internasional. Untuk hal yang terakhir ini, IAIN Syekh Nurjati Cirebon patut berbangga diri karena dosen-dosennya terus meningkatkan jumlah tulisan yang diterbitkan oleh jurnal bereputasi internasional dengan indeks Scopus. Selain itu, hingga tahun 2019, IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus mengalami kenaikan peringkat indeks dalam Sistem Indeksasi Sinta dengan meningkatnya publikasi yang berasal dari para dosen dalam sitasi *google scholar* mereka.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus berbenah dengan membangun serta mengembangkan pelbagai macam fasilitas yang dibutuhkan. Sejumlah sarana dan prasarana yang berhasil dibangun pada kurun waktu tersebut adalah: Gedung untuk Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Gedung Fakultas Syariah, dan Ekonomi Islam (FSEI), Gedung Laboratorium Terpadu, dan Gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK). Untuk menyokong kegiatan kampus, dibangun pula fasilitas olah raga yang lebih memadai, seperti lapangan futsal dan lapangan tenis meja. Di samping itu, sarana dan prasarana yang dimiliki IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga dapat terbantu oleh adanya hibah ataupun bantuan yang merupakan bagian dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) pihak swasta yang memiliki hubungan baik dengan lembaga. Beberapa

inventaris yang berasal dari hibah itu di antaranya adalah mobil *pick up* untuk membantu kegiatan di dalam lembaga, mobil bus kampus untuk antar jemput mahasiswa atau dosen, dan mobil minibus untuk operasional yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika kampus. Sementara itu, terdapat pula tambahan-tambahan pelbagai fasilitas lain, berupa penambahan inventaris laptop dan komputer (*desktop*) yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan ujian CBT (*computer based test*), penambahan kapasitas *bandwidht* untuk mendukung kegiatan daring di kampus, penambahan area *hotspot*, dan juga penambahan kapasitas *server* yang membantu agar website universitas dapat dioperasikan dengan baik.

Seluruh pengembangan sarana dan prasarana yang dilakukan pada kepengurusan Rektor Dr. Sumanta, M.Ag., bermuara pada keinginan komunal agar IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat bertransformasi, dari sebuah lembaga berbentuk “institut” menjadi lembaga dengan status “universitas” yang memiliki pelbagai kewenangan yang lebih luas. Oleh sebab itu, sejak awal kepemimpinannya, Dr. Sumanta, M.Ag. merintis pembangunan pelbagai hal yang bisa mendukung transformasi tersebut. Tidak hanya mempersiapkan aspek internal, pimpinan juga terus mempelajari aspek-aspek eksternal, yang salah satunya adalah regulasi terkait perubahan perguruan tinggi keagamaan. Para pimpinan lembaga mempelajari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan dan kemudian melengkapi semua hal yang dibutuhkan melalui unit-unit lembaga yang ditugaskan. Dengan kerjasama yang apik dari seluruh elemen kampus, IAIN Syekh Nurjati Cirebon akhirnya dapat mengajukan proposal perubahan lembaga kepada Kementerian Agama. Pengajuan ini tidak hanya dilakukan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon semata, namun juga oleh pelbagai IAIN lain yang ada di beberapa daerah, yang merasa bahwa lembaga mereka sudah pantas untuk ditransformasikan menjadi sebuah “universitas”.

Adapun sejumlah persyaratan agar lembaga-lembaga yang ingin beralih status bisa memenuhinya, telah ditetapkan oleh pemerintah pada 5 Agustus 2020 melalui sebuah Peraturan Menteri Agama (PMA). Untuk IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berupaya mengembangkan diri dari kampus berlabel “institut” menjadi kampus dengan label “universitas”, maka memerlukan syarat-syarat berikut:¹⁰²

- a. kualifikasi pendidikan dosen;
- b. kualifikasi kepangkatan akademik dosen;
- c. jumlah dan jenis program studi dan/atau fakultas;
- d. rasio jumlah dosen dan mahasiswa;
- e. kualifikasi jumlah tenaga kependidikan;
- f. status akreditasi program studi; dan g) sarana dan prasarana.
- g. Di samping itu, perubahan tersebut juga mesti didasari oleh:
- h. kebutuhan masyarakat;
- i. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; c) kebutuhan pembangunan nasional; dan
- j. pertumbuhan potensi jumlah mahasiswa.

Pada 11 Februari 2021, melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan di Jakarta oleh Kementerian Agama, diketahui bahwa ternyata IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan salah satu IAIN yang lolos penilaian proposal pengajuannya, untuk ditransformasikan statusnya menjadi universitas. Keputusan itu dihasilkan dari proses penilaian yang panjang dari tim penguji terhadap proposal dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa hanya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di samping dua IAIN lainnya, yaitu IAIN Bukittinggi dan IAIN Batusangkar, yang lolos penilaian dan

¹⁰² Lihat lebih lanjut, Pasal 3 dan Pasal 5, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan

lebih unggul dari 7 IAIN lain yang juga mengajukan proposal perubahan lembaga kepada Kementerian Agama.¹⁰³

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T., menegaskan bahwa alih status IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi UIN harus pula diikuti dengan reorientasi visi mewujudkan universitas Islam kelas dunia dengan varian program studi yang tersedia, namun tetap mengusung ke-khasan perguruan tinggi Islam Indonesia yakni moderasi beragama dan *Islam Washatiah*. Selain itu, Direktur PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, dalam forum yang sama, menyatakan bahwa ke depannya transformasi kelembagaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi UIN Syekh Nurjati Cirebon, akan dibarengi dengan proses pembentukannya menjadi *Pilot Project* Universitas Islam Siber Indonesia (UISI). Dengan kata lain, UIN Syekh Nurjati Cirebon akan diproyeksikan oleh Kementerian Agama sebagai *pioneer Open Islamic Educational Resources* (OIER) di dunia dengan teknologi *Digital Multimedia University* (DMU). Perwujudan konkretnya, di UIN Syekh Nurjati Cirebon akan diselenggarakan pendidikan jarak jauh (PJJ) berbasis teknologi yang akan mendorong perubahan paradigma konvensional di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).¹⁰⁴

Pada bulan-bulan berikutnya di tahun 2020, perubahan yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon mulai tampak wujudnya. Di internal institut, pimpinan segera menginstruksikan pembentukan adanya tim khusus yang diperuntukkan mempersiapkan pendidikan jarak jauh (PJJ) berbasis teknologi. Tim ini tidak hanya diberi pelatihan yang komprehensif terkait pendidikan daring tersebut, namun juga diberi kesempatan untuk melakukan *study* banding ke perguruan tinggi lain yang telah melakukan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi

¹⁰³ <https://info.syekhnurjati.ac.id/lolos-asesment-kementerian-agama-iaain-syekh-nurjati-cirebon-siap-jadi-uin/>.

¹⁰⁴ <https://www.radarcirebon.com/2021/02/16/iaain-cirebon-kian-dekat-menjadi-uin/>

informatika dengan baik. Hal itu dilakukan agar tim yang dibentuk bisa menyelenggarakan kegiatan perkuliahan *online*, guna mendukung transformasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi sebuah universitas dengan label Universitas Islam Siber (*Cyber Islamic University*) yang sejak beberapa waktu sebelumnya telah diproyeksikan oleh Kementerian Agama sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memiliki fokus terhadap aktivitas digital di dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahannya.

Pembentukan Universitas Islam Siber (*Cyber Islamic University*) sendiri merupakan kebijakan dari Kementerian Agama yang berupaya menghadirkan sebuah *pilot project* di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan tentang perintisan universitas Islam yang memiliki basis teknologi informasi yang maju dan kompetitif. Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan bahwa kementerian yang ada di bawah kepemimpinannya tengah mengupayakan perintisan perguruan tinggi Islam berbasis siber. Kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam lembaga tersebut, didesain secara daring 100% dengan memanfaatkan jaringan internet.¹⁰⁵ Dengan teknologi digital multimedia, universitas yang dibentuk dapat menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang memiliki sumber daya pendidikan terbuka, sehingga bisa diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Semua ini tidak hanya mendorong adanya efisiensi di dalam dunia pendidikan, namun juga efektivitas apabila pendidikan yang dilakukan dapat didesain secara optimal.

Gagasan besar yang diinisiasi oleh Kementerian Agama itu direspon dengan baik oleh pihak IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pimpinan perguruan tinggi menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* di lembaga mereka telah berupaya untuk mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, dibentuklah tim khusus yang melaksanakan pelbagai macam persiapan untuk menjawab keinginan

¹⁰⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210902145107-20-688851/menag-bangun-cyber-islamic-university-100-persen-online>

mewujudkan pendidikan terbuka bagi seluruh umat Islam yang hendak menuntut ilmu tersebut. Sejumlah program dirancang sedemikian rupa dengan matang, mulai dari aspek penyiapan tenaga SDM (Sumber Daya Manusia) yang menjadi motor penggerak program, infrastruktur digital yang menjadi media penting dalam kegiatan KBM (Kegiatan Belajar dan Mengajar), sarana dan prasarana yang menjadi pendukung kegiatan, hingga pelbagai instrumen legalitas lainnya yang dibutuhkan. Pada akhirnya, di awal Oktober 2021, IAIN Syekh Nurjati Cirebon membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk pendidikan jarak jauh (PJJ) PAI sebagai langkah awal menuju Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia (UISSI).¹⁰⁶ Program studi baru ini merupakan kerja nyata pihak IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mentransformasi lembaga ke bentuk yang lebih besar dari wujud kelembagaan yang telah ada sebelumnya.

¹⁰⁶ <https://m.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/3NO9vqyk-iain-syekh-nurjati-cirebon-buka-pendaftaran-mahasiswa-baru-pendidikan-jarak-jauh-pai>

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian ini, diketahui bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah berkembang sejak lama. Selama puluhan tahun, lembaga itu mengalami perubahan, dari sekadar lembaga pendidikan tinggi yang berafiliasi ke kampus lain, hingga kini menjadi perguruan tinggi yang akan berubah menjadi sebuah lembaga dengan kewenangan pendidikan yang lebih luas.

Secara garis besar, perkembangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Periode Perintisan dan Peletakan Landasan, 1962-1965.

Pada periode ini, kondisi Cirebon pasca Proklamasi di zaman kepemimpinan Presiden Soekarno berada dalam kondisi yang kritis. Perkembangan situasi pemikiran sosial kemasyarakatan pada masa itu yang dinamis menyebabkan kondisi kaum terpelajar muslim yang ada di Cirebon kebingungan untuk melakukan perjuangan. Sebagai solusi untuk melakukan perjuangan, kaum terpelajar tersebut berjuang melalui pendidikan. Untuk merintisnya, mereka menginisiasi pendirian grup kajian *Islamic Study Club* (ISC) dan Universitas Syarif Hidayatullah (UNISHA) yang berada di bawah naungan Yayasan Syarif Hidayatullah. Pada masa itu, lembaga-lembaga ini masih bersifat swasta karena belum dinegerikan. Lembaga-lembaga tersebut merupakan rintisan awal IAIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Periode Penyesuaian Akademik dan Manajemen, 1965-1997.

Pasca bergolaknya G30S dan kepemimpinan Soekarno digoyang oleh perubahan di tahun 1965, lembaga pendidikan tinggi Islam di Cirebon mengalami perubahan karena di tahun

itu lembaga tersebut dinegerikan. Sejak dinegerikan hingga tahun 1997, cikal bakal IAIN Syekh Nurjati Cirebon harus menyesuaikan diri, baik secara akademik ataupun manajemen, dengan keinginan pemerintah. Hal itu membuat IAIN Syekh Nurjati Cirebon sempat beberapa kali memiliki induk, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oleh sebab itu, hal pertama yang dijelaskan pada bab ini adalah perkembangan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon. Periode ini terjadi selama 11 tahun, sejak 1965-1976, dan pernah dipimpin oleh 3 dekan yang berbeda. Setelah itu, diuraikan pula perkembangan perguruan tinggi ini saat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati Cabang Cirebon di tahun 1976 hingga 1997. Pada kurun waktu tersebut, terdapat 5 dekan yang pernah memimpin lembaga.

3. Periode Pemantapan Kelembagaan, 1997-2009.

Metamorfosa lembaga yang semula berstatus sebagai Fakultas Tarbiyah Cabang berubah menjadi STAIN Cirebon yang memiliki sifat pengelolaan yang otonom. Pada periode ini, terjadi pemantapan kelembagaan dengan wujud fisik dan akademik yang lebih memadai. Perubahan itu tidak hanya memperlihatkan citra positif bagi daerah, namun juga bagi kalangan muslim setempat yang telah memiliki perguruan tinggi Islam yang unggul di daerahnya. Hingga beralih status pada tahun 2009, lembaga ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan terus berbenah secara kelembagaan. Pada era baru ini, STAIN Cirebon pernah dipimpin oleh dua pimpinan yang berbeda.

4. Periode Transformasi, 2009-2021.

Sejak berubah menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, lembaga ini tidak lantas menghentikan semangatnya untuk terus berkembang. Perubahan itu malah mendorong seluruh elemen kampus untuk bersiap menyambut transformasi lembaga menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang lebih maju dan siap bersaing secara global. Perubahan yang didorong tidak hanya dari segi kuantitas mahasiswa ataupun dosen, namun juga dari segi kualitasnya. Hal itu membuat kurun waktu ini menjadi era transformatif, dimana IAIN Syekh Nurjati terus bekerja untuk menyongsong perubahan. Transformasi yang terjadi pada periode ini, digerakkan oleh dua pimpinan bergelar rektor yang berbeda.

B. Saran

Sejarah panjang IAIN Syekh Nurjati Cirebon, seyogyanya dibahas dalam pembahasan konteks yang lebih spesifik. Sebab selama kiprahnya yang mencapai angka puluhan tahun itu, lembaga ini telah mewarnai perjalanan sejarah pendidikan, baik di tingkat wilayah Jawa Barat ataupun di tingkat nasional. Namun demikian, pelbagai keterbatasan, khususnya terkait pendanaan kegiatan penelitian, membuat kajian ini hanya bisa dilakukan dalam konteks yang lebih luas tanpa memiliki fokus pada spesifikasi kajian tertentu. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pihak-pihak terkait, karena kajian yang lebih memuaskan akan didapatkan melalui studi yang lebih mendalam.

DAFTAR FUSTAKA

- Abdullah, Imron., 2001., "*STAIN dan Transformasi Budaya Keilmuan*," dalam *LEKTUR*, Seri IX Cirebon: STAIN,
- Adnan, Abdul Basit., dan Abdulhayi Adnan, 1998., "Prof. K.H. R. Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam", dalam Mohammad Damami (ed.), *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga,
- Abdurrahman. Dudung., 1999., *Metode Penelitaian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu :
- Ankersmit, F.R 1987., *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (diterjemahkan oleh Dick Hartoko), Jakarta: PT. Gramedia,
- Ariwibowo, Elfian, Prasetyo dan Ria Susanti Johan, 2017., "Peran Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Produktivitas Pendidikan", *Sosio-E-Kons*, Vol. 9, No. 3 (Desember 2017).
- Anshari, Endang Saifuddin., 1986., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta : Rajawali ;
- Assegaf, Abdur Rahman., 2007., *Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet. I., Yogyakarta: Suka Press,
- Asrohah, Hanum., 1999., *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. Asrohah,
- Basit., Adnan Abdul., dan Abdulhayi Adnan, 1965., "Prof. K.H. R. Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam", dalam Lima Tokoh

- Basri MS. 2006., *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan, Teori dan Praktik)*. Jakarta : Restu Agung. Committee on Historiography
- Boland, B.J.,. 1982., *The Struggle of Islam in Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff,
- Budianto, Irmayanti M. ., *Realitas dan Obyektivitas: Refleksi Kritis Atas Cara Kerja Ilmiah*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra,
- Bungin. Burhan., 2008., *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.Burhan Bungin :
- Bull, Ronald A. Lukens., 2013., *Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict*, New York: Palgrave Macmillan,
- Burhanuddin, Jajat., 2014., "The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, 2014,
- Burke Peter., 1991., "History of Events and the Revival of Narrative", Peter Burke (ed.), *The New Perspectives on Historical Writing*,
- Daulay, Haidar Putra., 2012., *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Djajadiningrat, P.A. Hoesein. 1987., *Islam in Indonesia*", dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam — The Straight Path: Islam Interpreted by Muslims*, Delhi: Motilal Banarsidass,
- Faisal, Jusuf Amir., 1995., *Reorientasi pendidikan Islam*. Jakarta ; Gema Insani;
- Gottschalk, Louis., 1986., *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press. :

- Gumiandari, Septi., 2020., "Inisiator Penjaminan Mutu Lembaga", Ilman Nafi'a dan Septi Gumiandari (eds.), *Mengarungi Jejak Visionary Leadership: Sang Professor Santri*, Cirebon: CV. Confident,
- Hajam, 2020., "Kritik Epistemologi Dengan Paradigma Muhsin (Refleksi Atas Pemikiran Integratif Prof. Maksum)", Ilman Nafi'a dan Septi Gumiandari (eds.), *Mengarungi Jejak Visionary Leadership: Sang Professor Santri*, Cirebon: CV. Confident, 2020
- Hakim, Lukman., 2017., *Merawat Indonesia: Belajar dari Tokoh dan Peristiwa*, Artawijaya (ed.), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- Hakim, Lukman., 2019., *Biografi Mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangan*, Artawijaya (ed.), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
- IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1988., *Kenang-Kenangan 20 Tahun IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1968-1988*, Bandung: Gunung Djati Press,
- Ismaun, 2005., *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan* Bandung; Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Presiden Republik Indonesia
- Kraince, Richard., 2008., "Islamic higher education and social cohesion in Indonesia." *Prospects* 37 (3),
- Panitia Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, 1988., *Kenang-Kenangan 20 Tahun (1968-1988)*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati,
- Peraturan Pemerintah 1950 No. 34 tentang Pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri.

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Presiden No.11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri.

Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan IAIN.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan

Putra., Daulay, Haidar., 2012., *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana,

Lemon, M.C., 2003. *.Philosophy of History: A Guide for Students*, London and New York: Routledge Taylor Francis Group,

Redaksi, Tim., 2008., *Kamus Bahasa Indonesia.*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Mastuki HS, *Kebangkitan Santri Cendekia: Jejak Historis, Basis Sosial, dan Persebarannya*, (Tangerang Selatan: Pustaka Compass, 2016

Rukiati, Enung K. dkk, 2006., *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Kota Surakarta (Solo) ; Pustaka Setia ;

Sanusi, Anwar., 2013., *Pengantar Ilmu Ilmu Sejarah*. Syekh Nurjati Press, Cirebon. ISBN 978-602-98231-3-4

Sokah Umar Asasuddin, 1998., "Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya," dalam Mohammad Damami (ed.), *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga,

Sjamsudin, Helius., 2007., *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak ;

Soeara Moeslimin Indonesia, No. 12, Th. 3, 4 Rajab 1364/15 Juni 2605,

- Mursyid, Hasbullah., dkk., *Amal Bakti Departemen Agama RI: 3 Januari 1946 – 3 Januari 1996 (50 Tahun Departemen Agama) Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Edisi ke-II, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996
- Nasution, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 142.
- Ni'am, Syamsun., "Selamat Jalan Prof. Maksun. Inspirasimu Tidak Akan Pernah Padam", Ilman Nafi'a dan Septi Gumiandari (eds.), *Mengarungi Jejak Visionary Leadership: Sang Professor Santri*, (Cirebon: CV. Confident, 2020,
- Thaib Dahlan dan Moh. Mahfud MD, 1984., *5 Windu UII*, (Yogyakarta: Liberty,
- Tendi, 2018., "Islam dalam Perjuangan Bagus Rangin Melawan Pemerintah Kolonial Belanda-Prancis dan Inggris, 1810-1812" *Tamaddun Vol. 6 , No. 2*, (Juli - Desember)
- Tim Penulis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon., 1999, *Kenangan Wisuda Sarjana: 28 Agustus 1999*, Cirebon: STAIN Cirebon,
- Try & Ayu, "Rektor Definitif IAIN Syekh Nurjati Berinisial 'M'", *Buletin Methoda*, (Lembaga Pers Mahasiswa [LPM] Fatsoen IAIN Syekh Nurjati Cirebon), Edisi 45, Februari 2011, hal. 5
- Zuchdi, Darmiyati. 2008. Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca Peningkatan Komprehensi. Yogyakarta: UNY Press
- Zuhairini, dkk., 1995., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara,
- Zuhri, Saifuddin., 2013., *Berangkat dari Pesantren*, Jajang Husni Hidayat (ed.), Yogyakarta: LKiS Yogyakarta,

Internet

<https://www.radarcirebon.com/2010/10/26/pgs-baru-minta-kritikan/>.

<https://kemenag.go.id/read/menag-lantik-sejumlah-rektor-dan-pejabat-eselon-ii-pg791>

<https://info.syekhnurjati.ac.id/lolos-assesment-kementerian-agama-iain-syekh-nurjati-cirebon-siap-jadi-uin/>.

<https://www.radarcirebon.com/2021/02/16/iain-cirebon-kian-dekat-menjadi-uin/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210902145107-20-688851/menag-bangun-cyber-islamic-university-100-persen-online>